



**PANDANGAN PENGURUS PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT  
NAHDLATUL ULAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2011 - 2016  
TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**

**Tesis**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum)  
Dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam  
Konsentrasi Politik Islam**

**Oleh:  
NAPISAH  
NIM:090302099**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2013**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu kepemimpinan dalam pengaturan kehidupan sosial dan bernegara adalah suatu bagian dari *sunnantullah*.Kepemimpinan dibutuhkan karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada diri manusia.Kecenderungan alamiah manusia untuk berkumpul dan berkelompok baik formal atau informal, resmi atau tidak resmi, menurut adanya pemimpin dan kepemimpinan.

Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sama sekali sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan yang mulia mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting.Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan tidak mungkin terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin (Rusman Hakim, 2001, hlm 63).

Kita tidak dapat membayangkan kelangsungan hidup sekelompok unit sosial apapun tanpa adanya suatu kepemimpinan, oleh karena itu persoalan kepemimpinan ini akan selalu memberikan kesan yang menarik. Kepemimpinan mencakup aspek kemampuan menggerakkan, mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup kepemimpinan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama.

Seiring dengan semakin menariknya permasalahan kepemimpinan, dewasa ini fenomena pemimpin menjadi isu penting dalam setiap agama, termasuk Islam.Pada dasarnya, kepemimpinan dalam Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah di

muka bumi. Akhir surah al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia untuk memegang amanah dalam mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi ini. Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dan laki-laki, dimana dalam hukum islam hal ini disebut sebagai *taqlidiyah* (Lily Zakiyah Munir, 1999, hlm. 69).

Namun demikian sebagai agama yang berdasarkan pada sumber-sumber tekstual (al-Qur'an dan hadits), maka ajaran Islam yang termaktub dalam teks dipahami dan ditafsirkan bebrbeda antara satu penafsir dengan penafsiran lainnya. Konsekuensi dari varian interpretasi tersebut mempengaruhi konsepsi kepemimpinan dalam wacana politik Islam. Salah satu isu klasik seputar pemimpin yang sering menjadi perdebatan akademik dalam studi keislaman adalah diskursus kepemimpinan perempuan di ranah sektor publik dan pemerintahan. Perdebatan seputar wacana tersebut melahirkan pro dan kontra dengan sederet argumentasi yang diajukan oleh masing-masing kelompok untuk mendukung pendiriannya, baik dari segi teologis, sosiologis, maupun historis (Ridwan, 2008, hlm. 17).

Berbicara perdebatan pemimpin perempuan khususnya dalam dunia Islam, ada dua pendapat yakni pertama mereka yang tidak mendukung peran kepemimpinan perempuan muslim. Kelompok ini mempunyai pandangan bahwa perempuan ditugaskan untuk menguruskan hal-hal domestik, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan lain-lain. Dunia publik adalah wilayah laki-laki. Kelompok ini merujuk pada teks-teks al-Qur'an surah Annisa' 34, al-Baqarah 228 yang mana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa laki-laki memiliki kelebihan untuk menangani urusan publik. Perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap pantas "hanya" untuk laki-laki. Pada realitasnya, pandangan ini menempatkan perempuan, baik pada dunia teks maupun praktis pada posisi diskriminatif dan subordinat dihadapan laki-laki. (Maftuchah, 2008, hlm. 227).

Adapun kelompok kedua adalah mereka yang mendukung peran perempuan sebagai pemimpin. Dalam pandangan mereka visi kemanusiaan universal yang dibawa Islam sebagai agama yang *rahmatun lil' alamin* adalah berupaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, persamaan tanpa ada diskriminasi antara jenis dan kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan (Erwati Aziz, 2002, hlm. 26). Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang dengan jenis kelamin apapun, punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah publik dan pemerintahan.

Pada hakekatnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, setara, seimbang dan bersifat *partnership* dalam segala lini hubungan kehidupan. Sebagaimana penafsiran Quraish Shihab pada kata *awliya* yang terdapat dalam surah Taubah ayat 71 adalah mencakup pengertian kerjasama, bantuan dan penguasaan. Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi serta mensejahterakan manusia.

Seiring dengan tanggung jawab dan sebagai khalifah di muka bumi, Allah memberikan kepada mereka laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan untuk bertindak secara otonom guna menunaikan amanah. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran profesi publik baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Tidak sedikit sejarah mencatat peranan aktif perempuan bersama kaum laki dalam berbagai sektor kehidupan. Pertama, al-Qur'an mengekalkan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin dalam kisah Ratu Balqis dari negeri Saba Yaman Selatan. Kedua, dalam perspektif hadits dan sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut bersama laki-laki dalam berbagai aktivitas dan kegiatan umum, sosial, dan kemasyarakatan termasuk kegiatan politik. Mereka sering terlibat dalam

diskusi dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang dianggap kurang tepat; seperti Aisyah, Fatimah binti Rasulullah, Ummu Salamah binti Ya'qub, Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Sukainah dan masih banyak lagi wanita Islam lainnya. Termasuk di antaranya turut berperang bersama Rasulullah bahkan beberapa diantaranya gugur di medan perang seperti Ummu Salamah, Shafiyyah, Ummu Sinan al-Ghaffriah dan lain-lain. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah *baiat* untuk kesetiaan dan loyalitas kepada Nabi dan pemerintahan beliau.

Adapun di zaman *Khulafaur Rasyidin* khalifah kedua yakni Ummar Ibn khattab pernah mengangkat as Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpecaya untuk menjabat sebagai manager pasar di Madinah (Khamenei, 2004, hlm. 74). Dalam hal ini penunjukkan as-Syifa adalah representasi persetujuan Umar bahwa perempuan diizinkan memangku jabatan politik seperti laki-laki.

Realitas sejarah ini menunjukkan bahwa para wanita bisa dan mampu berbuat seperti kaum pria dalam usaha dan berkarya. Di Indonesia sepanjang perjalanan Nusantara kehadiran perempuan sebagai pemimpin publik telah banyak dibuktikan dan tidak terpungkiri, seperti halnya Ratu Sima yang memimpin Kerajaan di tanah Jawa, Ratu Kaliyamat pernah menjadi Adipati Demak sekaligus sebagai penasehat Kerajaan Demak, Tribuana Tunggal Dewi Jaya Wisnu Wardani yang memimpin Majah Pahit selama 22 tahun (Zaitunah Subhan, 2004, hlm. 9). Adapun di Aceh sebagai kerajaan Maritim dan Islam terbesar di Asia Tenggara, sejarah mencatat Ratu Nihyasiyah Rawangsa Khadiyu memimpin kerajaan Islam Samudra/Pase (1400-1428) (Hasimi, 1976, hlm. 24). Masih dalam sejarah pemerintahan di Aceh, tercatat empat perempuan Aceh sebagai *sultanah*, yakni 1) Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1541-1675) putri Sultan Iskandar Muda, 2) Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), 3) Inayah Syah Sakiatuddin Syah (1678-1688) dan 4) Kamat Syah Zairatuddin Syah (1688-1699) dan masih banyak deretan para pemimpin perempuan yang telah tercatat

dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan Indonesia yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Teuku Fakinah dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam konteks kekinian, upaya perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan oleh berbagai kelompok aktivis, ilmuwan dan akademisi terus bergulir di berbagai negara tanpa batas garis geografis maupun ideologis, namun lebih merupakan permasalahan global lintas ruang dan waktu. Sebagai tokoh-tokoh pergerakan perempuan di Maroko ada Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer, di India ada Rifat Hasan, di Jepang ada Michiko, di Afrika ada Amina Wadud Muhsin di Indonesia saat ini Musdah Mulia, Wardah Hafidz, Nurul Agustina, Ratna Megawati. Di dunia Arab sendiri, di Mesir ada Huda Sya'rawi, Zainab Fawwaz, Nawwal El Saadawi, May Ziyadah, Isha Taimuriyah sementara di Turki ada Fatme Aliye Turki (Siti Muri'ah, 2007, hlm. 19).

Kehadiran perempuan sebagai pemimpin publik telah banyak dibuktikan oleh sejarah. Suksesi perempuan tersebut adalah bukti kualitas diri yang ada pada perempuan tersebut. Disinilah kita melihat bahwa ada lembaga yang berkualitas dalam memasok sumberdaya perempuan yang berkualitas yakni organisasi perempuan. Mereka berperan menjadi salah satu kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial.

Dalam konteks nasional, organisasi perempuan di Indonesia meningkatkan posisi tawarnya dan melahirkan sumberdaya perempuan yang berkualitas. Organisasi perempuan Islam di Indonesia sudah memainkan peran politiknya, walaupun pada awal pembentukannya Organisasi Perempuan bagian dari "Organisasi Pria". Dibentuknya Organisasi Perempuan ini berawal dari munculnya kesadaran organisasi induk, bahwa ada bidang-bidang khusus perempuan yang tidak bisa ditangani dengan baik contoh Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama bagian dari Nahdlatul Ulama, Aisyiyah bagian dari Muhammadiyah dan Muslimat al-Washliyah bagian dari al-Washliyah.

Aisyiyah sebagai organisasi Islam tertua merupakan Organisasi Reformis Islam yang berupaya untuk memberantas segala hal yang dianggap perbuatan khurafat dan bid'ah syari'ah dan berusaha pula meluaskan pengetahuan dan memperdalam kesadaran keislaman dikalangan muslimah. Aisyiyah berdiri di Jogjakarta 19 Mei 1917 (27 Rajab 1335 H) dan didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (AD/ART Aisyiyah, 2005, hlm. 9).

Kiprah Aisyiyah tidak hanya seputar masalah memurnikan pemahaman keislaman saja tapi juga kebangkitan perempuan secara umum tercatat bahwa Aisyiyah adalah salah satu dari tujuh Organisasi Perempuan yang berinisiatif untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia, 20-24 Juli 1935 di Jakarta.

Adapun Muslimat NU yang merupakan badan otonom dari Nahdatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1946 (26 Rabi'ul Akhir 1365 H) di Purwokerto, Jawa Tengah (AD/ART Muslimat NU, 2006, hlm. 6). Muslimat NU juga mencatat peran strategis dari awal pembentukannya dan juga mengangkat masalah perkawinan anak-anak dibawah umur dan juga dalam mengatasi masalah perkawinan sehingga akhirnya mendorong pemerintah memnbentuk BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

Sekalipun perempuan telah memberikan bukti nyata suksesi kepemimpinan mereka yang diabadikan dalam sejarah, sampai sekarang masih banyak terjadi pertentangan pendapat tentang jabatan-jabatan karir yang digeluti perempuan dan kepemimpinan mereka di sektor publik. Karena sektor publik berarti harus mengeluarkan perempuan dari rumah tangganya dan menuntut mereka untuk tampil di depan khalayak. Sementara itu organisasi perempuan seperti Muslimat NU ini terus melaksanakan program mereka dengan kekuatan basis masyarakat perempuan. Meninjau peran aktif muslimat NU ini, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh dalam Tesis yang berjudul **“Pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat**

## **Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Periode 2011-2016 Tentang Kepemimpinan Perempuan”.**

### **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas penelitian ini kiranya dapat dirumuskan ke dalam permasalahan- permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengurus pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan
2. Apa alasan (argumentasi) pandangan pengurus pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi mengenai pandangan pengurus pimpinan wilayah Muslimat NU periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan di dalam sektor publik dan pemerintahan, beserta argumentasi yang melandasi pandangan itu.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU SUMSEL periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan.

- b. Untuk mengetahui alasan (argumentasi) yang melatar belakangi pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU SUMSEL periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara terioritis dapat memberikan kontribusi yang positif yang dapat membuka wawasan atau pandangan dan bermanfaat bagi insan akademis maupun masyarakat umum dalam memahami dan mengembangkan kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan.
- b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi Organisasi Perempuan di Sumatera Selatan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan.

## **D. Definisi Operasional**

Agar tujuan tesis ini dapat dipahami secara jelas maka penulis merumuskan definisi operasional bahwa yang dimaksud dengan kata pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pan, dang, an satu hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, penglihatan yang tetap dan agak lama) pendapat, pengetahuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm. 821). Kepemimpinan adalah berasal dari kata “pimpin” yang berarti merumuskan, menunjukkan jalan dan membimbing (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, hlm. 874).

Dari sisi bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut juga penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua dan sebagainya.

Istilah pemimpin dan kepemimpinan pada mulanya berasal dari kata yang sama yakni “Pimpin” dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader* (Veithzal Rivai, Bahtiar, Boy Rafli Amar, 2013 hlm 1). Namun kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu disebut khalifah, imamah dan imaroh. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kepemimpinan dalam pemerintahan dan kenegaraan.

Beberapa pengertian pemimpin adalah :

- a. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
- b. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu memimpin (Veithzal Rivai, Bahtiar, Boy Rafli Amar, 2013 hlm 2)
- c. Definisi yang lain pemimpin ialah seseorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, refolusi atau cara – cara lainnya (Effendi, 1997, hlm 1)

Dari beberapa definisi pemimpin adalah seseorang/pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran tertentu. Dengan demikian pemimpin merupakan cirri bawaan secara psikologis yang dibawa sejak lahir khusus pada dirinya dan tidak dimiliki orang lain. Sehingga ia disebut sebagai “*born leader*” ( dilahirkan sebagai pemimpin).

Kata kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata “*leadership*” dalam bahasa Inggris pengertian kepemimpinan menurut Soekanto, 1990, hlm 318 adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikutnya) kepemimpinan juga diartikan “suatu kegiatan dalam membimbing suatu

kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu yaitu tujuan tertentu.

Demikian juga menurut Ahmadi, 1993, hlm 123, mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Dari pengertian kepemimpinan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu.

Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah amanah yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena dengan kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT, bagaimana kita menjalankan roda kepemimpinan tersebut.

Sedangkan kata perempuan atau wanita sama-sama berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata “perem dan puan” , “perem” artinya menyimpan dan “puan” artinya susu. Sedangkan kata wanita terdiri dari dua kata “wani” dan “ta”, “wani” artinya berani dan “ta” artinya mengatur (Nahati, 2000, hlm. 13).

Jadi pengertian perempuan atau wanita adalah seorang yang menyimpan susu dan dia berarti mengatur atau menata segala sesuatu yang berhubungan dengan kodrat manusia.

Sedangkan pengertian perempuan secara umum adalah sebagai berikut: perempuan yang disebut juga wanita, ibu, istri, putri adalah sejenis makhluk dan bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuh laki-laki (Chalil, 1986, hlm. 11).

Pendapat di atas, juga menjelaskan perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki dari segi kodratnya berbeda.

Dalam bahasa Arab perempuan disebut juga dengan sebutan “*al-mar’ah*” (المرأة) ) jamaknya dari kata *an-nisa’* (النساء) yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa (Ensiklopedi Islam, 1977, hlm. 186).

Pengertian perempuan dalam Islam dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah satu jenis manusia ciptaan Allah SWT, walaupun memiliki perbedaan secara kodrat, namun di sisi Allah SWT yang berjenis laki-laki dalam hal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai makhluk manusia terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Sehingga kepemimpinan yang mempunyai fungsi dan tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan perempuan untuk memimpin. Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan / seni yang dilakukan oleh perempuan untuk mempengaruhi orang lain dan melakukan langkah-langkah guna mencapai tujuan bersama.

Menurut pandangan pengurus pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama tentang kepemimpinan perempuan adalah boleh perempuan menjadi pemimpin, baik di sektor publik maupun pemerintahan, jika perempuan tersebut memiliki kepemimpinan sesuai dengan profesi yang mereka miliki atau yang mereka peroleh, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat, khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban menurut ajaran Islam, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Filosofi Jawa bahkan menyebutkan perempuan sebagai “*konco wingking*” yang tugasnya hanya seputar tiga m, yaitu macak, masak dan

manak. Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

Pengertian sektor publik yaitu kehidupan manusia yang berkaitan dengan masyarakat umum yaitu kehidupan manusia yang berkenaan dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama (Mosse, 1996, hlm. 106). Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, Negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis / perekonomian (perusahaan dan perbankan) (Umar, 2003, hlm. 248).

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini mengkonsentrasikan penyelidikan mengenai alasan dan pandangan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama (NU) khususnya Muslimat NU di provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 mengenai kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada tulisan penelitian yang khusus membahas mengenai pandangan organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan, walaupun diakui adanya beberapa literatur penelitian mengenai Kepemimpinan Perempuan.

Diantara para peneliti ada yang menulis antara lain, Nasaruddin Umar, dalam Disertasinya cetakan ke II, Agustus 2001 berjudul "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*", penulis mengungkapkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan melahirkan seperangkat konsep budaya, perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas namun efek yang ditimbulkan akibat perbedaan itu yang menimbulkan perdebatan. Kondisi dan struktural sosial ekonomi sebuah masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, dalam kehidupan sosial tidaklah mutlak. Dalam Disertasi Nasaruddin Umar ini mengangkat mengenai kesetaraan gender dalam tinjauan historis, teologis dan antropologis.

Muhammad Busyto Karim, Tesis tahun 1999, dengan judul “*Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)*”. Pada Mukhtamar NU XXX tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan gender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan, hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kalangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan. Perempuan diperbolehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan jabatan sebagai Kepala Negara atau Pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarki di antara masing-masing kelompok. (<http://malutpost.com> berita).

Munculnya keputusan Mukhtamar NU XXX karena adanya tekanan dari lembaga perempuan NU, dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999 munculnya isu presiden perempuan. KH. Hasyim Muzadi (Mantan PB. NU), dalam tulisannya “*Pemimpin Perempuan Selain Kepala Negara Diperbolehkan*”. Hasyim Muzadi menilai, pro dan kontra di kalangan umat Islam terhadap keberadaan pemimpin perempuan hanya sebatas kepala negara. Selain itu, perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin atau pejabat publik, seperti Menteri, Gubernur dan Bupati.

Dalam *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal For Shariah and Society Studies*, Nurani vol 4, nomor 1, Juni 2004 melalui tulisan Muhammad Burhan, tentang *Rekonstruksi Pemahaman Teks dalam Islam tentang Perempuan*, dalam tulisannya menjelaskan ada tiga masalah yang berkaitan dengan pemahaman teks akibat bias gender dalam Islam

1. Kejadian perempuan.
2. Peran politik perempuan.
3. Nilai dan kesaksian perempuan.

Kesimpulan dari tulisan Muhammad Burhan, diperlukan adanya kegiatan penafsiran kembali bahkan rekonstruksi dan reformasi pemahaman teks keagamaan, Al-Qur'an dan Hadits perlu dipahami secara kontekstual dengan melihat kondisi sosiologis dan historis sehingga didapatkan pemahaman yang tepat antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Moh. Anwar Ramli dan Rahimin Affandi Abdul Rahim pada artikelnya dengan judul *Kepemimpinan Perempuan menurut Perspektif Islam Satu Sorotan* dalam artikel ini menjelaskan kepemimpinan perempuan, isu perempuan, golongan liberalis-kontekstual, golongan literalis- tekstual.

Artikel penulis Muhammad Abduh Tausikal "*Kepemimpinan Wanita dalam Organisasi Politik Menurut Tinjauan Hukum Islam*". Isi tulisan mengenai Apakah wanita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin organisasi politik, ditinjau dari faktor sifat psikisnya, psikisnya dan peran kewanitaannya. Dalam situasi umum, apakah potensi wanita dapat menyamai atau melebihi laki-laki dalam memimpin organisasi politik?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam buku berjudul "*Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*" menuliskan mengenai laki-laki dan perempuan dalam realisasi sosial dan relasi negara. Intinya Islam sangat memberikan peluang kepada siapa saja dengan segala kualitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin (Dr. Meutia Hatta Swasono, 2004, hlm. 20).

Dari paparan peneliti terhadap studi sebelumnya di atas, ada perbedaan antara penelitian ini dengan para peneliti sebelumnya, yakni mencoba memaparkan secara jelas bagaimana pandangan Pengurus Pimpinan Muslimat NU Sumsel terhadap kepemimpinan perempuan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya pada sebatas penelusuran terhadap al-Qur'an dan Sunnah dalam pembolehan kepemimpinan perempuan ini. Dengan senantiasa merujuk pada hasil penelitian terhadap konteks

sumber agama (al-Qur'an dan hadits) penelitian dapat menghasilkan sebuah khazanah baru dalam memahami kepemimpinan perempuan dan legitimasi yang diberikan kepada mereka melalui pandangan para perempuan itu sendiri yang dalam hal ini diwakilkan oleh para Pengurus Pimpinan Muslimat NU Sumsel sebagai salah satu Organisasi Keperempuanan terbesar di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Teori kepemimpinan perempuan membicarakan bagaimana pandangan pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdhatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan. Teori ini membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Menurut Wursanto(2004) menyatakan ada dua teori kepemimpinan yaitu teori sifat (*traits teori*) dan teori kelebihan.

1. Teori sifat adalah seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat yang positif, misalnya : adil, jujur, suka melindungi, komunikatif, penuh percaya pada diri sendiri, mempunyai daya tarik, penuh inisiatif, energik dan kreatif, motivasi, memiliki emosi yang stabil, menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki sifat – sifat yang positif dan memiliki integritas yang tinggi.
2. Teori kelebihan adalah seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup dua hal, *pertama*, kelebihan ratio, kelebihan ilmu pengetahuan, *kedua* , kelebihan rohaniah, harus mampu menunjukkan keluhuran budi pekerti (akhlak) atau memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kecerdasan (ilmu pengetahuan) dan memiliki keimanan dan ketaqwaan.

Selain teori diatas penulis juga menggunakan teori organisasi yang dinyatakan oleh Max Weber dengan mendemonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi. Max Weber membedakan suatu kelompok kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya, baik yang dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya (Miftah Thoha, 1988, hlm. 110). Dengan demikian penulis juga memakai teori organisasi mengenai pandangan dan alasan pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdhatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 tentang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan.

Pengertian yang dikemukakan oleh Max Weber ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi di dalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauannya sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan – aturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang dapat membedakan suatu organisasi dengan kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses integrasi di antara orang-orang yang bekerjasama di dalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, maka Muslimat NU menjadi organisasi perempuan salah satu jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU), yang bersifat otonom, keagamaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Yang bertujuan mewujudkan wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT sedangkan landasannya adalah Pancasila, al-Qur'an dan Hadist.

Kepemimpinan berkaitan erat dengan *kemampuan* seseorang untuk memimpin. Namun demikian kata kepemimpinan mempunyai banyak definisi yang ditafsirkan oleh para ahli sesuai dengan perspektif-perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Di antara definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagaimana berikut (Yukl Gary, 1998, hlm. 2).

1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan untuk situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.
2. Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.
3. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasikan kearah pencapaian tujuan.
4. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.
5. Kepimpinan adalah perilaku dari seseorang yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.
6. Kepemimpinan adalah seni kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi

supaya perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin organisasi (Suninda, 1988, hlm. 4).

Dari beberapa definisi-definisi kepemimpinan diatas, dapat diasumsikan bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja oleh seorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktifitas-aktifitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Secara praktis, kepemimpinan dapat dikatakan sebagai suatu seni kemampuan untuk memobalisasi orang-orang (bawahan dan pihak lain) agar supaya perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan untuk mencapai aspirasi dan tujuan organisasi.

Kepemimpinan terdiri dari dua hal yakni: proses dan property. Proses dari kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh secara tidak memaksa, untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dari para anggota untuk pencapaian tujuan organisasi. Adapun property dimaksudkan bahwa kepemimpinan memiliki sekelompok kualitas dan karakteristik dari atribut-atribut yang dirasakan mampu mempengaruhi keberhasilan proses memimpin.

Secara implisit, pemahaman atribut kepemimpinan ini adalah terkait dengan individu yang memimpin yang dikenal dengan istilah pemimpin. Dimana perkataan pemimpin atau leader pun mempunyai macam-macam pengertian, diantaranya:

1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
2. Pemimpin adalah sebagai seorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi atau cara-cara lain (Effendi, 1992, hlm. 1).

Dari kedua definisi dapat dipahami pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Di dalam Islam kita mengenal pemimpin disebut juga dengan imam atau khalifah.

## **G. Metodologi Penelitian**

Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif secara induktif atau sering pula disebut dengan pendekatan kualitatif.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### *1. Jenis Data*

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif-kuantitatif. Penelitian merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif, menurut Bogdan Taylor, data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan dalam suasana wajar dan alamiah, serta dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan harmonis. Berbagai konsep dan teori yang dikembangkan berdasarkan kondisi atau kenyataan di lapangan (Moeleong, 2001, hlm. 3) menurut (Sutopo, 1996, hlm. 15) mengatakan bahwa bentuk penelitian kualitatif akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh dengan nuansa, yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.

Adapun penelitian deskriptif menurut (Arikunto, 1998, hlm. 245) pada umumnya penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak diperlukan rumusan hipotesis. Penelitian kualitatif

yang digunakan bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah hasil pemahaman terhadap data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu.

Atas dasar itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menggali sejauh mana gagasan/ pendapat dan pemikiran secara lebih lengkap, cermat dan mendalam tentang objek penelitian yang dalam hal ini tentang bagaimana pandangan pengurus pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016.

## 2. *Sumber Data*

Sumber data merupakan persoalan tentang dimana data diperoleh sehingga ia menggambarkan tentang kejelasan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara teoritis. Untuk mendukung realibilitas penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer (data pokok pada penelitian ini adalah data yang langsung dari responden hasil kuisioner dan wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016 jumlah seluruh pengurus sebanyak 48 orang pengurus. Terdiri dari ketua 1 orang, ketua-ketua sebanyak 6 orang, sekretaris 1 orang, sekretaris-sekretaris sebanyak 3 orang, bendahara 1 orang, bendahara I 1 orang, dan bidang-bidang sebanyak 35 orang.

Adapun responden yang dibagikan kuisioner dan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang terdiri dari: Ketua (Dra. Hj. Failasufah), Ketua I (Dra.Hj.Choiriyah Nasir, M.Hum), Ketua II (Dra.Hj.Badrul Huda, BA), Ketua III (Dra.Hj.Rusydah Gasim, M.HI), Ketua IV (Dra.Hj.Sukarmawati), Ketua V

(Dra.Hj.Nilawati), Sekretaris (Ir. Lisdanita), Sekretaris I (Dra.Hj.Nurmala Haq), Sekretaris II (Dra. Hj. Fatimah Nurjanah), Sekretaris III (Eiza Mauludiah, Amd), Bendahara (Hj. Asnizar), Bendahara I (Hj. Samsini Isnin,S.Pd) dan ketua-ketua bidang:

a. Bidang Organisasi dan Anggota (Hj. Rika Diana, SH, M. Hum), b. Bidang Pendidikan dan Kadarisasi (Dra. Hj. Dewi Zainuri, M.PDI), c. Bidang Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Dra.Ermawati), d. Bidang Kesehatan (Hj. Hasnawati Mal'an), e. Bidang Dakwah (Hj. Komalasari, S.PdI), f. Bidang Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis (Hj. Mahmudah Azizah), g. Bidang Tenaga Kerja (Dra. Hj. Bisqoyah).

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari majalah, makalah, buku-buku, jurnal ilmiah dan informasi-informasi lainnya maupun penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk menentukan sumber-sumber data tersebut dilakukan teknis historis, yaitu heuristik dan verifikasi. Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan data yang diteliti (Suryata, 1997,, hlm. 65). Untuk mencari data yang terkait dengan data yang diteliti mengenai pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016 mengenai kepemimpinan perempuan, maka penulis melakukan pencarian data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta melakukan wawancara dengan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016.

Setelah sumber berbagai kategorinya itu terkumpul, maka tahap selanjutnya ini adalah verifikasi atau kritik sumber dalam rangka untuk memperoleh keabsahan sumber data. Dalam hal ini dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (autensitas) yang ditelusuri melalui kritik intern (Abdurrahman, 2007, hlm. 68).

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran dari suatu sumber sejarah, sumber ini asli atau tidak. Kritik ekstern yang peneliti lakukan adalah dengan melihat asal sumber, penulis sumber, dan pelaku sejarah. Penulis meneliti sumber tersebut, baik buku, dokumen maupun arsip tertulis dan diterbitkan oleh pihak-pihak yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk pemilihan responden, peneliti mendatangi langsung informan yang dapat memberi keterangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk mencapai nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah, apakah sumber tersebut dapat memberi informasi yang dapat dipercaya. Sedangkan hasil wawancara dikritik dengan cara membandingkan hasil wawancara antara informan, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.

#### *Lokasi Penelitian*

Penelitian tesis ini dilakukan pada lingkup Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016 yang meliputi sejarah berdirinya organisasi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016, yang bertempat di Jalan Mayor Salim Batubara Lorong Nurul Huda No. 1988 Palembang 31126 Palembang Indonesia Telp. / Fax. (62) (0711) 366979.

#### *Responden*

Pemilihan responden dalam penelitian ini di fokuskan pada representasi atas masalah yang di teliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa Responden (informan) adalah sebagai berikut ketua umum, pengurus harian sebanyak 13 orang, pengurus bidang-bidang sebanyak 7 orang, jadi jumlah seluruh responden sebanyak 20 orang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Guna untuk memperoleh data yang baik dan akurat, maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang bersumber dari dokumen maupun buku-buku laporan, Koran, majalah, dan buku-buku referensi, (Surakhmad, 1994, hlm. 66) dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan berupa tulisan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dengan cara membaca, mencatat dan mengkategorikan data.

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki (Arifin, 1988, hlm. 49) adapun jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi (*Participant Observation*) atau pengamatan terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan ketentuan tidak mengganggu natural setting atau keaslian dan kewajaran situasi lapangan (Ustman dan Akbar, 2004, hlm. 56). Dalam studi keislaman, jika suatu studi berangkat dari fenomena, perilaku empirik sebagai konsekuensi logis pemahaman orang muslim terhadap kepercayaan normatif - dogmatis, maka antara lain instrument yang

tepat digunakan adalah participant observation dengan pendekatan naturalistik-kualitatif (Abdullah dan Karim, 1989, hlm 5).

#### c. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melakukan kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Dalam wawancara terbuka meskipun sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontanitas tidak menutup kemungkinan sesuai dengan konteks dan pembicaraan yang dilakukannya. Sedangkan di dalam wawancara tertutup, peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat dengan format-format tertentu secara ketat (Maryeni, 2008, hlm. 70). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara terbuka, di mana wawancara ini dilakukan tanpa suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata serta tata urutan yang tetap, yang harus dipatuhi meskipun tidak memiliki aturan dan cara bertanya tertentu.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Annur, 2008, hlm. 113). Sebagai penelitian lapangan, dan data yang diperoleh juga berupa berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dalam melakukan pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif<sup>1</sup>. Deskriptif analisis dipergunakan untuk

---

<sup>1</sup> Adalah analisis terhadap data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati, dilaksanakan dalam suasana wajar dan alamiah dalam berbagai konsep dan teori yang dikembangkan berdasarkan kondisi atau kenyataan di lapangan, pada umumnya

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

Analisi terhadap data yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, dilaksanakan dalam suasana wajar dan alamia dalam berbagai konsep dan teori yang dikembangkan berdasarkan kondisi sosial atau kenyataan dilapangan, pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis sehingga analisisnya bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau phenomena tertentu secara deduktif (Husaini Usman, 2004, hlm. 81-91).

Untuk menganalisis mengenai data faktual dan akurat dari fakta – fakta yang diselidiki dan data yang sudah terkumpul digunakan analisa deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pandangan pimpinan wilayah Muslimat Nahdatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011- 2016 mengenai kepemimpinan perempuan dalam sector publik dan pemerintahan.

Adapun teknik analisis data meliputi tahap-tahap :

#### 1. Reduksi data (pengkodean data)

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menghilangkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik.

#### 2. Penyajian data (pentabelan)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

merupakan penelitian non- hipotesis, sehingga analisisnya bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu secara deduktif. Lihat Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta, 2004: 81-91).

### 3. Verifikasi (menarik kesimpulan)

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan atau peninjauan kembali data yang ada. Dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas setelah itu baru ditarik kesimpulan.

Setelah analisis data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah laporan penelitian dalam kajian historis tahap ini istilah ini dikenal dengan istilah historiografi. Historiografi adalah langkah akhir yang digunakan, yaitu menuliskan hasilnya (Panji, 2008, hlm. 59). Tahap ini adalah langkah final dalam penelitian dari rangkaian-rangkaian yang dilakukan sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa dan sebab akibat serta kaligasinya (Abdurrahman, 2007, hlm. 69).

### 5. Pendekatan Penelitian

Untuk memperkuat analisa dalam penelitian ini maka digunakan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan kesejarahan (*historis approach*) pendekatan ini merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, hlm. 32).

Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengkaji ulang peninggalan masa lampau mengenai sejarah berdirinya Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sum-Sel.

Kedua, pendekatan sosiologis, bila pendekatan ini dipergunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa lalu, tentu di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Konstruksi sejarah dengan pendekatan sosiologis ini dapat pula dikatakan sebagai sejarah sosial, dan sebagainya (Abdurrahman, 2007, hlm.23). Pendekatan ini dimaksudkan bagaimana proses awal berdirinya Muslimat NU

dan peranannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai organisasi perempuan di Indonesia.

Ketiga, pendekatan fenomenologis yakni usaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang, biasanya dalam situasi tertentu (Moleong, 2002, hlm. 9). Dalam konteks penelitian ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa, sehingga dengan mudah dapat memahami dan mengerti mengenai pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumsel periode 2011-2016 mengenai kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dan pemerintahan. Dengan pendekatan penelitian ini sumbangsih perempuan Nahdlatul Ulama mengenai perkembangan politik perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik dan kontribusinya bagi kemajuan perempuan di Indonesia.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi lima bab. Satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pembahasan dalam proposal tesis ini mempergunakan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Peneliti, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab Ini Menjadi Acuan Bagi Bab-Bab Selanjutnya.

**Bab II** Tinjauan Secara Umum Tentang Kepemimpinan Perempuan, Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan, Teori dan Tipologi Kepemimpinan, Sifat – Sifat Pemimpin, Kepemimpinan Perempuan menurut Ajaran Islam.

**Bab III** Berisi Profil Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan, Gambaran umum Muslimat NU di Indonesia, Sejarah Berdirinya

Muslimat NUdi Indonesia, Sejarah Berdirinya Muslimat NUDi Sumatera Selatan, Visi dan Misi / Tujuan Muslimat Nahdlatul Ulama, Lambang/ Mars Muslimat NU, Kepemimpinan Muslimat NU, dan Program Kerja Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan.

**Bab IV** Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan dan Argumentasi Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2016, Pandangan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan dan Sektor Publik, Argumentasi (alasan) Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan dan Sektor Publik

**Bab V** Penutup berisi simpulandan saran serta rekomendasi atas kajian tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN**

### **PEREMPUAN**

#### **1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan**

Dilihat dari segi bahasa Indonesia, “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, penuntun, raja, tua-tua dan sebagainya. Istilah pemimpin dan kepemimpinan pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama “pimpin” yang berarti merumuskan, menunjukkan jalan dan membimbing (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 874).

Dalam Bahasa Inggris, pemimpin disebut dengan “*leader*”, dalam Bahasa Arab **أَمْرَاءُ** pemimpin berarti penguasa dan pemimpin rakyat (Kamus Arab Indonesia, 2010, hlm. 48).

##### **a. Pemimpin**

Perkataan pemimpin (*leader*) mempunyai macam-macam pengertian. Beberapa definisi dapat disebutkan di bawah ini :

1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahan ke arah pencapaian tujuan tertentu.

2. Pemimpin ialah sebagai seorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi atau cara-cara lain (Effendi, 1992, hlm.1).

3. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartini Kartono, 1994, hlm.45).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan itu dapat dipahami sebagai berikut: Seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Di dalam Islam, seorang pemimpin disebut Imam. Menurut bahasa adalah pemimpin yakni pribadi yang memiliki beberapa pengikut, terlepas dari kenyataannya apakah dia itu salah atau tidak. Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata ini dalam kedua pengertian di atas (Muthahari, 1991, hlm.22).

Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata Imam juga bisa digunakan untuk al-Qur'an karena al-Qur'an adalah imam (pedoman) bagi umat Islam. Demikian pula bisa digunakan Rasulullah SAW, karena beliau adalah pemimpin para pemimpin, yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin (as-Sulus, 1997, hlm.16).

Dengan demikian, kata imam yang bermaksud “pemimpin” dalam arti luas dan bersifat umum bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja, dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata imam yang bermaksud “pemimpin” yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin “spiritual” bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi oleh

tuntunan keadaan. Sebab dalam kenyataannya, upaya-upaya untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran agama Islam tidak hanya menyangkut pribadi, tetapi juga menyangkut kehidupan kolektif, urusannya bisa berdimensi politis (Pulungan, 1995, hlm.60-61).

Istilah Khalifah dan Amir dalam konteks bahasa Indonesia disebut pemimpin yang selalu berkonotasi pemimpin formal. Apabila kita merujuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 30), isi ayat al-Qur'an (Aunur Rahim dkk, 2001) :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami senantiasanya bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dahulu orang menyatakan bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan secara psikologis yang dibawa sejak lahir, khusus ada pada dirinya dan tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga dia disebut sebagai “*born leader*” (dilahirkan sebagai pemimpin). Karena itu, sifat-sifat kepemimpinannya tidak perlu diajarkan kepada dirinya. Juga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Pendapat demikian itu ada mengandung kebenaran. Akan tetapi, pendapat itu pada zaman modern sekarang ini sudah banyak ketinggalan, sebab banyak usaha bersama yang beroperasi secara kooperatif dan mengarah pada pencapaian satu tujuan tertentu, juga berada dalam macam-macam kondisi sosial, yang membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan, dan pemimpin-pemimpin sedemikian ini harus disiapkan, dilatih dan dibentuk secara berencana dan sistematis. Pada mereka itu, diberikan latihan-latihan khusus untuk

membiasakan diri bertingkah laku menurut pola-pola tertentu, agar mereka mampu melakukan tugas-tugas kepemimpinan dan sanggup membawa kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya kepada obyek yang ingin dicapai.

#### b. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan. Dengan mempelajari berbagai pengertian tentang kepemimpinan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan bagi mereka yang berminat meraih peran kepemimpinan dalam masyarakat. Sedang manfaat yang lain, orang dapat mengerti segala masalah yang dihadapi oleh orang yang sedang berperan sebagai pemimpin dengan seluruh proses pasang naik dan surutnya (Sondang, 1994, hlm. 101).

Beberapa definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Menurut (Soekanto, 1990, hlm.318), kepemimpinan (*leadership*) adalah “kemampuan seseorang (yaitu pimpinan atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikutnya).Kepemimpinan juga diartikan “suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama.

Mengutip pendapat Prof. Kimbal Young yang dikutip Kartono dalam bukunya *Pemimpin dan Kepemimpinan*, menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi disadari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang dapat bagi situasi khusus.

Menurut Abu Ahmadi (1999, hlm.123), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Menurut (Jacobs and Jacques, 1990, hlm.74), kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerja sama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Ordway Tead memberikan rumusan *“leadership is the activity influencing people to cooperate some good which they come to find desirable”* (kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan) (Wursanto, 2004, hlm.101).

Ada 350 definisi kepemimpinan yang secara umum dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna mencapai tujuan bersama (Erman Suradinata, 2006, hlm.17). Kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan yang mempunyai fungsi dan tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekedar menduduki posisi (jabatan tertentu saja), tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kepemimpinan perempuan juga dapat diartikan suatu ilmu atau seni yang dilakukan oleh perempuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah *skill* (kemampuan) dan kesiapan dan seni yang dimiliki oleh seseorang bisa perempuan, bisa laki-laki untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan bersama.

## **2. Teori dan Tipologi Kepemimpinan**

### **2.1 Teori Kepemimpinan**

Banyak study yang dilakukan orang mengenai kepemimpinan, dan hasilnya berupa macam-macam teori tentang kepemimpinan, teori-teori yang dihasilkan menunjukkan perbedaan dalam :

- a. Pendapat Dan Uraianannya
- b. Tipologinya
- c. Interpretasi yang diberikan
- d. Kesimpulan yang ditarik. (Sondang P. Siagian, 1994, hlm. 27)

Setiap teori kepemimpinan mempunyai segi penekanannya sendiri, dipandang dari 1 aspek tertentu dan para penganutnya, mereka berkeyakinan bahwa teori itulah yang paling benar dan tepat.

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Wursanto (2004) menyatakan ada enam teori kepemimpinan yaitu teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori karismatik, teori bakat, dan teori sosial. Menurut Miftah Thoha mengelompokkannya kedalam teori sifat, teori kelompok, teori situasional, model kepemimpinan kontijensi, dan teori jalan kecil-tujuan (*path goal theory*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori kepemimpinan, maka diuraikan beberapa teori kepemimpinan yaitu sebagai berikut : (Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, 2013, hlm. 6)

#### 1. Teori Kelebihan

Seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup dua hal, *pertama*, kelebihan ratio, kelebihan ilmu pengetahuan, *kedua*, kelebihan rohaniah, harus mampu menunjukkan keluhuran budi pekerti (akhlak) atau memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kecerdasan (ilmu pengetahuan) dan memiliki keimanan dan ketaqwaan (Wursanto, 2003).

## 2. Teori Sifat

Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat yang positif, misalnya : adil, jujur, suka melindungi, komunikatif, penuh percaya pada diri sendiri, mempunyai daya tarik, penuh inisiatif, energik dan kreatif, motivasi, memiliki emosi yang stabil, menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang positif dan memiliki integritas yang tinggi (Adam Ibrahim Indrawijaya, 1983).

## 3. Teori Keturunan

Yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena keturunan atau warisan. Karena orang tuanya seorang pemimpin, maka anaknya otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan orang tuanya. Dengan ini seolah-olah seseorang menjadi pemimpin karena ditakdirkan (Wursanto, 2003).

## 4. Teori Karismatik

Yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai karisma (pengaruh) yang sangat besar. Karisma itu diperoleh dari kekuatan yang maha besar. Artinya kepemimpinan yang karismatik yang memiliki kekuatan gaib (supranatural power) yang memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang besar (Wursanto, 2003).

## 5. Teori Bakat

Yang disebut juga teori Ekologis, menyatakan bahwa pemimpin itu lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena bakat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu seseorang yang memiliki bakat kepemimpinan harus diberi kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan (Wursanto, 2003). Teori ini artinya seseorang yang akan menjadi

pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan lingkungan yaitu faktor pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasikan dengan baik. Menurut teori ini juga seseorang akan menjadi pemimpin yang baik jika ia dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat dikembangkan.

#### 6. Teori sosial

Beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin, setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin jika dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun melalui praktik atau pengalaman (Wursanto, 2000). Teori ini menentang pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.

#### 7. Teori Kelompok

Beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa mencapai tujuan. Tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Teori kelompok ini didasarkan perkembangannya pada psikologi sosial (Miftah Thoha, 2003). Seseorang bisa menjadi pemimpin dengan jalan dipilih oleh pengikutnya contohnya pimpinan organisasi dan pemimpin Negara (Presiden) karena dipilih oleh rakyat.

## 8. Teori Situasional

Menyatakan bahwa beberapa variabel-situasional mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya termasuk pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya. Beberapa variabel situasional diidentifikasi, tetapi tidak semua ditarik oleh situasioanl ini (Miftah Thoha, 2003). Efektivitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan "membaca" situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu.

## 9. Teori Kepemimpinan Kontijensi

Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Yakni hubungan pimpinan dengan anggota, derajat dan struktur tugas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal (Miftah Thoha, 2003).

Dari teori-teori ini untuk menunjukkan dan menganalisis pengaruh perilaku pemimpin terhadap yang dipimpin. Apakah pemimpin itu dapat diterima atau tidak, dan juga untuk tercapai tidaknya suatu tujuan sehingga tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. Tentunya secara harmonis dan seimbang.

### 2.2 Tipologi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Terdapat beberapa gaya/tipe kepemimpinan :

#### 1. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pegawai – pegawai yang dapat dipercaya.

Pemimpin kharismatik lazimnya pada saat-saat kritis yang memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan drastis. Bentuk lahiriah proses kepemimpinannya sering dianggap otoriter, karenanya walaupun dapat saja ia seorang yang berjiwa demokratis. Hal tersebut hanya merupakan akibat saja dari suatu masalah yang dihadapi. Contoh kepemimpinan kharismatik : Jengis Khan, Hittler, Jhon F. Kenedy, Soekarno, dan Margaret Teacher.

## 2. Tipe Paternalistik

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebabakan dengan sifat-sifat antara lain, sebagai berikut :

- a. Dia menganggap bawahannya sebagai orang-orang yang belum dewasa dan oleh karenanya selalu harus dituntun, dibimbing secara langsung, diajar dan dinasehati.
- b. Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dan mengambil keputusan sendiri.
- c. Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berimajinasi dan berkreatifitas.
- d. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

## 3. Tipe Militeristik

Tipe ini sok kemiliter-militeran, hanya gaya luar saja yang mencontohkan gaya militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini

mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristik antara lain :

- a. Lebih banyak menggunakan system perintah / komando terhadap bawahannya sangat otoriter, kurang bijaksana.
- b. Menghendaki kepetuhan mutlak dari bawahannya
- c. Menuntut adanya disiplin yang keras.

#### 4. Tipe Otokrasi

Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi, pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal. Setiap perintah adalah kebijaksanaan dan keputusan selalu diambil tanpa konsultasi dengan bawahannya, selalu ingin berkuasa, *absolute*, tunggal dan merajai keadaan. Pemimpin mau bersikap baik bila bawahannya mau patuh secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri-sendiri yang paling tidak disukai adalah tipe pegawai yang setia.

#### 5. Tipe Lars Sez-Faire

Sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya untuk berbuat semuanya. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya, dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya.

Ringkasan pemimpin ini pada hakikatnya bukan seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja demikian sama sekali tidak terpinpin, terkontrol dan tidak disiplin.

#### 6. Tipe Popularistis

Peter Worley mengemukakan kepemimpinan popularistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat

misalnya Soekarno tipe kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Dia mengutamakan kehidupan Nasionalisme dan menekankan kesatuan nasional dan sikap berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan serta penguasaan kekuasaan asing.

#### 7. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kekuatan tipe ini bukan terletak pada *person*(individu) pemimpin akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif setiap warga kelompok.

Tradisi demokratis secara sempit oleh Harman diartikan suatu proses sosial yang menunjukkan suatu kelompok sebagai keseluruhannya dalam mengatur dirinya sendiri, tidak tunduk kepada kekuasaan diluarnya dan setiap anggota diwakili secara sama dalam pembuatan keputusan-keputusan bersama. Bila terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipertemukan maka keputusan ditentukan oleh kelompok mayoritas dan sisanya diharapkan dapat menerima keputusan tersebut (Kartono, 1994, hlm. 70 – 72).

Gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe-tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan yang merupakan Das Solen tentu saja gaya kepemimpinan demokratis. Tetapi Das Sain menunjukkan bahwa kepemimpinan yang cenderung digunakan adalah otoleratik karena dalam psikologi seorang pemimpin bahwa ia merasa mempunyai *power*, orang nomor satu diajarannya, merasa punya wibawa dan sebagainya. Keadaan

seperti ini akan membentuk seseorang menjadi otokrat. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah disatu sisi seorang pemimpin menggunakan gaya demokratik disisi lain tampak gaya otokratiknya.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh beberapa hal antara lain:

a. Sikap dan Hubungan Kemanusiaan

Seorang pemimpin yang baik dapat menghargai bawahannya, member pujian pada yang berhasil (lebih banyak menggunakan ibu jari ketimbang jari telunjuk) serta menegur secara halus pada yang bersalah.

b. Kecerdasan

Dalam menghadapi sesuatu seseorang pemimpin itu harus cerdas dan cepat tanggap dan mempunyai daya respon yang tinggi serta mempunyai pandangan luas.

c. Kedewasaan dan Keleluasaan Hubungan Sosial

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai emosi yang stabil. Ketika dikritik tidak emosi dan ketika dipuji tidak membusungkan dada, mempunyai perhatian yang luas pada aktivitas sosial, dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai.

d. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Pemimpin yang ideal selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Menurut Max Weber terdapat tiga tingkatan ukuran yang punya peluang untuk menjadi pemimpin. *Pertama*, mereka yang secara tradisional dalam arti berdasarkan keturunan, berhak menyandang dan bias diterima sebagai pemimpin serta mewarisi kepemimpinan leluhurnya. *Kedua*, mereka yang secara

Kharismatik dalam arti kelebihan yang dimiliki, berhak menyandang dan bisa diterima sebagai pemimpin serta mewakili aspirasi maupun kepentingan umatnya. *Ketiga*, mereka yang secara nasional dalam arti memenuhi persyaratan formal untuk diangkat dan didudukkan sebagai pemimpin. (Hamidah, 2014, hlm. 3-4).

### 3. Sifat – Sifat Pemimpin

Menurut Orway Tead mengemukakan bahwa syarat yang ideal untuk menjadi pemimpin adalah :

a. Energi jasmani dan mental (*physical and enervous energy*)

Hampir semua pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi, kerja, disiplin, kesabaran, serta kemauan luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Kesadaran akan tujuan dan arah (*sense of purpose and direction*)

Dalam mengambil tingkah, dia tahu benar terhadap apa dan kearah mana tujuan itu dan manfaat yang dapat diambilnya guna pemenuhan kebutuhan kelompoknya.

c. Antusiasme (*eathusiasme*; semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar)

Pekerjaan dilakukan itu harus bernilai memberikan harapan yang menyenangkan , memberikan sukses yang membangkit antusiasme dan semangat yang besar.

d. Keramahan dan kecintaan (*friend lines and effection*)

Rasa kecintaan, kasih sayang, rela berkorban, sebab pemimpin ingin membuat kelompoknya senang, bahagia dan sejahtera.

e. Integritas (*integrity*, keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati)

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu bahkan merasa senasip dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama.

f. Petugas teknis (*technical mastery*)

Petugas harus memiliki suatu atau beberapa keahlian teknik tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.

g. Ketegasan dalam mengambil keputusan (*decisiveness*)

Setiap pemimpin yang berhasil selalu dapat mengambil keputusan dengan tepat, tegas dan cepat sebagai hasil dari keaktifan dan pengalaman.

h. Kecerdasan (*intelligence*)

Merupakan kemampuan untuk melihat dan memenuhi dengan baik, mengerti sebab akibat suatu masalah dan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat.

i. Keterampilan mengajar (*teaching skill*)

Pemimpin yang baik adalah seorang guru yang baik, yang mampu menentukan, mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu.

j. Kepercayaan (*faith*)

Keberhasilan pemimpin pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. Yaitu kepercayaan bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik dan diarahkan pada sasaran yang benar (Kartono, 1994, hlm. 68-69).

#### 4. Kepemimpinan Perempuan Menurut Ajaran Islam

Sejak 14 abad yang silam al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan Islam telah memberikan hak kepada

perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian juga Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki – laki berdasarkan dalil-dalil syara’.

Kepemimpinan dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti “kepemimpinan” seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebutkan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader(perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Q.S at-Thaubat ayat 71 yang artinya :

Q.S at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata ‘Auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mau memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar bahwa kata ‘Auliya’ mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang.

Dari surat at-Taubat ayat 71 tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan kepala Negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum- hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridho suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap diri dan agama.

Terkait dengan kepemimpinan al-Qur'an memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu ratu Balqis di negeri Saba', hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Q.S Saba' ayat 15 :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya : “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) ditempat kediaman mereka yaitu 2 buah kebun disebelah kanan dan disebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) : “makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir, bersikap hati-hati dan teliti dalam memutuskan sesuatu, ia tidak gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis tidak dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Balqis dan berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari Marmer yang berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi ia mengatakan “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Sulaiman, kepada Allah , Tuhan semesta alam”.

Ini hanyalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas. Dikala ia dalam kondisi tetapi ia merangkul lawannya dan menundukkan diri kepada zat yang lebih tinggi dari pada Sulaiman (Q.S (27) An-Naml : 40) .

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

Artinya : Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

Demikianlah al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan menceritakan ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran. Ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Waktu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman ia bermusyawarah dengan para pembesarnya, walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya. Karena ia mempunyai intuisi, bahwa Sulaiman itu seorang Nabi. Maka tidaklah bijaksana melawan Sulaiman itu. Kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan. Juga tidaklah bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu Negara( Presiden atau Kepala Pemerintahan) sebagaimana halnya kaum laki – laki, bila mereka memiliki criteria persyaratan sebagai pemimpin.

Perempuan (wanita) dalam pandangan Islam dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perempuan adalah manusia ciptaan Allah SWT, yang memiliki perbedaan secara fisik dan biologis, dan berjenis perempuan. Namun di sisi Allah SWT, memiliki kedudukan dan posisi yang sama dengan makhluk Allah SWT yang berjenis laki-laki dalam hal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap perintah Allah SWT, *amar makruf nahi mungkar* (menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT).

Antara perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan derajat dan martabat yang sama. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahqaf (46) ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Pengertian “mereka” dalam ayat ini jelas bagi perempuan dan laki-laki mendapat imbalan sesuai dengan hasil kerja masing-masing. Meskipun demikian, persamaan kepentingan tidak dapat membenarkan tuntutan atas persamaan yang sempurna. Ada juga kelompok yang menggunakan ayat-ayat sebagai sandaran argumentasi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya, kewenangan poligami bagi laki – laki (An-Nisa Ayat 3) kepemimpinan laki – laki atau perempuan (An – Nisa Ayat 34) pembagian warisan yang tidak sama antara laki – laki dengan perempuan (An – Nisa Ayat 11). Perbedaan ketentuan yang ada dalam ayat-ayat ini sering dijadikan sebagai rendahnya kedudukan perempuan, padahal ketentuan ini bertujuan sebaliknya yaitu terciptanya kerjasama yang harmonis sebagai realisasi dari hasil hubungan anatar jenis pada tahap awal. Mengenai perbedaan yang ada pada ayat-ayat tersebut, dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan seseorang dari yang lainnya.

Secara umum, Islam menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam beribadah kepada Allah SWT (QS 2 : 21) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”.

Q.S an-Nahl (16 : 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Q.S at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan

muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikan. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Persoalan perempuan yang merupakan hasil pemahaman atau penafsiran para pemikir Muslim yang berkaitan dengan relasi gender, yang meliputi persoalan kepemimpinan, kesaksian dan lainnya.

#### **a. Persamaan dalam Kedudukan dan Potensi**

Salah satu prinsip dari ajaran Islam (al-Qur'an) adalah ajaran tentang persamaan di antara manusia. Manusia menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Faktor yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah bukanlah karena faktor fisik-biologisnya, melainkan semata karena ketaatan kepada-Nya (al-Taqwa). Di antara ayat al-Qur'an yang memuat prinsip persamaan ini antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S 49 : 13).

Selain itu, ditemukan pula ayat al-Qur'an yang secara khusus menunjuk kepada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di antara ayat-ayat itu adalah :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (Q.S 4 : 124).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S 16 : 97).

Memperhatikan ayat-ayat di atas, seakan tidak ada lagi permasalahan yang harus diperdebatkan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan jelas-jelas telah mendapatkan legitimasi al-Qur'an. Pemahaman yang demikian barangkali bisa diterima karena hal ini menyangkut kedudukan manusia di hadapan Allah, relasi manusia dengan Allah, meminjam istilah etik yang dipakai (Toshihiko Izutsu, 1993, hlm. 20).

Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mahmud Syaltut, dalam bukunya *al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat* menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan

potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus (Quraish Shihab, 1994 , hlm. 269-270).

Berkaitan dengan persamaan potensi ini, kemudian muncul sejumlah pertanyaan. Kalau sekiranya kepada perempuan telah diberikan potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, mengapa dalam relasi di antara keduanya sekarang ini terjadi perbedaan ?Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, di antara kaum perempuan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat.Satu pihak menyatakan bahwa peran domestik kaum perempuan di dalam rumah tangga adalah sebagai sesuatu yang mesti dijalannya dengan sepenuh hati.Bahkan telah muncul diskursus keagamaan seperti dikatakan kitab-kitab fiqh bahwa kodrat perempuan adalah di rumah.

Sementara di pihak lain mengatakan bahwa peran-peran domestik itu bukanlah kodrat wanita. Peran-peran itu hanyalah merupakan konstruksi sosial yang dapat dirombak dan diubah. Peran-peran domestik itu bukanlah monopoli kaum perempuan, apalagi perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya peran-peran domestik seperti memasak misalnya, justru merupakan keahlian yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Di samping persamaan kedudukan dan potensinya sebagai hamba Allah, persamaan itu diperkuat pula dengan kedudukannya sebagai khalifah Tuhan di bumi (*khalifatullah fil-ardl*).Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama mengemban tugas kekhalifahan.Kekhalifahan berarti menuntut kepada baik laki-laki dan perempuan untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaan, baik dalam pengertian politik maupun kehidupan pada umumnya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 492).

## **b. Kepemimpinan**

### **1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga**

Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah ayat 34 surat an-Nisa. Dari ayat ini telah muncul pandangan yang stereotip bahwasannya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini, kemudian melebar ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin. Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan feminis untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ  
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S an-Nisa (4) : 34).

Memahami ayat tersebut, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) adalah pemimpin terhadap isterinya. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah *al-rijalu qaqqamuna ‘ala an-nisa*. Oleh Zamakhsyari, kalimat tersebut ditafsirkan dengan “kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”. Dengan redaksi yang berbeda, Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari bahwa tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan yang semacamnya.

Alasan Zamakhsyari kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga karena :*pertama*, kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan laki-laki itu adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, kesaksian dalam khudud dan qisas, mendapatkan ashabah dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak dinisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai sorban. *Kedua*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 76).

Sementara itu, Alusi mengemukakan alasannya berdasarkan pada adanya dua sifat yang melekat pada laki-laki, yaitu sifat *wahbi* dan *kasabi*. *Wahbi* adalah kelebihan yang didapat dengan sendirinya (*given*) dari Tuhan, tanpa usaha; sedangkan *kasabi* adalah suatu kelebihan yang merupakan hasil ikhtiar. Menurut Alusi, ayat tersebut tidak menjelaskan apa saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal ini menurutnya mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan yang rinci (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 77).

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu, suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota

keluarganya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 310). Untuk memperkuat pendapatnya, Quraish Shihab mengutip al-Qur'an ayat 228 dari surah al-Baqarah :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat / tingkat atas mereka (para isteri) (Q.S al-Baqarah (2) : 228).

Demikian pandangan beberapa mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dari surat an-Nisa ayat 34. Mereka sepakat dalam penafsirannya bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (isteri) dengan dua alasan, yaitu : karena kelebihan laki-laki atas perempuan, dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya.

Dalam perspektif yang lain, ayat tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh kalangan feminis. Asghar Ali Engineer misalnya, berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil pandangan yang semata-mata bersifat teologis, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis (Asghar Ali Engineer, 1994, hlm. 61).

Dalam pandangan Asghar keunggulan laki-laki bukan merupakan keunggulan jenis kelamin, tetapi berupa keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (dan keluarga). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Alasannya adalah karena perempuan ketika itu masih sangat rendah kesadaran sosialnya dan pekerjaan domestik sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki memandang dirinya sendiri lebih

unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan (Asghar Ali, 1998, hlm. 62).

Berbeda dengan Asghar adalah Aminah Wadud dan ia menyetujui laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, dalam hal ini ia memberikan dua persyaratan, yaitu jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, dan jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya (Aminah Wadud, 1994, hlm. 93-94).

Pendapat yang berbeda tentang penafsiran ayat di atas dikemukakan juga oleh Masdar F. Mas'udi. Dalam bukunya, "Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan" (1997 : 61-62), dengan mengutip *Tafsir Jalalain* (1981 : 76), kata *qawwamuna ala an-nisa*, tidak semata ditafsirkan dengan menguasai atau mensultani perempuan, melainkan dapat pula ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ternyata ditemukan dalam surah an-Nisa (4) : 135 dan al-Maidah (5) : 8. Sehingga dengan demikian, ayat itu artinya adalah "kaum laki-laki adalah penguat dan penopang kaum perempuan dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan". Dengan pengertian seperti itu, maka secara normatif, sikap suami (laki-laki) kepada isteri (perempuan) bukanlah 'menguasai' atau 'mendominasi' dan cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi.

## **2. Kepemimpinan dalam Negara**

Konsekuensi sektor publik menuntut perempuan untuk tampil di depan khalayak. Sementara itu, ada larangan umum terhadap kaum perempuan untuk tidak keluar dari rumah. Keadaan semacam ini diperkuat dengan adanya hadits yang mencela kepemimpinan perempuan. Hadits Nabi menyatakan :

عن أبي بكره قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من ستخلفوا قالوا بنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أمراهم امرأة (رواه الترمذي)

Dari Abi Bakrah berkata, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda : “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (H.R.Tirmiziy) (Muhammad Ibnu Isa Abu Isa at-Tarmiziy, h. 254, Hadits No. 2262).

Menurut Quraish Shihab (1996 : 314), yang perlu digarisbawahi dari hadits di atas adalah bahwa hadits itu tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadits di atas yang semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Kalau kebanyakan ulama menjadi hadits di atas sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi kepala negara, Ahmad Munif (2000 : 36), dengan mengutip pendapat Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik, ia menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin atau presiden. Dengan memperhatikan latar belakang historis, atau dalam istilah Asghar Ali, konteks keluarnya sebuah hadits (*asbab al-wurud*), pendapat Imam at-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara nampaknya lebih bisa diterima.

Selain itu, jika hadits di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi bahwa syarat kepemimpinan itu mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur'an menunjukkan kisah seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah yang menceritakan kesuksesan Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba'.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S an-Naml (27) : 23).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga diperkuat dengan tidak adanya hadits Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu dengan adanya beberapa orang ratu (*sulthanah*) di Kerajaan Aceh (F. Masdar Mas'udi, 1997, hlm. 59).

Selain masalah kepala negara, salah satu ayat yang sering menjadi rujukan para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan *Rasul-Nya*. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S at-Taubah (9) : 71).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Menurut Quraish Shihab (1996 : 315), pengertian kata *awliya* mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Adapun kepemimpinan merupakan seni dan kemampuan untuk memimpin. Unsur pokok dalam kepemimpinan ialah kolaborasi seni dan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang untuk berbuat ke arah yang diinginkan.

Kemampuan setiap orang dalam memimpin tentulah tidak sama, tetapi Islam mengakui bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, sebagaimana sabda beliau :

*“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang laki-laki adalah pemimpin atas ahli keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, pelayan pimpinan atas harta majikannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Dan semua kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu”* (H.R Bukhari).

Hadits di atas mengindikasikan bahwa potensi memimpin harus dimiliki oleh setiap orang dan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap individu harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin apapun posisi yang diembannya selama dia masih berstatus sebagai *mukallaf*.

Ketika fokus pembicaraan berkaitan dengan kepemimpinan, di mana pada satu sisi ada yang memimpin dan pada sisi yang lain ada yang dipimpin, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah :

1. Memimpin dengan adil dan bijaksana
2. Membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi yang berhajat
3. Mendamaikan perkara terhadap yang bersengketa
4. Mengontrol (mengoreksi dan mengevaluasi) pegawai (yang dipimpinnya)
5. Mencegah tersebarnya gosip (fitnah)

Sementara itu, pemimpin juga mempunyai beberapa hak yang seyogyanya akan didapatkannya ketika dia telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diantaranya :

1. Diberi upah dari baitul mal
2. Didengar dan ditaati seluruh instruksinya selama tidak maksiat
3. Diberi nasehat (saran) yang konstruktif
4. Dihormati secara wajar
5. Menjaga perkataan di hadapannya

Islam memberikan apresiasi yang tinggi bagi pemimpin (imam) yang adil, di mana mereka itu termasuk salah satu dari tujuh kelompok yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain dari naungannya Allah SWT (H.R Bukhari dari Abu Hurairah).

Penjelasan hadits tersebut memberikan kabar gembira nanti di akhirat bahwa bagi pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Pada sisi lain, di dunia ini juga akan terlihat ganjarannya. Seorang pemimpin yang adil akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas atas segala jasa dan pola kepemimpinannya.

Di samping itu, al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada jaman Nabi untuk melakukan *bai'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12. Sementara para pakar agama Islam menjadi *bai'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah, surah an-Nisa ayat 34, “Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan ...” sebagai bukti tidak

bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik karena –kata mereka– kepemimpinan berada di tangan lelaki sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat an-Nisa ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami (Dadang, 1997, hlm. 10-11).

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah Utsman RA.

Penggambaran perempuan dengan citra positif di atas sangat berlawanan dengan sebagian ulama lain yang membangun citra negatif terhadap perempuan, khususnya dalam kepemimpinan politik. Beberapa bangunan argumentasi yang diajukan juga bermuara pada dalil yang sama antara lain al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, sebagaimana dikutip di atas. Hanya saja pendekatan penafsirannya yang berbeda sehingga melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Misalnya, dalam beberapa kitab tafsir klasik disebutkan bahwa, “Para laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan karena mereka mempunyai kelebihan akal (intelektualitas) dan mempunyai kemampuan mengatur (*leadership*), sementara perempuan sebaliknya lemah akal dan agamanya”. Hal yang senada juga

dinyatakan dalam kitab tafsir lain bahwa kepemimpinan laki-laki karena ia diberi kelebihan oleh Allah untuk mengatur, mendidik dan menjaga perempuan, yaitu kekuatan akal pikirannya (Yunahar, 1997, hlm.50).

Secara umum, alasan yang digunakan adalah perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang, dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (*fitnah*) dan menstimulasi konflik sosial. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (*al-Qur'an* dan *Hadits*) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun waktu yang panjang, pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas, bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari'ah, Islam bagi perempuan untuk memegang jabatan-jabatan publik (*al wilayah al 'ammah al mulzimah*). Said al-Afghani mengatakan "*al siyasa 'ala mar'ah haram shiyanah li al mujtama' min al takhabbuth wa su-u al munqalab*" (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan). Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba'i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba'i mengatakan bahwa "Peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat di jauhi, bahkan saya katakan diharamkan. Hal ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian, melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam, dan merugikan kepentingan keluarga.

Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin secara normatif selalu mengacu pada *al-Qur'an* surat an-Nisa ayat 34 yang dimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Di samping itu juga, mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu *Hadits* Rasulullah yang menyatakan, "*Tidak akan bahagia suatu kaum (bangsa) yang dipimpin oleh seorang perempuan*". Menurut mereka, perempuan haram aktif di pentas politik, di samping

ketidakmampuannya untuk memimpin karena mereka kurang akal dan agamanya, juga kehadiran perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah.

Dalam pandangan K.H Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 di atas sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogis utama (*qiyas aulawi*). Hal ini kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadits riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum / bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan), melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadits tersebut.

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadits itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan hadits di atas, terdengar kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja / Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan konteks hadits tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks hadits di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelamin yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politiklah sumbernya (Masdar, 1996, hlm.51).

Masih dalam kaitan dengan status hukum kepemimpinan perempuan menanggapi hadits di atas para ulama berbeda. Ismail al-Shan'ani memetakan dua

pendapat hukum yang berbeda. *Pertama*, pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) yang menyatakan haram hukumnya mengangkat perempuan menjadi imam / kepala negara. *Kedua*, pendapat Ibn Jarir at-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan. Pendapat at-Thabari mewakili ulama klasik merupakan pendapat minoritas di tengah hegemoni pendapat *mainstream* yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun demikian, peta pendapat ulama yang berbeda dalam masalah krusial ini mengandaikan telah terjadi perdebatan akademik yang produktif dan toleran, tanpa harus memunculkan sikap *truth claim* dengan semangat fanatisme yang parsial dan penuh kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Dari perbedaan pendapat ini juga menginformasikan bahwa kontroversi tentang kepemimpinan adalah isu klasik, tetapi selalu aktual.

Menurut K.H Husein Muhammad, sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit). Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “*baiat*” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah bin Ka’ab, Ummu Athiyyah al-Anshariyah dan Rabi’ bin al-Muawwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah (Quraish Shihab, 1992, hlm.289).

Partisipasi politik perempuan sekarang ini mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara sub ordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam

buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20, tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Selain itu pula, hal yang memisahkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidupnya adalah berkenaan dengan konsep hijab. Secara kebahasaan hijab diartikan dengan tabir, penutup, tirai, layar dan sekat (Ahmad Warson, 1984, hlm. 256). Dalam karya-karya *fiqh al-Nisa*, seperti Kitab *Ahkam an-Nisa* karya Ibn al-Jauzi, *Husn al-Uswah* karya Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qannuji. Konsep hijab ini cenderung dimaknai dengan ‘pemingitan’ kaum perempuan dalam rumah-rumah tangga. Bab-bab yang diulas dalam buku-buku itu antara lain mengenai ‘Nasihat Agar Kaum Wanita Tidak Pergi ke Luar Rumah’, ‘Keuntungan Wanita yang Semata Ibu Rumah Tangga’, ‘Bukti-Bukti yang Menunjukkan Lebih Baik Wanita Tidak Menjumpai Kaum Pria’, dan seterusnya (Fatima Mernisi, 1994, hlm. 124-126). Salah satu ayat yang menjadi dasar legitimasi *hijab* (pemingitan) adalah :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu ... (Q.S Al – Ahzab (33) : 33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya :dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat di atas seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar dari rumah. Quraish Shihab (1996 : 304) dengan mengutip al-Maududi dari bukunya yang berjudul *Al-Hijab*, menyatakan bahwa ayat itu berarti ‘tinggallah di rumah kalian

dan tetaplah berada di sana'. Menurutny tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah, kecuali agar mereka selalu ada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu bagi setiap insan.

Berbeda dengan pemikiran di atas, seorang pemikir Mesir, Qasim Amin, menerbitkan sebuah buku yang diberi titel *The Emancipation of Women*. Dalam buku tersebut dibicarakan tentang keruntuhan dalam masyarakat Muslim yang antara lain disebabkan oleh kebodohan. Ia mengatakan bahwa kebodohan itu bermula dari keluarga, yaitu ketika kaum perempuan banyak yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki kebebasan untuk memainkan peran yang positif dalam masyarakat. Keadaan yang demikian bukan disebabkan karena Islam, melainkan dikarenakan kebiasaan dan praktek-praktek keliru yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim.

Qasim Amin menegaskan bahwa akar masalahnya adalah degradasi kedudukan perempuan dalam masyarakat Muslim. Cara yang benar untuk mengatasi hal itu adalah dengan memberikan pendidikan kepada mereka, bukan dalam pengertian pendidikan manajemen keluarga semata, melainkan dalam bidang-bidang ilmu di mana mereka dapat membantu kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia menyatakan, pemberdayaan (*empowerment*) kaum perempuan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan (*liberation*) mereka dari dominasi laki-laki. Ia mengkritik 'pemingitan' kaum perempuan dalam rumah, karena hal itu dipandang secara sosial membahayakan dan menghalangi kaum perempuan untuk mengekspresikan potensi dan kemampuannya secara penuh.

Dalam buku keduanya yang berjudul *The New Woman*, Amin mengurai serangkaian kriteria baru bagi penilaian mengenai perempuan dalam kehidupan

sosial. Kriteria-kriteria itu meliputi konsep-konsep kebebasan, kemajuan dan peradaban. Ia menegaskan bahwa kebebasan perempuan adalah sama pentingnya seperti kebebasan-kebebasan yang lain seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berbicara. Melanggar kebebasan-kebebasan ini adalah berarti pemerkosaan terhadap kaum perempuan (Subhani, 1999, hlm.67).

### **BAB III**

## **PROFIL ORGANISASI PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA (PWNNU) SUMATERA SELATAN**

#### **A. Gambaran Umum Muslimat NU di Indonesia**

Kata “muslimat” berasal dari bahasa arab jamak dari kata “muslimah” yang artinya muslim yang perempuan (Bambang Marhijanto, 1999, hlm. 250) yang artinya baik pengurus atau anggotanya adalah perempuan.

Adapun pengertian “Muslimat Nahdlatul Ulama” (Muslimat NU) adalah merupakan Organisasi Perempuan Islam yang otonom dari Nahdlatul Ulama (NU) yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, bersifat kekeluargaan, kemasyarakatan dan keagamaan (AD/ART, 2006, hlm. 6).

Keberadaan Muslimat NU tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan (NU). NU adalah salah satu Organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H, yang bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1926 yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

K.H. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama pendiri NU yang mempunyai pandangan luas dan pemikiran yang visioner. Ia menyadari bahwa perjuangan *nafsi-nafsi* (individual, tanpa persatuan dan kesatuan dari kaum ulama tidak akan memberi hasil yang maksimal. Ia berkeyakinan bahwa tanpa persatuan dan kebangkitan ulama, terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengadu domba (T.H. Thalhas, 2002, hlm. 122).

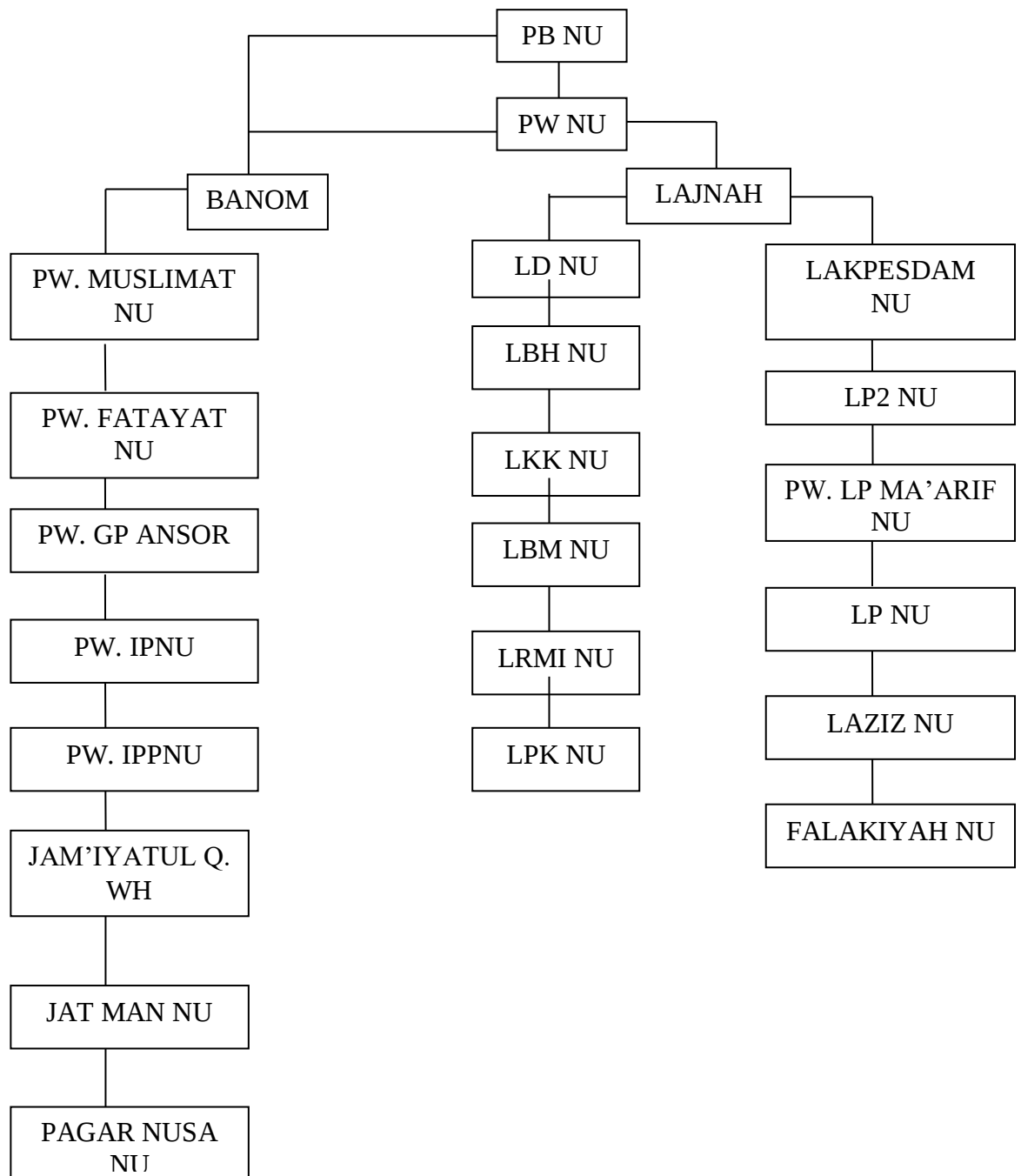
Alasan didirikannya NU ialah untuk menyatukan kekuatan umat Islam dengan kaum ulama sebagai elit perubahan, memudahkan konsolidasi dan koordinasi segala kegiatan umat Islam terutama dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam lingkungan pondok pesantren, dalam rangka meninggikan panji-panji Islam. Adapun sebab khusus

didirikan NU selain pengaruh pemikiran modern dalam Islam, juga terjadinya pergolakan politik di dunia Islam akibat jatuhnya Sultan Turki yang memakai gelar khalifah dari tahtanya (T.H. Thalhas, 2002, hlm. 124).

Ketika NU lahir, ia bukanlah organisasi politik tetapi organisasi kemasyarakatan. Kelahirannya didorong oleh dua keinginan. Pertama, untuk mempertahankan pilar ideologi kaum muslim tradisional yang mulai diguncang pengaruh kaum muslim modernis. Dan kedua, tekad untuk membela eksistensi umat Islam dari penindasan kolonial (S. Sinansari Ecip, 1994, hlm. 87).

NU sebagai Organisasi Keagamaan yang besar, NU telah menginspirasi berdirinya beberapa organisasi yang secara emosional sangat dekat dengan NU. Secara struktur organisasi memiliki adanya lembaga (*lajnah*) dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (BANOM NU).

Gambar lembaga (*lajnah*) dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama disingkat BANOM NU



Sumber dokumen NU 2004-2009

Bagan di atas menggambarkan lembaga-lembaga yang berada di NU disesuaikan dengan level / tingkatan dalam kepengurusan.

Lembaga (lajnah) NU merupakan lembaga yang dibawah langsung oleh NU, SK nya dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) disesuaikan dengan Struktur Kepengurusan.

Adapun Badan Otonom Nahdlatul Ulama (BANOM) SK nya dari pusat dan disesuaikan dengan tingkat kepengurusan adapun BANOM tersebut hanya berkoordinasi saja dengan NU.

Karena BANOM dan Lajnah merupakan anggota Pleno manakalah NU mengadakan musyawarah disesuaikan dengan tingkat kepengurusan adapun BANOM tersebut hanya berkoordinasi saja dengan NU. Karena BANOM dan Lajnah merupakan anggota Pleno manakalah NU mengadakan musyawarah disesuaikan dengan tingkatan dan pada raker (rapat kerja) BANOM dan Lajnah memberikan laporan kepada NU sesuai dengan tingkatan.

Semula muslimat NU bernama NOM (Nahdlatul Oelama Muslimat) yang kemudian pada muktamar NU yang ke-XVI tanggal 26 Maret – 29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah diresmikan sebagai Organisasi Muslimat NU.

Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) merupakan badan otonom NU didirikan pada tanggal 26 Rabbi'ul Akhir 1365 H bertepatan dengan 29 Maret 1946 M di Purwokerto, Jawa Tengah. Pimpinan pusat Muslimat NU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (AD/ART, 2006-2011, hlm. 6).

Muslimat NU bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan politik. Saat ini muslimat NU telah berkembang di 33 provinsi, dan mempunyai 413 cabang di tingkat kabupaten dan kota, 4750 anak cabang di tingkat kecamatan serta ribuan ranting di tingkat desa dan kelurahan (PP Muslimat, 2006, hlm. 2).

Muslimat NU Sumsel didirikan pada tanggal 3 Desember tahun 1951 M, memiliki 16 pimpinan cabang di kabupaten/ kota se- Sumatera Selatan, 47 pimpinan anak cabang dan 95 ranting di tingkat desa dan kelurahan dengan jumlah anggota 11500 orang (PW. Muslimat, 2005, hlm. 3).

## **B. Sejarah Berdirinya Muslimat NU di Indonesia**

Muslimat NU yang merupakan salah satu jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU), termasuk organisasi kaum ibu atau perempuan Islam yang bersifat otonom, bersifat keagamaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Keanggotaannya: setiap perempuan Indonesia yang berpaham *Ahlusunnah Waljama'ah* usia 27 tahun keatas dan sudah menikah (AD/ART Muslimat NU, 2006, hlm. 18).

Muslimat NU diresmikan pada tanggal 26 Rabbi'ul Akhir 1365 H, bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1946 M di Purwokerto, Jawa Tengah (AD/ART Muslimat NU, 2006, hlm. 6). Muslimat NU bukan organisasi yang hanya di tempat –tempat tertentu saja, akan tetapi mencakup seluruh tanah air di Indonesia, selain itu merupakan generator bagi perkembangan perempuan di Indonesia, khususnya kaum perempuan *Ahlusunnah Waljama'ah* yang mengabdikan pada Agama, Bangsa, dan Bernegara.

3 tahap proses berdirinya Muslimat NU :

1. Sebagai anggota NU.
2. Sebagai bagian dari NU.
3. Sebagai otonom dari NU.

### **1. Muslimat NU Sebagai Anggota NU**

Pada mula berdirinya NU tidak menerima Muslimat sebagai anggota. Tetapi buat kaum muslimin dan para ulama, karena pada waktu itu para ulama berpendapat bahwa belum masanya muslimat dibawah ikut serta bergerak dalam perserikatan atau organisasi waktu itu wanita Islam masih dikurung dibalik besi rumah tangganya. Mereka tidak diizinkan keluar dari rumah dan mereka sendiri pun belum mempunyai keinginan untuk bergerak di luar rumah. Keadaan begini berjalan beberapa tahun lamanya sampai pada tahun 1938 yaitu pada kongres NU ke XIII di kota Menes provinsi Banten.

Pada waktu itu kebangunan wanita Indonesia yang sadar dalam pentingnya berorganisasi sudah nampak di sana-sini peserikatan dan organisasi-organisasi wanita lahir hampir di seluruh Indonesia. Baik yang berhaluan agama, sosial atau kebangsaan. Mereka tidak mau dikatakan seperti pepatah Jawa “*Wanita itu suargo nunut neroko katut*” yang maksudnya bahwa perempuan itu masuk surga atau neraka karena suami.

Begitu juga halnya dengan wanita Islam *ahlusunnah waljama'ah*, mereka datang berbondong-bondong menghadiri kongres dengan dipelopori oleh ibu Hj. R. Djuaesih dan ibu Hindun agar supaya NU menerima kaum perempuan sebagai anggotanya.

Permintaan ini diajukan pada kongres NU ke XIII di Menes, namun masih banyak bapak-bapak NU yang menganggap bahwa masuknya kaum ibu dalam organisasi tersebut akan lebih banyak mendatangkan *modhorat* daripada manfaat. Usul ini dibicarakan begitu rupa yang ditanggapi dengan lebih banyak yang kontra daripada yang pro.

Akan tetapi untunglah masih ada diantara bapak-bapak tersebut yang berpikiran maju dan berpandangan jauh ke depan. Apa yang akan terjadi jika NU menutup segala pintu untuk kaum perempuan. Pada waktu itu berbicaralah seorang pimpinan NU yaitu, Bapak K.H.A. Wahab Hasbullah (wakil PB NU dari Surabaya) yang antara lain mengatakan:

... Dalam kalangan umat Islam, bukanlah hanya kaum bapak saja yang harus dan wajib mempelajari dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah tetapi kaum ibu harus mengikuti akan langkah dan gerak dari kaum laki-laki. Mereka harus sama-sama menjalankan segala apa saja yang sudah diwajibkan oleh Agama Islam (Ny. H. Syaifudin Zuhri, 1979, hlm. 17).

Maksudnya di dalam melakukan kewajiban, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Mengingat nasib perempuan pada waktu itu, sangat

mengecewakan dan menyedihkan sekali, kebodohan masih merajalela, kewajiban tidak sesuai dengan hak yang di dapat. Kaum perempuan bekerja berat mengurus rumah tangga, anak dan suami, akan tetapi hak yang di dapat tidak sesuai dengan beratnya kewajiban, di mana kaum perempuan hampir tidak mempunyai hak suara sama sekali, semua persoalan laki-laki yang menentukan perempuan tunduk tanpa syarat.

Begitu juga dalam perkawinan, laki-laki menyalahgunakan haknya. Member thalaq seenaknya. Istri ditinggal (diceraikan) begitu saja, tanpa berdaya “*habis manis sepele di buang*” inilah yang menyebabkan banyak anak yang terlantar, janda-janda muda menderita, yang sampai sekarang ini tetap menjadi beban masyarakat yang tidak berkesudahan.

Kaum perempuan sadar, bahwa untuk memperbaiki nasib demikian haruslah diadakan perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan bagi kaum perempuan, tempat mengeluarkan isi hatinya dan tempat memadu tenaga, dan usaha guna untuk menuntut perubahan nasib, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: . . .Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berpedoman akan ayat di atas, maka kaum perempuan ahlusunnah waljam'ah, tidak mau ketinggalan mereka terus menggedor pintunya Nahdlatul Ulama (NU), sehingga bapak-bapak NU terpaksa membuka pintunya dan menerima muslimat NU

menjadi anggota. Pada waktu kongres NU ke XIII tahun 1938 di kota Menes (H. Aboebakar, 2000, hlm. 536).

Maka sejak mulai dari tahun 1938 inilah muslimat NU telah diterima sebagai anggota NU, namun sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pintu NU baru terbuka sedikit sekali, keanggotaan muslimat hanya sebagai pengikut dan pendengar saja, belum diperbolehkan menduduki kursi pengurus. Namun hal ini sudah cukup membesarkan hati perempuan Muslimat NU yang memandang cahaya harapan sudah berada di depan pintu.

## **2. Muslimat NU Sebagai Bagian dari NU**

Dalam kongres NU ke- XIV, kedudukan muslimat mendapat kemajuan. Dalam sidang tertutup Muslimat juga turut hadir, walaupun masih di balik tabir dan pada waktu itu muslimat telah mengirim utusan dari beberapa daerah, yaitu muslimat Muntilan, Wonosobo, Surakarta (Solo) dan Magelang.

Dan pada sidang terbuka, pembicaraannya tidak hanya dari kaum bapak, tetapi juga dari kaum ibu, bahkan pimpinan dan penyelenggaraannya dipegang oleh muslimat, yang pertama kalinya muslimat memegang pimpinan dalam kongres. Setelah dari kaum perempuan (Muslimat) selesai memberikan prasarananya, maka pimpinan sidang diserahkan kembali kepada pimpinan sidang pria.

Langkah demi langkah muslimat terus berjalan hingga datang kongres ke XV di Surabaya. Kali ini utusan muslimat makin bertambah, mereka membawa mandat dari daerahnya masing-masing. Kalau pada kongres NU ke XIV di Magelang muslimat sudah disertai memegang palu pimpinan rapat umum, dan beberapa pembicara sudah tampil, meskipun hanya di balik tabir, maka pada kongres di Surabaya muslimat ini telah lebih maju lagi.

Karena di samping hadir dalam sidang-sidang NU maupun Syuriah, kali ini Muslimat mengadakan resepsi tersendiri, yaitu dengan mengadakan rapat-rapat tertutup dan terbuka. Rapat tertutup pertama diadakan pada tanggal 10 Desember 1940 yang hasilnya memutuskan sebagai berikut:

1. Pengesahan NOM oleh kongres NU
2. Pengesahan anggaran dasar NOM oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU)
3. Adanya pengurus besar NOM
4. Menerapkan daftar pelajaran untuk tingkat madrasah Banat
5. Rencana menerbitkan majalah bulanan NU muslimat (Ny. H. Syaifuddin Zuhri, 1979: 45).

Rapat tertutup kedua diadakan tanggal 11 Desember 1940, pada ini dibacakan hasil resolusi NU muslimat kepada Hoaf Comite Congres(HCC) tersebut.

Pada rapat selanjutnya direncanakan untuk menyusun kepengurusan NU muslimat yang kemudian diusulkan mengenai rencana pengurus NU muslimat sebagai berikut:

#### Rencana Susunan Pengurus NOM

Ketua : Ny. R. Hindun dari Surabaya

Wakil Ketua : Ny. R. Djunaisih dari Bandung

Penulis I : Ny. Sudinem dari Surabaya

Penulis II : Ny. Hasanah dari Indramayu

Penulis III : Ny. Rupiah dari Surabaya

Bendahara I : Ny. Marfuah dari Cirebon

Bendahara II : Ny. Siti Salamah dari Tegal

Pembantu : Siti Maryam dari Surabaya

Siti Aisyah dari Jombang

### Siti Ipah dari Bandung

Usul muslimat NU untuk menjadikan dirinya menjadi bagian NU dalam kongres ini telah terdapat perbedaan pendapat dari pihak kaum bapak, dan pihak yang setuju dengan alasan supaya kaum ibu turut pula dalam mengatur dan mengorganisir bagiaannya, karena banyak hal-hal yang tidak di mengerti oleh kaum bapak, di pihak lain banyak yang menentang dan tidak setuju akan usul ini, sehingga sampai kongres ini berakhir, usul ini belum ada kepastian masih merupakan keputusan yang sama tengah yaitu: menyerahkan pendirian bagian Muslimat NU dan elemennya kepada Syuriah NU (H. Abubakar, 1957, hlm. 472).

Walaupun muslimat belum menjadi sebagian sebagai yang dicita-citakan, namun keputusan telah menyerahkan persoalannya kepada Syuriah sebagai majlis tertinggi dalam NU, hal ini cukup menyenangkan bagi kaum ibu, dan mereka selalu berdoa, memohon tidak hentinya di dalam hati kepada Allah SWT, semoga Allah SWT melapangkan dada bapak-bapak Syuriah untuk menerima usul mereka tersebut. Tapi apa hendak dikata, sebelum cita-cita menjadi muslimat NU sebagian dari NU terlaksana, tiba-tiba pecahlah perang dunia ke-II di Eropa yang menjalar ke dunia timur yaitu: meletusnya perang antara Jepang dengan Amerika dan Inggris pada tanggal 8 Desember 1941 (Abubakar, 1957, hlm. 538).

Setelah Jepang menggantikan penjajahan Belanda, tidak satu partai kebangsaan yang boleh bergerak (dibekukan) kecuali organisasi yang dibentuk oleh Jepang atau sesuai dengan kehendak Jepang. NU salah satu organisasi yang dibekukan/ di non aktifkan, mereka hanya bergerak di bidang pengajian agama untuk membentengi keimanan rakyat, rakyat menderita dengan tekanan lahir dan batin, kekurangan makanan, pakaian dan lain-lainnya. Dan cita-cita muslimat dibawa hanyut oleh arus keadaan yang tidak mengizinkan.

Kabar kalahnya Jepang ini walaupun di rahasiakan, akhirnya sampai juga ke telinga pemimpin-pemimpin Indonesia, yang cepat bertindak mengambil keputusan, untuk menyiarkan pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Belanda yang pada waktu itu dalam pelarian di Australia, membonceng dengan tentara sekutu untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan hendak menjajah rakyat Indonesia yang sedang meluap-luap tidak mengizinkan bangsa Belanda menginjakkan kakinya untuk kembali ke Indonesia. Di sana-sini terjadi pertempuran rakyat berdiri di belakang pemerintah Republik, mempertahankan kemerdekaan sampai ke tetes darah yang penghabisan.

NU keluar dengan resolusi jihadnya yang terkenal (hasil keputusan Konferensi Konsul-Konsul di Surabaya) yakni, mempertahankan dan menegakkan negara Republik ini menurut hukum Islam termasuk sebagai suatu kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan.

Pemberontakan rakyat meletus 10 November 1945 di Surabaya, seluruh rakyat mempertahankan kemerdekaan dengan segala apa yang ada termasuk kaum Nahdhiyin dan Nahdhiyah.

NU diaktifkan kembali, organisasi diperkuat dan pemuda-pemudanya (Ansor, NU) bergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah, berjuang memanggul senjata menghadapi musuh, begitu juga muslimat NU.

Muslimat NU selalu menampilkan dirinya di barisan belakang. NU mengorganisir wanita-wanita *ahlusunnah wal jama'ah* disalurkan menurut ajaran Islam supaya turut mendharmabaktikan untuk membela tanah air.

Di dalam al-Qur'an surah An-Nisa: 32 Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maksudnya ayat tersebut di atas bahwa wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki, tetapi harus sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan.

Pada kongres NU ke XVI di Purwokerto tahun 1946, rencana menjadikan muslimat bagian dari NU diajukan ke dalam kongres.

Setelah menimbang, mengingat pentingnya adanya organisasi NU muslimat pada waktu itu, maka dengan suara aklamasi para utusan kongres menyetujui dan memutuskan:...menerima baik usul dan menjadikan Muslimat NU yang kemudian disahkan dan diresmikan dalam rapat pleno pada tanggal 26 Rabbiul Akhir 1355 H atau tanggal 29 Maret 1946, suatu organisasi Nahdlatul Ulama Muslimat dengan singkatan NOM (Syiaifuddun Zuhri, 1979, hlm. 56).

Pada putusan inilah sebagai hari lahirnya Muslimat NU yang selalu diperingati sampai dengan sekarang. Dan pada putusan tersebut telah disahkan susunan pengurus berikut:

Penasehat : Nyai Fatmah dari Surabaya  
 Ketua : Ny. Hadijah Dahlan  
 Penulis I : Ny. Mudritho  
 Penulis II : Ny. Mullaya  
 Bendahara : Ny. Kasminten dari Pasuruan  
 Pembantu : Ny. Faleha

: Ny. Musyrifah dari Surabaya

: Ny. Alfiyah

Peraturan khusus NOM yang pertama disusun oleh bapak K.H.M. Dahlan dan A. Aziz Diyar serta disetujui dan ditanda tangani oleh bapak K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H.A. Wahab Hasbullah yang kemudian dirubah dan diperbaiki menjadi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Dalam Anggaran Dasar (AD) peraturan khusus muslimat NU, menyadarkan para perempuan Islam akan kewajiban-kewajibannya, supaya menjadi ibu yang sejati, sehingga dapatlah mereka turut memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan Islam.

Usaha untuk mengembangkan Muslimat NU, pada kongres ke XVII di Madiun, NOM mulai mengatur dan menyempurnakan dirinya kedalam, maka disusunlah pengurus Muslimat NU di setiap daerah telah dibentuk komisariss-komisariss daerah, yaitu:

1. Madiun : Ny. Mahfud Efendy
2. Surabaya : Nona Nihaya Bakri
3. Banyumas : Ny. Sulimah
4. Kediri : Ny. Syaifuddin Zuhri
5. Cirebon : Hasanah Mansur
6. Periangen : Ronasih
7. Jember : Ny. Sunariyah
8. Malang : Nona Alfiyah
9. Tapanuli : Ny. Aisyah Wahab

(Aisyah Dahlan, 1968, hlm. 46).

### **3. Muslimat NU Sebagai Otonom**

Sesudah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), pertumbuhan muslimat NU di cabang dan ranting mulai berjalan. NUM aktif dan mengirim utusannya. Pada kongres ini bagi Muslimat NU sangat penting karena Muslimat NU diikuti sertakan sebagai anggota yang boleh bersuara dan memberikan usul. Selain kombinasi dengan NU Muslimat NU juga mengadakan rapat khusus.

Pada kongres NU ke XIX tahun 1952 di Palembang. NUM yang tadinya hanya merupakan bagian dari NU, ditingkatkan dan disahkan menjadi BANOM (Badan Otonom) dari NU dengan singkatan “Muslimat NU” yang mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Kemudian terbentuklah susunan Pengurus Besar (PB) muslimat NU sebagai berikut:

Ketua : Ny. Mahmudah Mawardi (Jakarta)

Wakil Ketua I : Ny. Aisyah Dahlan (Jakarta)

Wakil Ketua II: Ny. Murthadiyah Ahmad (Jakarta)

Penulis I : Ny. Nihayah Bakri (Surabaya)

Penulis II : Hasanah Mansur (Jakarta)

Bendahara I : Ny. Sulaiman (Jakarta)

Bendahara II : Ny. Hasbullah (Jakarta)

Anggota : Ny. Wahid Hasyim (Jakarta)

: Ny. H. Yasin (Surabaya)

: Ny. Fatmah (Surabaya)

: Chuzaimah Mansur (Surabaya)

Pada muktamar NU ke XX tahun 1954 di Surabaya adalah kongres pertama Muslimat NU sebagai badan otonom dari NU (PP Muslimat NU, 1996, hlm. 111).

Muslimat NU telah berkembang secara dinamis baik dari segi pemikiran dan kinerjanya. Ada beberapa tokoh Muslimat NU dari awal hingga dengan perkembangannya sehingga dirasakan sangat bermanfaat dan sebagai teladan bagi anggota Muslimat NU khususnya dan pada umumnya bagi perempuan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Adapun pemikiran para tokoh muslimat NU awal perkembangannya sebagai berikut:

**a. Hj. R. Djuaesih**

Hj. Ny. R. djuaesih adalah salah seorang perintis berdirinya Muslimat NU, bahkan beliau adalah wanita Muslimat NU yang pertama kali naik mimbar dalam forum resmi organisasi. Ny. R. Djuaesih dilahirkan di Sukabumi, bulan Juli 1901 (PP Muslimat NU, 1996, hlm. 24).

**b. Ny. Chodijah Dahlan**

Ny. Chodijah Dahlan adalah ketua pertama Muslimat NU sejak organisasi ini resmi memproklamkan kelahirannya tahun 1946 ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur sekitar tahun 1912. Menjadi aktivis organisasi, terbawa oleh suaminya K.H. Muhammad Dahlan sebagai tokoh (pria) utama di balik kelahiran muslimat NU. Chodijah Dahlan adalah tokoh muslimat NU pertama yang memberikan pidato resmi sejak muslimat NU menjadi organisasi otonom dalam forum kongres pertama di Purwokerto, pidato akhirnya dijadikan salah satu konsideran. Ia juga membuat tulisan pendahuluan selaku ketua muslimat NOM yang pertama.

**c. Ny. Solicha A. Wahid Hasyim**

Soleha Wahid Hasyim (1992-1994) adalah putri pasangan K.H. Bisri Syamsuri dan Nyai Nur Chadijah dari Tambak Beras, Jombang. Peran dan pengabdianya meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat luas. Ibunda mantan presiden

Alm. K. H. Abdurrahman Wahid ini dikenang sebagai “*Ibu Besar Keluarga NU*” ibu dari banyak pemuda pergerakan dari generasi muda NU.

**d. Ny. Hj. Solichah Saifuddin Zuhri**

Ny. Hj. Solichah Saifuddin Zuhri (1925-1990) adalah putri H. Dahlan, juragan batik dari Purworejo, Jawa Tengah. Ia ikut aktif dalam muslimat NU, salah satu sayap NU dari bangsa perempuan. Jabatan tertinggi yang pernah dipegangnya adalah ketua II PP Muslimat NU yang membidangi pendidikan. Ibunda juga ketua panti An-Nisa Hadi dan juga pernah menjadi Ketua Pengurus Rumah Bersalin Muslimat di Jakarta.

**e. Asma Syachroni**

Ia lahir tanggal 28 Februari 1928 di Rantau, Kalimantan Selatan. Pada tahun 1955 Asma Syachroni terpilih sebagai anggota DPR, pada tahun 1959 Asma mulai aktif di PP Muslimat NU di samping sebagai anggota DPR. Pada tahun itu juga, kongres ke VII di Jakarta memberi kepercayaan kepadanya untuk menangani bidang sosial kemudian duduk sebagai ketua II dalam susunan pengurus PP (Pimpinan Pusat) hasil kongres ke VIII di Solo. Dan pada kongres ke IX di Surabaya baru kemudian duduk sebagai ketua umum pada tahun 1979.

**f. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi**

Sejak kecil, pasangan putri K.H. Wahid Hasyim dengan Hj. Solicha ini dididik aktif di dunia sosial kemasyarakatan. Tak heran bila ibu yang lahir di Jombang, 6 Juni 1940 ini telah aktif di lingkungan NU sejak usia 19 tahun, mulai di Fatwat NU kemudian Muslimat NU. Pada puncak pengabdian di Muslimat NU, ia diberi amanat menjadi ketua PP Muslimat NU (1995-2000) dan juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

### **g. Khofifah Indar Parawansa**

Khofifah Indar Parawansa, lahir di Surabaya tahun 1965 dikenal sebagai tokoh perempuan di tingkat nasional. Karier di bidang politik sebagai : pimpinan Praksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997), pimpinan komisi VIII DPR RI (1995-1997) anggota komisi II DPR RI (1997-1998) wakil ketua DPR RI (1999) sekretaris Praksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999). Dalam pemerintahan dan publik, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001) di era presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001).

- a) Ketua Komisi VI DPR RI (2004-2006)
- b) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004-2006)
- c) Anggota Komisi VII DPR RI (2006)

Tidak heran jika memimpin PP Muslimat NU 3 periode, (2000-2005), (2006-2010), (2011-2016) pada kongres ke XIV di Jakarta, pada kongres ke XV di Batam, dan kongres ke XVI di Lampung (Ahmad Millah Hasan, 2010, hlm. 25-26).

Khofifah sebagai PP Muslimat NU, selalu mengangkat isu perempuan dan selalu memperjuangkan nasib perempuan dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi di Indonesia, mencapai 307 kasus per 100 ribu per kelahiran hidup. Dengan ini Khofifah juga sebagai narasumber pada forum-forum nasional dan internasional, antara lain pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman pada 24-26 Mei 2004.

### **C. Sejarah Berdirinya Muslimat NU di Provinsi Sumatera Selatan**

Pada tanggal 26 November 1951 telah diadakan pertemuan-pertemuan perkumpulan wanita ahlussunnah wal jama'ah di Palembang yang dipelopori oleh Ibu

Hj. Siti Aminah Mustofah bertempat di langgar Istifadah 36 ilir Palembang. Untuk membentuk dan memilih pengurus, sebagai persiapan pembentukan NU Muslimat (NUM) provinsi Sumatera Selatan. Kepengurusan ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari :

1. Consul : Ibu Siti Aminah Mustofa (almh)
2. Wakil I : Ibu Masayu Cholijah Ahmad
3. Wakil II : Ibu Siti Rumbiyah Damiri (almh)
4. Penulis Umum : Hanuyah Yusuf (almh)
5. Penulis I : N.n. Hasanah Hasan
6. Bendahara : Ibu Zahidah Hamid
7. Wakil Bendahara : Ibu Nungcik Naning
8. Pembantu : Ibu Zawahir Ahmad
9. Pembantu : Ibu Alberten Haliman
10. Comisaris Daerah : Ibu Siti Rumbiyah (almh)

Sedangkan pengurus tersebut disahkan oleh PB NUM pusat pada konferensi NUM Sumatera Selatan yang diselenggarakan dari tanggal 5-9 Desember 1951 di Palembang (PW Muslimat NU, ke VIII, 1989: 6).

Sesudah mengalami konferensi NUM pada tanggal 5 Desember 1951 sebagai konferensi pertama, pimpinan aktif mengadakan pembentukan cabang-cabang di daerah. Setelah kongres NU yang ke XIX tahun 1952 di Palembang, muslimat Sumatera Selatan telah mempunyai 12 cabang yang semuanya mengirimkan wakilnya hadir pada kongres tersebut. Semenjak dari kongres NU ke XIX tahun 1952 di Palembang, keaktifan pengurus Muslimat NU Sumatera Selatan yang di ketuai oleh Ibu Hj. Aminah Mustofa sampai tahun 1962. Sebanyak 18 cabang termasuk Lampung, Bengkulu dan mengesahkan 3 komisaris daerah yaitu :

1. Komisaris daerah Palembang (SumSel), di ketuai oleh Ibu Siti Rumbiyah Damiri.
2. Komisaris daerah Lampung, di ketuai oleh Ibu Alberten Haliman.
3. Komisaris daerah Bengkulu, di ketuai oleh Ibu Syarifah.

Dari tahun 1951 sampai tahun 1962 cabang Muslimat NU berjumlah 28 cabang, dengan perincian sebagai berikut :

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Daerah Palembang (Sumatera Selatan) | = 19 cabang       |
| 2. Daerah Lampung                      | = 6 cabang        |
| 3. Daerah Bengkulu                     | <u>= 3 cabang</u> |
| Jumlah                                 | = 28 cabang       |

Setelah adanya pengembangan daerah Sumatera Selatan terpilih lah perubahan daerah otonom, perpisahan daerah otonom terbagi atas tiga provinsi yaitu : Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu (Wawancara, Hj. Zuhro Hasan, 12 Agustus 2013).

Adapun menurut ibu Wantum Gatmir, mantan ketua muslimat NU cabang kota Palembang berdiri pada akhir Januari 1952 yang diketuai oleh ibu Nangcik Naning (Wawancara, Wantum Ali Gatmir, 3 Oktober 1991).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Sukarmawati tanggal 1 September 2013, ketika periode Ibu Wantum Gatmir sebagai ketua cabang muslimat kota, ketua wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan Ibu Hj. Rumbiyah.

Dan sampai dengan sekarang pimpinan wilayah muslimat NU dipimpin:

1. Hj. Rumbiyah (1961-1966)
2. Hj. Zuhro Hasan (1990-1994), (1994-1999)
3. Hj. Rukiah MN (1999-2004), (2004-2010)
4. Hj. Failasufah (2011-2016).

## **1. Susunan Pengurus Organisasi Pimpinan Wilayah(PW) Muslimat NU Sumsel**

Berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Muslimat NU No. 2489/A/PPMNU/IV/2011 tentang Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan Periode 2011-2016

PW Muslimat NU Sumsel memiliki 15 cabang yang berada di kabupaten dan kota.

1. Cabang Kota Palembang
2. Cabang Kota Prabumulih
3. Cabang Kota Pagaralam
4. Cabang Kabupaten Muara Enim
5. Cabang Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir)
6. Cabang Kabupaten OI (Ogan Ilir)
7. Cabang Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu)
8. Cabang Kabupaten OKU Timur
9. Cabang Kabupaten OKU Selatan
10. Cabang Kabupaten MUBA (Musi Banyuasin)
11. Cabang Kabupaten BA (Banyuasin)
12. Cabang Kabupaten Lahat
13. Cabang Kabupaten Empat Lawang
14. Cabang Kabupaten MURA (Musi Rawas)
15. Cabang Kabupaten Lubuk Linggau

### **D.Visi dan Misi Organisasi / Tujuan Muslimat NU**

Pada situasi dewasa ini, Indonesia tidak menutup diri dari gejolak perkembangan reformasi yang meliputi pemerintahan demokrasi, kecanggihan teknologi dan informasi

serta kebudayaan asing yang kadang kala bernilai negatif, seperti gaya berbusana, gaya hidup yang konsumtif. Hal inilah yang menjadi perhatian kaum ibu untuk mewaspadai hal-hal yang mengarah kepada krisis akhlak, bagi generasi selanjutnya. Waktu itu, organisasi kaum ibu perempuan *ahlusunnah wal jama'ah* Muslimat NU mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran-ajaran Islam *ahlusunnah wal jama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun misi Muslimat NU pada pasal 5 AD/ART menyebutkan antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang berkualitas, mandiri dan taqwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan jam'iyyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.

Muslimat NU bertujuan:

1. Terwujudnya wanita Indonesia yang sadar beragama, berbangsa dan bernegara.
2. Terwujudnya wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Terwujudnya wanita Indonesia yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat .
4. Terlaksananya tujuan jam'iyyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT. (AD/ART, 2006, hlm. 6).

### E. Lambang Muslimat NU / Mars Muslimat NU

Bentuk lambang Muslimat NU:



**Gambar Lambang Muslimat NU**

#### **Keterangan Lambang Muslimat NU :**

- a) Bola dunia terletak di tengah-tengah bearti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b) Tali yang mengikat bearti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong-menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.
- c) Lima buah bintang terletak di atas, yang terbesar di puncak bearti sunnah Rasulullah saw yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Radhiyallahuanhum.
- d) Arti seluruh bintang yang berjumlah Sembilan buah itu yaitu Walisongo atau Wali Sembilan yang bearti dalam berdakwa meneladani tata cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Arti warna:

- a) Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan
- b) Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian
- c) Tulisan Nahdlatul Ulama bearti Muslimat NU meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

**Mars Muslimat NU****MARS MUSLIMAT NU**

1 = D 2/4

Lagu dan Syair : S. Widjaja S

Semangat

RR : MTS

3 . 4 / 5   5 . . 5   /   5 6 . 7   /   i . /   5   i . i   / 7 6 . 6 / 4   6 . 6 / 5 . / 0

Ma ri – lah   ka um   I bu Mus - li – mat   Nahdla – tul U la – ma   nan se- tia

2 . 3 / 4   4 . 4   /   6 5 . 4   /   3 . /   5   2 . 3   / 4 5 . 6   /   7   6 . 7 / 5 . / 0

Al Qur – an   Ha dits   Ij ma dan - Qi – yas   menja – di pe dom – an   u ta- ma

5 . 5 / 6   6 . 6 / 7   6 . 7   /   i . /   5   1 . 2   / 3 5 . 4 / 3   2 / 1 . / 0

De mi A ga ma nu sa dan Mus bang - sa – ne   ga   – ra da mai ba ha   gia

3 . 5 // : i   i   . i / 7   6   /   5 .   /   0   6 . 6   / 5 3 / 3 2   . 1 / 2   . / 0

In Syaf – lah hai   ka um   I bu   Bimbing - lah pu - tra pu tri – mu

5 . 5 / 6   2 . 2   /   3   i   / 5   . /   0   7 . 1 / 2   2 / 1 2 / 3 . / 0   3 . 5 : //

I man te guh bi - jak sa - na   Mus li - mat In- do ne – sia   In saf

/ 2   3 / 6 7   /   i   .   /   0 //

mat In – do ne - sia

Marilah kaum ibu muslimat

Nahdatul Ulama nan setia

Al – Quran Hadist Ijma' dan Qiyas

Menjadi pedoman utama

Demi agama nusa dan bangsa

Negara damai bahagia

Majulah kaum ibu muslimat

Pengemban, pembawa amanat

Pendidik, Pembina bunga bangsa

Menunaikan tugas mulia

Berilmu beramal dan berbakti  
 Bertaqwa pada ilahi  
 Reff.Insyafilah hai kaum ibu  
 Bimbinglah putra putrimu  
 Iman teguh bijaksana  
 Muslimat Indonesia

#### **F. Kepemimpinan Muslimat NU**

Muslimat NU memiliki jenjang tingkatan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat pusat.
2. Pimpinan Wilayah (PW) untuk tingkat provinsi.
3. Pimpinan Koordinator Daerah (PKORDA) untuk tingkat eks keresidenan.
4. Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten / kota.
5. Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk cabang di luar negeri.
6. Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk tingkat kecamatan.
7. Pimpinan Ranting (PR) untuk tingkat kelurahan / desa.
8. Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk tingkat dusun / RW.

Pada Anggaran Dasar dan Rumah tangga juga diatur susunan pengurus organisasi

#### **Pasal 7**

1. Pimpinan Lengkap terdiri atas:

Dewan Penasehat; Dewan Pakar; Pimpinan Harian; Bidang-bidang

2. Pimpinan Harian terdiri dari:

Ketua Umum; Ketua I; Ketua II; Ketua III; Ketua IV; Ketua V; Ketua VI;  
 Sekretaris Umum; Sekretaris I; Sekretaris II; Sekretaris III; Sekretaris IV;  
 Sekretaris V, Bendahara Umum; Bendahara I; Bendahara II

3. Bidang-bidang terdiri atas:

1. Organisasi dan keanggotaan
2. Pendidikan dan kaderisasi
3. Sosial, kependudukan dan lingkungan hidup
4. Kesehatan
5. Dakwah
6. Ekonomi, koperasi, agrobisnis
7. Tenaga kerja
8. Hukum dan advokasi
9. Penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informasi
10. Hubungan di luar negeri dan pengembangan jaringan

Pasal 8

PIMPINAN WILAYAH

1. Pimpinan Lengkap terdiri atas:

Dewan Penasehat; Dewan Pakar; Pimpinan Harian; Bidang-bidang

2. Pimpinan Harian terdiri atas:

Ketua; Ketua I; Ketua II; Ketua III; Ketua dapat ditambah satu orang lagi apabila diperlukan Sekretaris; Sekretaris I; Sekretaris II; Sekretaris III; Sekretaris IV; Sekretaris I, Bendahara; Bendahara I, Bendahara II

Bidang-bidang:

1. Organisasi dan keanggotaan
2. Pendidikan dan kaderisasi
3. Sosial, kependudukan dan lingkungan hidup
4. Kesehatan
5. Dakwah

6. Ekonomi, koperasi, agrobisnis
7. Tenaga kerja
8. Hukum dan advokasi
9. Penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informasi
10. Hubungan di luar negeri dan pengembangan jaringan

#### Pasal 9

#### PIMPINAN KOORDINATOR DAERAH

Pimpinan Koordinator Daerah terdiri atas:

Ketua I; Ketua II; Sekretaris I; Sekretaris II; Bendahara; Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

#### PIMPINAN CABANG

Pimpinan Cabang terdiri atas:

1. Pimpinan Lengkap terdiri atas

Dewan Nasehat; Dewan Paka; Pimpinan Harian

2. Bidang Harian terdiri atas

Ketua; Ketua I; Ketua II; Sekretaris; Sekretaris II; Bendahara I; Bendahara II

(dapat ditambah sesuai yang diperlukan).

Bidang-bidang

1. Organisasi dan keanggotaan
2. Pendidikan dan kaderisasi
3. Sosial, kependudukan dan lingkungan hidup
4. Kesehatan
5. Dakwah
6. Ekonomi, koperasi, agrobisnis

7. Tenaga kerja
8. Hukum dan advokasi
9. Penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informasi
10. Hubungan di luar negeri dan pengembangan jaringan

#### Pasal 11

#### PIMPINAN ANAK CABANG

1. Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:

Penasehat; Pimpinan Harian; Bidang-bidang

2. Pimpinan Harian

Ketua I; Ketua II; Sekretaris I; Sekretaris II; Bendahara I; Bendahara II

Bidang-bidang

1. Organisasi dan keanggotaan
2. Pendidikan dan kaderisasi
3. Sosial, kependudukan dan lingkungan hidup
4. Kesehatan
5. Dakwah
6. Ekonomi, koperasi, agrobisnis
7. Tenaga kerja

( Pembentukan struktur untuk bidang disesuaikan dengan anak cabang masing-masing).

#### Pasal 12

#### PIMPINAN RANTING

Pimpinan Ranting terdiri atas:

- a. Ketua

- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Bidang-bidang
  - 1. Organisasi dan keanggotaan
  - 2. Pendidikan dan kaderisasi
  - 3. Sosial, kependudukan dan lingkungan hidup
  - 4. Kesehatan
  - 5. Dakwah
  - 6. Ekonomi, koperasi, agrobisnis
  - 7. Tenaga kerja

### Pasal 13

#### PIMPINAN ANAK RANTING

Pimpinan Anak Ranting terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota

## G. Program Kerja Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011-2016

Dalam melaksanakan program Muslimat NU memiliki beberapa landasan, yakni:

### 1. Landasan akidah

#### a. Q.S. Ali Imran ayat 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

#### b. Q.S. At- Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

### 2. Landasan Konstitusional

Undang- Undang Dasar 1945

### 3. Landasan Operasional

- a. Keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke 32
- b. Keputusan kongres ke XVI Muslimat NU di Lampung
- c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muslimat NU
- d. Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang relevan

Pokok- pokok program kerja PW Muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011-2016

Secara umum program kerja PW Muslimat NU merupakan program kerja yang telah ditetapkan langsung dari pusat. Pada pelaksanaannya program kerja sering bekerja sama atau koperatif atau kadang kala program kerja disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Program kerja:

#### 1. Bidang Organisasi

- a. Melakukan pendataan anggota Muslimat
- b. Penerimaan anggota baru muslimat
- c. Menertibkan dan membuat kartu bagi pengurus dan anggota muslimat di semua tingkatan
- d. Menertibkan dan melengkapi seragam (resmi dan lapangan) serta atribut muslimat NU
- e. Meningkatkan kualitas dan kreatifitas muslimat NU di semua tingkatan
- f. Melakukan konsolidasi organisasi secara interen
- g. Membuat struktur kepengurusan di semua tingkatan
- h. Penertiban papan nama organisasi

#### 2. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi

- a. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan serta life skill atau keterampilan di semua tingkatan
  - b. Mengadakan kursus-kursus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal atau daerah
  - c. Mengadakan pendidikan politik bagi pengurus dan anggota
  - d. Mengadakan pelatihan kepemimpinan di semua tingkatan
  - e. Mengadakan pelatihan bagi guru / ustadzah / PAUD / taman kanak-kanak / dan TPQ di semua tingkatan
  - f. Sosialisasi mengenai gender
3. Bidang Sosial, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup
- a. Menanam pohon untuk lingkungan disesuaikan dengan tingkatan
  - b. Memanfaatkan hari-hari besar nasional dan agama untuk kegiatan sosial dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu
  - c. Menggalakkan gerakan spontanitas bantuan bagi yang terkena musibah (kepedulian sosial)
  - d. Mengusahakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup
4. Bidang Kesehatan
- a. Mengikuti workshop tentang penguatan hak-hak reproduksi bagi perempuan
  - b. Peduli pendidikan, kesehatan bagi balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia
  - c. Mengadakan pengobatan gratis bekerja sama dengan pemerintah / instansi yang terkait
  - d. Meningkatkan partisipasi dalam usaha meneruskan program usaha sehat bahagia dan sejahtera

- e. Mendorong terciptanya budaya bangsa kearah hidup sederhana, bersih lahir dan batin melalui pengajian dan ceramah-ceramah
  - f. Memberikan penerangan tentang bahayanya narkoba dan seks bebas
  - g. Pendidikan, pelatihan bagi catin (calon pengantin) mengenai kespro (kesehatan reproduksi)
  - h. Memotivasi siswa didik untuk gerakan cuci tangan sebelum makan
  - i. Membentuk desa-desa yang PHBS
5. Bidang Dakwah
- a. Meningkatkan dakwah dalam arti yang luas yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwah, menumbuhkan kemandirian dan kesadaran hukum, mengatasi keterbelakangan Ilmu Pengetahuan Lingkungan
  - b. Meningkatkan penyuluhan tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Keluarga Berencana, penggunaan ASI, dan pendewasaan Usia Kawin
  - c. Meningkatkan Majelis Ta'lim
  - d. Meningkatkan peranan ikutan haji Muslimat NU dan Hidmat NU
  - e. Memasyarakatkan busana muslim dilingkungan warga nahdiyin khususnya masyarakat Islam pada umumnya
  - f. Meyelenggarakan keterampilan mengenai penyelenggaraan jenazah (fardu kifayah)
  - g. Mengadakan pelatihan kader da'iyah
  - h. Mengadakan pesantren ramadhan bagi ibu-ibu
  - i. Kajian tafsir al-Qur'an, fiqih, serta ibadah kemasyarakatan
  - j. Mengadakan tahlil, ratib, berjanzi
6. Bidang Ekonomi, Koperasi, dan Agrobisnis
- a. Mengadakan arisan anggota pada tiap-tiap bulan

- b. Mengadakan sumbangan yang tidak mengikat dalam rangka untuk keperluan organisasi dan modal usaha
  - c. Meghidupkan koperasi Muslimat NU di semua tingkatan
  - d. Melakukan usaha-usaha atau wiraswasta untuk membantu perekonomian keluarga
  - e. Mengadakan kursus keterampilan berbasis perempuan
  - f. Membuka usaha-usaha kecil dalam keluarga
7. Bidang Tenaga Kerja
- a. Melatih dan mendidik SDM untuk mandiri berusaha (wiraswasta)
  - b. Membuka peluang informasi kerja kepada masyarakat
  - c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja berbasis lokal

Muslimat NU sebagai organisasi perempuan Islam yang otonom berada dalam suatu wadah perjuangan berpaham *ahlusunnah wal jama'ah* melakukan program yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi sosial keagamaan yang senantiasa hadir untuk memberdayakan perempuan.

**BAB IV**  
**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN DAN**  
**ARGUMENTASI PENGURUS PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT**  
**NAHDLATUL ULAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERIODE 2011-2016**

**A. Pandangan Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan dan Sektor Publik**

Berdasarkan hasil Penelitian yakni mengadakan kuisisioner pertanyaan tertutup dan wawancara pertanyaan terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2013, maka dapat diketahui pandangan pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam dalam pemerintahan dan sektor publik.

1. Kuisisioner Pertanyaan Tertutup

1.1 Kepemimpinan perempuan dalam pandangan pengurus muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011–2016 mengenai pemerintahan dan sektor publik

1. Pertanyaan *pertama* syarat perempuan menjadi pemimpin (kepala Negara) adalah beriman, bertaqwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki kecakapan (*skill*), memiliki kemampuan dan dapat menjadi panutan. Dari pertanyaan diatas 95% atau 19 orang responden menjawab YA, perempuan boleh menjadi pemimpin atau kepala Negara (Presiden) dengan memiliki syarat, beriman, bertaqwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan juga menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Antara laki – laki dan perempuan memiliki hak – hak politik yang sama dengan laki – laki. Dengan demikian tidak ada alasan dengan agama untuk menolak kepemimpinan perempuan.

2. Pertanyaan *kedua*, perempuan boleh menjadi pemimpin (presiden) selama dalam pemerintahan tersebut berdasarkan musyawarah. Dari pertanyaan tersebut 90% atau 18 orang responden menjawab YA, artinya seluruh pengurus setuju atau boleh perempuan menjadi Presiden selama dalam menjalankan pemerintahan tersebut berdasarkan konsep musyawarah.
3. Pertanyaan *ketiga* perempuan boleh menjadi pemimpin ( Presiden ) karena tidak ada larangan dan perintah dalam syariat Islam. Dari pertanyaan diatas 100% atau semua responden menjawab YA, hal ini dikarenakan latar belakang sebagian besar responden berpendidikan agama islam. Dari data responden, 85% responden memiliki latar belakang pekerjaan dibidang agama islam. Perempuan boleh menjadi pemimpin atau Presiden karena didalam konsep Al – Qur'an tidak ada perintah ataupun larangan mengenai perempuan menjadi pemimpin.
4. Pertanyaan *keempat*, Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ( Presiden ) karena berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa: 34 dan Hadits Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan berjalan suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sebagian pengurus menjawab TIDAK, ada 11 orang responden atau 55% responden yang menjawab tidak. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin menurut pemahaman dalam perpektif hadist Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan berjalan suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sebagian pengurus menjawab ya, boleh perempuan menjadi pemimpin karena Asbabul

Wurud Hadist hanya ditujukan pada raja kisrah saja, satu orang pengurus menjawab tidak tahu mengenai hadist tersebut.

5. Pertanyaan *kelima* Kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba' mengisyaratkan dan mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23. 80% responden menjawab YA, artinya kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba' mengisyaratkan dan mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-naml ayat 23. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, seluruh pengurus menyatakan kebenaran bahwa kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba'.

## 1.2 Argumentasi (alasan) kepemimpinan perempuan dalam pandangan pengurus muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011–2016 mengenai pemerintahan dan sektor public

1. Pertanyaan *keenam* al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan diskriminasi yang menguntungkan satu pihak. Dari pertanyaan tersebut 85% atau 17 dari 20 responden menjawab YA, jika dianalisa dari jawaban pertanyaan pertama maka dapat disimpulkan semua pengurus pimpinan wilayah muslimat NU, menerima adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam al-Qur'an tanpa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dari kesimpulan tersebut juga terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab antara perempuan dan laki – laki yang sudah

ditentukan dalam syaria'at agama Islam. Artinya secara hakiki antara perempuan dan laki – laki memiliki perbedaan.

2. Pertanyaan *ketujuh* al-Qur'an mengakui adanya perbedaan adanya kesetaraan antara laki – laki dan perempuan (*gender*) karena menurut al-Qur'an laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Dari pertanyaan tersebut 90% atau 18 orang responden menyatakan TIDAK, jika di analisa dari pertanyaan kedua dapat disimpulkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU adalah antara laki – laki dan perempuan di hadapan Allah SWT adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah atau sebagai hamba Allah dimuka bumi. Antara laki – laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT tidak ada perbedaan terutama dalam fardu'ain. Dan juga laki – laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama sebagai khalifah dimuka bumi untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi.
3. Pertanyaan *kedelapan* laki - laki dan perempuan sama - sama berpotensi menjadi manusia yang paling bertakwa. Dari pertanyaan tersebut 100% atau semua responden menjawab YA, jika dianalisa dari pertanyaan ketiga, baik perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi pemimpin kecuali, tanggungjawab, kodrat, dan ketakwaanya kepada Allah SWT. Perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama sebagai hamba Allah SWT yang bertaqwa. Laki dan perempuan mendapat balasan / pahala sesuai dengan amalnya masing – masing. Laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk menuntut ilmu. Laki – laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang

sama dalam jabatan – jabatan strategis dalam pemerintahan dan publik.

4. Pertanyaan *kesembilan* laki-laki adalah pemimpin dalam segala sektor kehidupan karena laki – laki memiliki status kekuasaan lebih tinggi dari perempuan. Dari pertanyaan tersebut 75% responden atau 15 orang responden menjawab TIDAK, jika dianalisa dari pertanyaan keempat, semua pengurus wilayah Muslimat NU menolak kalau laki – laki menjadi pemimpin dalam segala sektor kehidupan kecuali didalam rumah tangga. Juga karena laki – laki tidak memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan (*superior*). Untuk menghilangkan asumsi dimasyarakat yang menyatakan laki – laki
5. Pertanyaan *kesepuluh* keadilan antara laki – laki dan perempuan (*gender*) tercipta karena konstruksi budaya dan sosial. Dari pertanyaan diatas 60% atau 12 orang responden menjawab YA, semua pengurus wilayah Muslimat NU, sudah responsip *gender* karena perbedaan laki – laki dan perempuan karena perbedaan fungsi dan peran akibat kontruksi budaya dan sosial dan keadilan gender antara laki – laki dan perempuan akibat kontruksi budaya dan sosial atau sebaliknya ketimpangan gender (ketidakadilan *gender*). Diskriminasi laki – laki dan perempuan dalam seluruh sektor kehidupan akibat konstruksi sosial budaya dan pola pikir serta tradisi adat istiadat yang ada dimasyarakat akibat konstruksi budaya.

## B. Argumentasi (Alasan) Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan dan Sektor Publik

### 2. Wawancara Pertanyaan Terbuka

#### 2.1 Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2016

Wawancara terbuka mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam baik dalam pemerintahan maupun sektor publik yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, diantaranya adalah:

*Pertama*, ibu Hj. Failasufah selaku ketua pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, mengatakan bahwa:

“Menurut saya kepemimpinan wanita diperbolehkan karena di dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama yang membedakan adalah ketaqwaan terhadap Allah SWT. Berbagai ulama Islam juga membolehkan wanita untuk memimpin namun wanita tidak boleh memimpin khilafah umat muslim seluruh dunia. Wanita juga bisa memimpin rakyatnya dengan adil dan sejahtera.”<sup>2</sup>

*Kedua*, ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I selaku wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“ Menurut pemahaman kami Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 bahwasanya laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi perempuan maka harus dihormati dengan menghargai dan mengakui kelebihanannya, walaupun perempuan mempunyai juga kelebihan.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ibu Failasufah, (Ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 26 Juni 2013.

<sup>3</sup>Ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I, (wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Agustus 2013.

*Ketiga*, ibu Ir. Lisdanita selaku sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 menyatakan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” jelas bahwa kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan tidak prioritas”<sup>4</sup>

*Keempat*, ibu Hj. Rika Diana selaku ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana dijelaskan dalam surat at-taubah ayat 71, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Dengan demikian, perempuan pun memiliki tanggung jawab di bidang amr maruf dan nahi munkar.”<sup>5</sup>

*Kelima*, ibu Dra. Hasanah A. Basrie selaku anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 34 menerangkan kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah dan tidak ada yang menyatakan bahwa perempuan wajib mencari nafkah. Jadi jika ada ibu rumah tangga seorang wanita karir, diharapkan ia masih memprioritaskan keluarga daripada karirnya”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>ibu Ir. Lisdanita (sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Agustus 2013

<sup>5</sup>Ibu Hj. Rika Diana, (Ketua ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Agustus 2013.

<sup>6</sup>Ibu Dra. Hasanah A. Basrie (anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 24 Agustus 2013

*Keenam*, ibu Ermawati selaku ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pada surat QS. At-Tahrim: 10 bahwa tidak ada kekuasaan bagi keduanya (istri Nuh dan istri Luth) atas kedua suami mereka. Akan tetapi, kekuasaan itu justru hak Nabi Nuh dan Nabi Luth atas mereka berdua. Wanita bagaimanapun juga tidak bisa menyamai laki-laki, dan selamanya tidak mungkin mengunggulinya. Di antara kekhususan laki-laki yang lain adalah bahwasanya kenabian dan kerasulan itu hanya diberikan kepada mereka, tidak kepada kaum perempuan.”<sup>7</sup>

*Ketujuh*, ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan selaku sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Yang saya tahu di dalam Al-Quran perempuan dilarang iri dan dengki terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada laki-laki, seperti yang tertera pada Al-Quran surat An-nisa ayat 32 *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*<sup>8</sup>

*Kedelapan*, ibu Hj. Badrul Huda, BA selaku wakil ketua II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Diriwayatkan Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, *“Ummu Salamah Radhiallahu ‘anha pernah bertanya, “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, apakah kaum laki-laki saja yang diperkenankan mengikuti perang, sedangkan kami tidak, padahal kami berhak mendapatkan separuh bagian dari warisan?”* (HR. Imam Thabari, Ahmad, Hakim dan yang lainnya). Dari hadist tersebut kita maknai bahwa peran wanita hanya berada dibelakang laki-laki menjaga kehormatan demi suaminya”<sup>9</sup>

<sup>7</sup>ibu Ermawati (ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 27 Agustus 2013

<sup>8</sup>ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan (sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 7 Juli 2013

<sup>9</sup>ibu Maisyaroh, (wakil ketua III pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Agustus 2013

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara terbuka dengan beberapa pengurus diatas mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam dalam dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU Sumsel mengenai kepemimpinan perempuan menurut konsep Al-Quran bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin karena Al-Quran menjelaskan kedudukan wanita dan laki-laki itu sama yang membedakan adalah tanggungjawab, kodrat dan ketaqwaan kepada Allah swt. Hal ini terdapat dalam Al-Quran antara lain: surat Al-Hujurat ayat 13, Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10, Al-Quran surat Al-Ahqof ayat 19, Al-Quran surat An-Nahlayat 97, Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 30. Pandangan pengurus Muslimat NU Sumsel tentang konsep kepemimpinan perempuan menurut hadis Abi Bakrah terjadi perbedaan pandangan dalam memahami hadist ini separuh lebih pengurus menyatakan larangan perempuan menjadi presiden (kepala negara). Sisanya menyatakan hadist ini tidak berlaku umum hanya untuk raja Kisrah saja (Asbabul Wurud Hadist) artinya perempuan boleh menjadi presiden (kepala negara).

## 2.2 Argumentasi (alasan) Kepemimpinan Perempuan menurut Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011-2016 mengenai Sektor Publik dan Pemerintahan

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sector publik penulis mengadakan wawancara terbuka kepada pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 diantaranya adalah:

*Pertama*, ibu Failasufah selaku ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, mengatakan bahwa:

“Di antara hukum-hukum yang menjadi kekhususan bagi laki-laki adalah, bahwa merekalah penanggung jawab rumah, dengan memberikan perlindungan dan perhatian, menjaga keutamaan-keutamaannya, mencegah kehinaan-kehinaannya, dan melindungi rumah tangga dari segala ancaman bahaya. Dan, mereka juga sebagai penanggung jawab, dengan menghidupi dan memberi nafkah bagi keluarganya beserta semua yang berada di dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala, Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. An-Nisa: 34)”<sup>10</sup>

*Kedua*, ibu Dra. Hj. Rusyda Gasim, M.H.I selaku wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan seorang perempuan sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, yaitu pemimpin sebuah negeri Saba’ yang bernama Ratu Balqis. Dengan segala kemampuannya Ratu Balqis dapat memimpin rakyatnya dengan baik sehingga negeri tersebut makmur dan sejahtera. Bahkan pada akhirnya Nabi Sulaiman tertarik memperistrikan sang ratu dan mempersatukan kedua kerajaan tanpa merendahkan kedudukan Balqis sebagai Ratu.”<sup>11</sup>

*Ketiga*, ibu Ir. Lisanita selaku sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 menyatakan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

<sup>10</sup>Ibu Failasufah, (Ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 26 Juni 2013.

<sup>11</sup>ibu Dra. Hj. Rusyda Gasim, M.H.I, (wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Juli 2013.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” jelas bahwa kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan tidak prioritas”<sup>12</sup>

*Keempat*, ibu Hj. Rika Diana selaku ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan Indonesia. Kejadian ini mengingatkan kita pada beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum Sidang Umum MPR tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam itu telah “merevisi” pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan kepemimpinan wanita dalam konteks negara.”<sup>13</sup>

*Kelima*, ibu Dra. Hasanah A. Basrie selaku anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Ulama di Indonesia pada awalnya sebenarnya juga menolak keberadaan perempuan pada urusan publik, apa lagi sebagai pemimpin baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti presiden. Padahal bila dilihat dari hasil sensus penduduk yang terakhir menunjukkan sekitar lebih dari 50 % penduduk Indonesia terdiri dari kaum perempuan. Hanya saja mereka mayoritas dalam kuantitas tetapi minoritas dalam kualitas. Barangkali itulah salah satu penyebabnya sehingga ulama Indonesia tidak menerima kepemimpinan perempuan (kepala negara).”<sup>14</sup>

*Keenam*, ibu Ermawati selaku ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pandangan ulama Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa perubahan itu sangat drastis di zaman reformasi, karena sebelumnya ulama tidak mengizinkan seorang

---

<sup>12</sup>ibu Ir. Lisdanita (sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Juli 2013

<sup>13</sup>Ibu Hj. Rika Diana, (Ketua ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Juli 2013.

<sup>14</sup>Ibu Dra. Hasanah A. Basrie (anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 24 Juni 2013

perempuan untuk duduk sebagai kepala negara (presiden). Namun dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5, maka dengan sendirinya kepemimpinan perempuan sudah dianggap sah-sah saja di mata ulama. Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga “memaksa” ulama untuk menerima perempuan menjadi presiden.”<sup>15</sup>

*Ketujuh*, ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan selaku sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pemilihan kepala negara sama artinya dengan memilih Khalifah pada masa awal kematian Nabi dahulu, semuanya harus tetap mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh Islam. Didalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara, agama dan politik atau agama dan kepemimpinan, semuanya satu kesatuan. Karena hidup kita ini diatur oleh agama dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang terbesar. Hidup adalah tingkah laku, dan tingkah laku dibatasi oleh norma agama termasuk tingkah laku dalam berpolitik.”<sup>16</sup>

*Kedelapan*, ibu Badrul Huda selaku wakil ketua I pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Wanita boleh memimpin Pemerintahan berdasarkan dalil ratu Balqis sebagai pemimpin kerajaannya. Padahal bolehnya Ratu Balqis memimpin negeri Saba’ tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, karena penetapan hukum tersebut berdasarkan dalil *Syar’u man qoblana syar’ullana* (syariat umat terdahulu -umat sebelum Nabi Muhammad Saw adalah syariat bagi kita-umat Muhammad Saw). Dalil ini tidak bisa dipakai sebagai dalil dalam penetapan hukum syara’, karena merupakan syariat sebelum nabi Muhammad Saw. Hal ini sebagaimana syariat nabi yang lain sudah tidak berlaku bagi umat Muhammad Saw, misalnya haramnya lemak sapi dan kambing bagi umat nabi Musa (orang Yahudi), tapi bagi umat Muhammammad (orang Islam) hukumnya mubah”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>ibu Ermawati (ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 27 Juli 2013

<sup>16</sup>ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan (sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 7 juli 2013

<sup>17</sup>ibu Badrul Huda, ( ketua II pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Juni 2013

*Kesembilan*, ibu Hj. Choiriyah selaku ketua 1 pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Didalam al-Qur’an tidak satupun ayat yang melarang perempuan jadi pemimpin, bahkan sebaliknya al-Qur’an secara spesifik menuturkan kisah sukses Ratu Balqis dalam memimpin Negara. Dapat diduga, setidaknya kita boleh berpikir, maksud Tuhan untuk menginformasikan / mengisahkan ini adalah untuk mengungkapkan bahwa perempuan bisa memimpin. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan menurut saya perlu dicari ruang yang seluas – luasnya. Dalam pandangan hadist menurut Abi Bakrah hadist tersebut bersifat kasuistik, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang tidak akan Berjaya, beruntung bangsa yang diperintah perempuan berhubungan dengan peristiwa bangsa Persia yang telah mengangkat anaknya perempuan sebagai Raja Kisrah (Bahran binti Syiruyah Ibn Kisrah) sebagai penguasa kisrah menggantikan ayahnya. Hadist ini diungkapkan Nabi dalam konteks Khabariyah semata, bukan dalam kerangka legitimasi hukum, objek pembicaraan masih tertuju kepada Putri kisrah tersebut, bukan kepada seluruh perempuan, karena dalam kenyataannya ada perempuan – perempuan yang berhasil memimpin negaranya karena ia memiliki kredibilitas.”<sup>18</sup>

*Kesepuluh*, ibu Ratna Dewi selaku Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Menurut saya berdasarkan hadist Abi Bakrah sangat setuju perempuan menjadi pemimpin apabila mempunyai keahlian dan kemampuan yang bertujuan untuk membuat organisasi lebih baik maka boleh – boleh saja. Menurut Dewi menunjukkan bahwa pemimpin itu bisa dipimpin oleh wanita baik dalam organisasi ataupun pemerintahan, apabila wanita tersebut memiliki keahlian atau dianugerahi oleh Allah SWT keahlian dan kemampuan yang besar untuk memimpin. Pro dan kontra mengenai Presiden perempuan itu adalah wajar menurut saya Presiden perempuan boleh – boleh saja”<sup>19</sup>

*Kesebelas*, ibu Hj. Eli Siti Zailia selaku Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup>Ibu Choiriyah (ketua I pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 01 Juli 2013

<sup>19</sup>Ibu Ratna Dewi (Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 05 Juli 2013

“Kepemimpinan perempuan perlu penguatan terhadap sektor penyadaran kaum perempuan tentang peran besarnya menghasilkan generasi yang berkualitas. Hal ini perlu diawali dengan mempersiapkan calon ibu atau calon ayah yang betul – betul memahami perannya untuk mendidik anak – anaknya secara benar, memahami tentang tanggungjawabnya menghasilkan generasi yang berkualitas sebab, kita masih banyak melihat para perempuan yang lengah terhadap proses penyiapan generasinya. Saya pikir organisasi perempuan dapat lebih melebarkan sayapnya pada sektor ini. Menurut saya Muslimat Nahdhatul Ulama telah banyak berperan, baik dalam pemerintahan dan sektor publik. Muslimat Nahdhatul Ulama sebagai sebuah organisasi dengan sejumlah pengurus dan anggotanya telah berkiprah membantu pelaksanaan program – program pemerintah, dibidang pendidikan dengan PAUD, TK, Bidang Kesehatan dan Dakwah dalam sektor publik, seperti halnya Muslimat Nahdhatul Ulama lebih mengekskiskan dirinya, karena peran Muslimat Nahdhatul Ulama sebelumnya begitu terlibat.”<sup>20</sup>

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara tertutup dan terbuka dengan beberapa pengurus diatas terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik, boleh perempuan menjadi pemimpin berdasarkan konsep al – Quran karena tidak ada perintah ataupun larangan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan kalau dilihat dari al – Quran surat An – Nisa Ayat34 mengenai Asbabun Nuzulnya berbicara tentang kepemimpinan laki – laki dalam hal rumah tangga, bukan dalam hal pemerintahan dan sektor publik. Dalam perpektif hadist yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Sebagai hamba Allah SWT perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama sebagai pemimpin kecuali berbeda dalam hal tanggungjawab, kodrat, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>20</sup>Ibu Eli Siti Zahlia (Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 10 Juli 2013

- b. Keberhasilan perempuan sebagai pemimpin baik dalam pemerintahan dan sektor publik telah terbukti dalam sejarah dimulai pada masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin terbesar umat manusia yang pernah diutus Allah SWT dimuka bumi. Oleh karena itu beliau diberi gelar *Syaikhul Basyar* (penghulu umat manusia) beliau pemimpin besar Nabi dan Rasul Allah SWT mempunyai akhlak yang sempurna dan mulia. Keberhasilan perempuan dalam memimpin dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 menceritakan Ratu Balqis sebagai pemimpin yang berhasil dan dilahirkan mampu mensejahterakan rakyatnya. Perempuan juga telah memberikan bukti nyata suksesi kepemimpinan mereka yang diabadikan dalam sejarah sampai dengan sekarang, banyak jabatan publik yang digeluti oleh perempuan dan kemungkinan mereka diakui dalam sektor publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua responden (100%), pandangan pengurus wilayah Muslimat Nahdhatul Ulama Sumatera Selatan periode 2011-2016 menyatakan, membolehkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan konsep Al – Quran karena tidak ada perintah ataupun larangan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan kalau dilihat dari Al – Quran surat An – Nisa Ayat34 mengenai Asbabun Nuzulnya berbicara tentang kepemimpinan laki – laki dalam hal rumah tangga, bukan dalam hal pemerintahan dan sektor publik. Berdasarkan hadist Abi Bakrah pengurus menyatakan 55% hadist tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Sebagai hamba Allah SWT perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama sebagai pemimpin kecuali berbeda dalam hal tanggungjawab, kodrat, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Berdasarkan argumentasi pengurus pimpinan wilayah Muslimat NU syarat kepemimpinan perempuan antara lain ketaqwaan, integritas, memiliki akhlak, ilmu pengetahuan, musyawarah, memiliki keterampilan (*skill*) dan profesionalitas.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melaksanakan pembuatan kebijakan dalam hal kesetaraan gender khususnya kepada hak kaum perempuan mengenai pekerjaan, politik, dan sebagainya. Dan pemerintah harus berupaya mengumpulkan tokoh masyarakat seperti ulama, pendeta, orang memiliki kendali terhadap masyarakatnya. Untuk upaya pensosialisasian antara kesinambungan antara kesetaraan gender maupun dengan ajaran agama yang mereka anut, dalam upaya pembebasan dari budaya patriarki.
2. Perempuan boleh menjadi seorang pemimpin asalkan memiliki kompetensi sebagai perempuan sholihah (amanah, taqwa, jujur, bertanggungjawab, semangat pengabdian terhadap umat, berakhlak mulia).
3. Perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan perempuan tersebut telah memenuhi ketentuan/ketetapan/persyaratan yang berlaku sebagai pemimpin dan mampu memimpin dan yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## REFERENSI

- AD/ ART Muslimat NU.2006- 2011. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU*. Jakarta: Penerbit Pimpinan Pusat Muslimat NU.
- Afza, Nahati,t.t. *Mempersoalkan Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al- As Qalany, Hafizd Ibnu Hajar. 1992. *Bulughul Maram ( Jilid III ) Terjemahan*. A. Hasan Rineka.
- Al- Akkad. 1984. *Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al- Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. 1989. Surabaya: Mahkota.
- Anshori, Dadang S dkk. (ed.). 1997. *Membincangkan Feminisme :Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung :Pustaka Setia.
- Asror, Musthagfiri. 1933. *Emansipasi Wanita dalam Syariat Islam*. Semarang: CV. Bulan Bintang.
- As- Salus, Ali. 1997. *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan dan Zamaksyari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Boy Rafli Amar, Bactiar, Veithzal Rivai. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Baidowi Ahmad. 2011. *Memadang Perempuan Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*. Bandung: Marja.
- Effendi, Muchtar. 1997. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- G. H. A. Juynboll. 1999. *The Autenticity Of in Literature Dis Cussion in Modrn Tigypt, Diterjemahkan Ilyas Hasan, Judul Kontroversi Hadis- Hadis di Mesir*. Bandung: Mizan cet ke-1.
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Ja'far, Qasim, M. Anis. 2002. *Terjemah Ikhwan Fauzi Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*.
- Jarmanto. 1983. *Kepemimpinan Sebagai Ilmu dan Seni*. Yogyakarta: Liberty
- Kartono, Kartini. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Khafifah Indar Parawansa. 2006. *Laporan Pertanggung Jawaban Muslimat NU, Kongres ke- XV*. Jakarta: Tim Pimpinan Pusat Muslimat NU
- Locke, E.A. 1997. *Esensi Kepemimpinan (terjemahan)*. Jakarta: Mitra Utama.

- Lexy, Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki. 2000. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Perempuan*, dalam *Informasi : Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*. No.3 Th.XXIX.
- Mas'udi, Masdar Farid. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung : Mizan.
- Mas'udi, Masdar Farid. 1996. Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning, dalam Mansour Fakih et al, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Muhammad Toha, Musthafa. 1997. *Model Kepemimpinan dalam Amal Islami Studi Tokoh Pergerakan Islam Kontemporer, Diterjemahkan oleh Musthafa Maufur*. Jakarta: Robani Pers.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Mundir. 2010. *Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi tafsir Al-Manar)*. Semarang: Walisongo Press.
- Muthahari, Murthado. 1991. *Imamah dan Khilafah, Diterjemahkan oleh Satrio Pinanditu*. Jakarta: CV. Firdaus.
- Muthahari, Morteza. 1986. *Wanita dan Hak- Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Mernissi, Fathimah. 1994. *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita dalam Al- Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan diterjemahkan oleh Hautian Silawati*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasif, Fatimah Umar. 2003. *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam di Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata dan Kendan Du'ali*. Jakarta: Cendikia.
- Narbuko, Choilid. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sa'dullah, Assa'di. 1996. *Hadis- Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta : LKIS.
- Suninda dan Widiyanti. 1988. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim PP Muslimat Pusat. 2006. *Buku Panduan Kongres ke- XV*. Jakarta
- Tim PP Muslimat Pusat. 2006. *Buku Materi Kongres ke-XV*. Jakarta.
- Tim PW Muslimat SUM-SEL. *Buku Panduan Konferensi Wilayah ke- XII*. Palembang.

- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trimono, Soejono. 1986. *Analisis Kepemimpinan*. Bandung: Angkasa.
- Umar, Nazaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta. Para Madinah.
- Yanggo, Huzaemah T. 2001. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al- Mawardi Prima.
- Yusuf Al- Qardhawi. 2001. *Ummatuna Baina Qarnain, Diterjemahkan Yoga Izza Pratama dkk Judul Asli, Ummat Islam Menyongsong Abad ke- 21: Sebuah Catatan Akhir Abad ke-20 dan Proyeksi Abad*. Solo: Intermedia
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta. PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Zaitunah, Subhan. 2004. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.
- Ziyadah, Muhammad Asma'. 2001. *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al –Kautsar.

## **LAMPIRAN:**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Pengantar**

Item pertanyaan dalam wawancara ini digunakan untuk memperoleh pandangan pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan Periode 2011-2016 mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan dan Sektor Publik. Jawaban yang anda berikan terhadap pertanyaan berikut ini akan dipublikasikan untuk laporan ilmiah dalam rangka penulisan tesis

#### **B. Identitas Responden**

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Jabatan di PW Muslimat NU Sumsel :  
Pendidikan akhir :  
Alamat rumah :  
Telephone/Nomor HP :

#### **C. Petunjuk Jawaban**

Jawablah sesuai item pertanyaan dibawah ini dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dan rinci sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anda selama menjadi pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan Periode 2011 – 2016. Dan untuk wawancara tertutup jawablah pertanyaan dengan cara silang pada jawaban yang anda anggap benar.

## **LAMPIRAN :**

### **D. Kuisisioner Pertanyaan Tertutup**

1. Syarat perempuan menjadi pemimpin (kepala Negara) adalah beriman, bertaqwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki kecakapan (skill), memiliki kemampuan dan dapat menjadi panutan.  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidaktahu
2. Perempuan boleh menjadi pemimpin ( presiden) selama dalam pemerintahan tersebut berdasarkan musyawarah  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidaktahu
3. Perempuan boleh menjadi pemimpin ( presiden ) karena tidak ada larangan dan perintah dalam syariat Islam  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidaktahu
4. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ( presiden ) karena berdasarkan Qur'an QS: An- Nisaa:34 dan Hadits Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan berjalan suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidaktahu
5. Kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba' mengisyaratkan dan mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran QS : An-Namalayay : 23  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidak tahu
6. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan diskriminasi yang menguntungkan satu pihak.  
a. Ya                                      b. Tidak                                      c. Tidaktahu

7. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan adanya kesetaraan antara laki – laki dan perempuan (gender) karena menurut al-Qur'an laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan.
  - a. Ya                              b. Tidak                              c. Tidaktahu
8. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi manusia yang paling bertakwa
  - a. Ya                              b. Tidak                              c. Tidaktahu
9. Laki-laki adalah pemimpin dalam segala sector penghidupan karena laki – laki memiliki status kekuasaan lebih tinggi dari perempuan.
  - b. Ya                              b. Tidak                              c. Tidaktahu
10. Keadilan antara laki – laki dan perempuan (gender) tercipta karena konstruksi budaya dan sosial.
  - c. Ya                              b. Tidak                              c. Tidaktahu

#### **E. Wawancara Pertanyaan Terbuka**

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam ?
2. Apa tujuan kepemimpinan perempuan menurut Islam?
3. Bagaimana pendapat ibu mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin perempuan?
4. Bagaimana pemahaman dan pendapat ibu mengenai dalil al-Qur'an surah an-Nisa' ayat: 34 ?
5. Bagaimana pemahaman dan pandangan ibu mengenai dalil al-Qur'an surah an-Namlayat: 23 ?
6. Bagaimana pemahaman dan pendapat ibu mengenai hadits Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan Berjaya suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan?

7. Menurut ibu jabatan apa saja yang pantas dijabat oleh perempuan?
8. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya Pro dan Kontra mengenai Presiden perempuan?
9. Ibu sebagai Organisasi perempuan yang berbasis keislaman apa saja yang masih harus diperjuangkan mengenai kepemimpinan perempuan?
10. Bagaimana peran Muslimah NU dalam pemerintahan dan sektor publik?

**LAMPIRAN :**  
**DAFTAR RESPONDEN**

1. A. Nama : Dra. Hj. Failasufah  
B. Tempat / TanggalLahir / Umur : Kudus, 10 Mei 1951 / 62 tahun  
C. Pendidikan : S1 IAIN Jogja  
D. Pekerjaan : PensiunanPengawas DEPAG  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Ketua  
F. Telephone / Nomor HP : 360649 / 08163294307  
G. Alamat : Jl. Ariodillah No. 2361 Km. 3,5 Palembang
2. A. Nama : Dra. Hj. Choiriyah Nasir, M.HUM  
B. Tempat / TanggalLahir/Umur : Palembang, 13 Februari 1962 / 49 tahun  
C. Pendidikan : S2 PascaSarjana IAIN Raden Fatah Palembang  
D. Pekerjaan : DosenFakultasDakwah  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Ketua I  
F. Telephone / Nomor HP : 62813627858552  
G. Alamat : 3 Ulu Laut, Lrg. Jaya Laksana No. 400 RT. 8 Plg
3. A. Nama : Hj. Badrul Huda BA  
B. Tempat / TanggalLahir/Umur : 27 Februari 1949 / 64 tahun  
C. Pendidikan : Sarjana Muda IAIN Raden Fatah  
D. Pekerjaan : Pensiunan Guru Mts. 1 Plg  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Ketua II  
F. Telephone / Nomor HP : 0711 7385252  
G. Alamat : Jl. Banjai No. 542 Rt. 8 Kemang ManisBukit Besar Plg
4. A. Nama : Hj. Rusyda Gasim, M.Hi  
B. Tempat / TanggalLahir/Umur : Palembang, 16 September 1957 / 56 tahun  
C. Pendidikan : S2 PascaSarjana IAIN Raden Fatah Palembang  
D. Pekerjaan : Kepegawaian IAIN Raden Fatah Palembang  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Ketua IV  
F. Telephone / Nomor HP : 08127392199  
G. Alamat : 3 Ilir Lrg. Kenanga Rt. 37 No. 65 Palembang
5. A. Nama : Dra. Hj. Sukarma Wati  
B. Tempat / Tanggal Lahir / Umur : Pagaram, 1 November 1951 / 62 tahun  
C. Pendidikan : S1 IAIN Raden Fatah  
D. Pekerjaan : Pensiunan Guru Mts. Negeri 1 Plg  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Ketua V  
F. Telephone / Nomor HP : 085384878777

- G. Alamat : Jl. Bangau No. 8 Rt. 29 Plg
6. A. Nama : Ir. Lisdanita  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 27 Juli 1968 / 45 tahun  
 C. Pendidikan : S1 Unsri  
 D. Pekerjaan : PNS BKKBN Kota Palembang  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Sekretaris  
 F. Telephone / Nomor HP : 081368524468  
 G. Alamat : Perum. OPI Blok. AG No. 6 Plg
7. A. Nama : Dra. Hj. Nurmala Haq, M.Hi  
 B. Tempat / Tanggal Lahir/ Umur : Sakatiga, 6 Desember 1959 / 54 tahun  
 C. Pendidikan : S2 Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang  
 D. Pekerjaan : DosenFak. Syari'ah IAIN Raden Fatah  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Sekretaris I  
 F. Telephone / Nomor HP : 08127338953  
 G. Alamat : Jl. Inspektur Marzuki No. 54 Rt. 04 Rw. 09 Palembang
8. A. Nama : Dra. Hj. Fatimah Nurjanah  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 20 November 1966 / 47 tahun  
 C. Pendidikan : S1 Tarbiyah IAIN Raden Fatah Plg  
 D. Pekerjaan : Guru TK Muslimat NU  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Sekretaris II  
 F. Telephone / Nomor HP : 0819488098  
 G. Alamat : Jl. St. Muhammad Mansyur No. 7A Rt. 17 32 ilirPlg
9. A. Nama : EizaMaulidiya, Amd  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 8 Januari 1983 / 30 tahun  
 C. Pendidikan : D3 Akuntansi Polsri  
 D. Pekerjaan : Wiraswasta  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Sekretaris III  
 F. Telephone / Nomor HP : 6281367796810  
 G. Alamat : Perum. Graha Nusa Pesona Blok. A 16 Rt. 86 Rw. 05 Plg
10. A. Nama : Hj. Asnizar  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 8 Februari 1957 / 56 tahun  
 C. Pendidikan : SLTA  
 D. Pekerjaan : IbuRumahTangga  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Bendahara  
 F. Telephone / Nomor HP : 081373445738

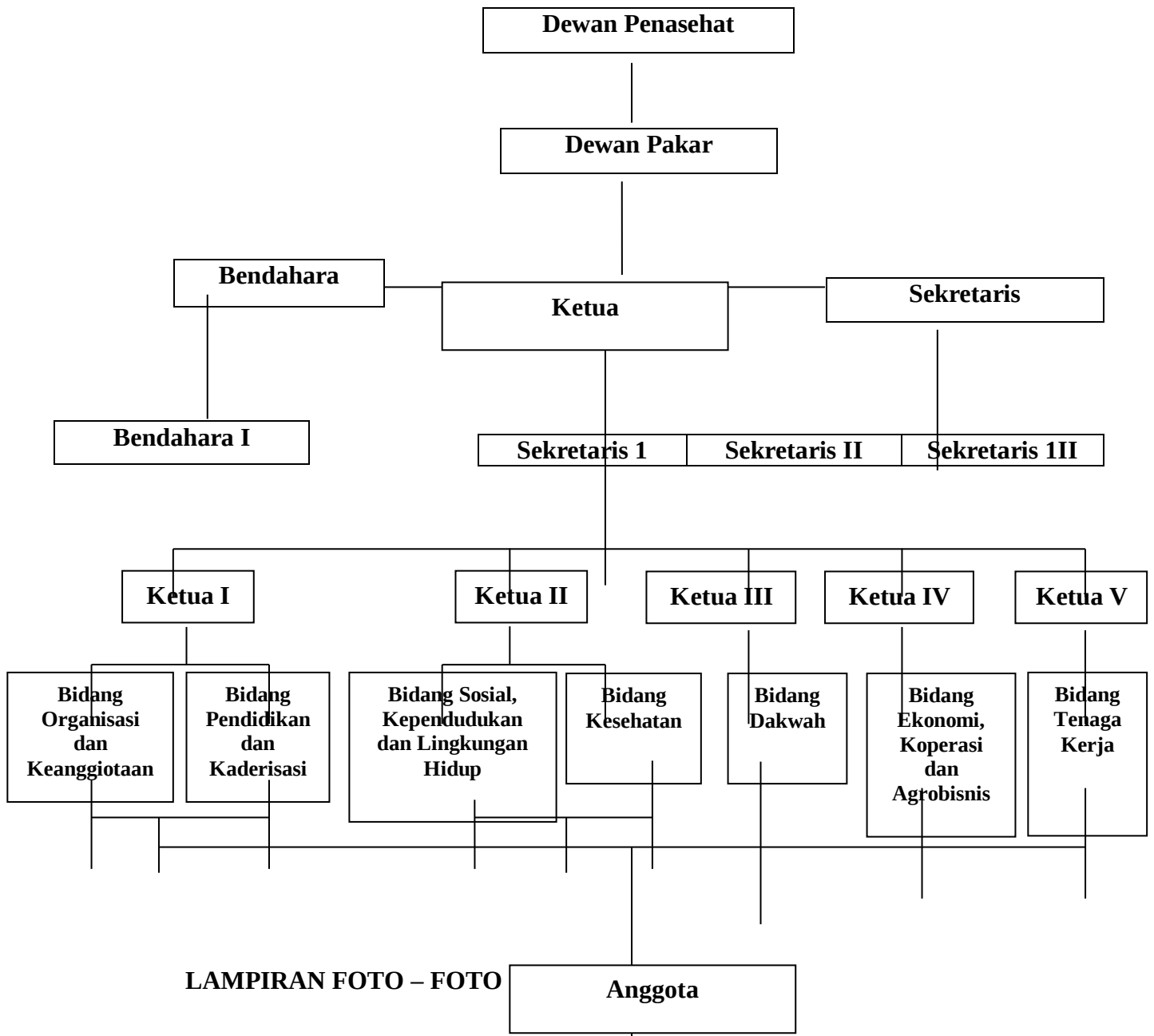
- G. Alamat : Jl. KelapaGading B7 Rt. 34 Rw. 10 Km. 9 Plg
11. A. Nama : Hj. Samsini Isnin, S.Pd  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Bailangu, 20 April 1956 / 57 tahun  
 C. Pendidikan : S1 BK PGRI  
 D. Pekerjaan : Guru SMK NurulIman Palembang  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Bendahara I  
 F. Telephone / Nomor HP : 085273706812  
 G. Alamat : Jl. CempakaPutih Rt. 47 Rw. 04 Kebun Bunga Km. 9 Plg
12. A. Nama : Hj. Rika Diana, SH. M.HUM  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : LubukLinggau, 12 Januari 1966 / 47 tahun  
 C. Pendidikan : S2  
 D. Pekerjaan : Kepegawaian IAIN Raden Fatah Plg  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Bidang Organisasi dan Keanggotaan  
 F. Telephone / Nomor HP : 085764861263  
 G. Alamat : Jl. Mayor Mahidin No. 87 Rt. 2 Sekip Plg
13. A. Nama : Dra. Hj. Ratna Dewi Zainuri, M.Pdi  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 23 November 1968 / 45 tahun  
 C. Pendidikan : S2  
 D. Pekerjaan : Guru MAN 2 Palembang  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : Bidang Pendidikan dan Kaderisasi  
 F. Telephone / Nomor HP : 081377575551  
 G. Alamat : Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Durian No. 2600 Rt. 4/9 Plg
14. A. Nama : Dra. Ermawati  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Baturaja, 8 November 1966 / 47 tahun  
 C. Pendidikan : S1 Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Plg  
 D. Pekerjaan : PNS Guru Mts. Negeri 1 Plg  
 E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : BidangSosial, Kependudukand an Lingkungan Hidup  
 F. Telephone / Nomor HP : 081367246247  
 G. Alamat : Jl. Kolonel H. burlian Km. 9 Plg
15. A. Nama : Hj. Asnawati Mal'an Bsc. S.Ag  
 B. Tempat / TanggalLahir/ Umur : Palembang, 21 Juni 1955 / 58 tahun

- |                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C. Pendidikan                       | : S1                                               |
| D. Pekerjaan                        | : Pensiunan PNS Kesehatan                          |
| E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel | : BidangKesehatan                                  |
| F. Telephone / Nomor HP             | : 08127813946                                      |
| G. Alamat                           | : Jl. Kebun Bunga Rt.47 Rw.04 No. 1759 A Km. 9 Plg |
- 
- |                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 16. A. Nama                         | : Hj. Komala Sari, S.Pdi                                  |
| B. Tempat / Tanggal Lahir/ Umur     | : Bengkulu, 21 Juni 1953 / 60 tahun                       |
| C. Pendidikan                       | : S1 Univ. Muhammadiyah Plg                               |
| D. Pekerjaan                        | : Pensiunan Guru Mts. Negeri 1 plg                        |
| E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel | : Bidang Dakwah                                           |
| F. Telephone / Nomor HP             | : 08127893987                                             |
| G. Alamat                           | : Jl. Pangeran Sidoing Lautan 36 ilir Lr.Muda Sepakat Plg |
- 
- |                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 17. A. Nama                         | : Dra. Hj. Eli Ismiani                                |
| B. Tempat / TanggalLahir/ Umur      | : Palembang, 25 Juni 1968 / 45 tahun                  |
| C. Pendidikan                       | : S1                                                  |
| D. Pekerjaan                        | : PNS Guru SMP Negeri 13 Plg                          |
| E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel | : Bidang Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis             |
| F. Telephone / Nomor HP             | : 08127881675                                         |
| G. Alamat                           | : Jl. RambutanDalamlr. Tj. Burung 3 No. 1483 Rt.25/10 |
- 
- |                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 18. A. Nama                         | : Dra. Eli Siti Zailiah, M.Ag                   |
| B. Tempat / Tanggal Lahir/ Umur     | : Musi Banyuasin, 12 September 1966 / 47 tahun  |
| C. Pendidikan                       | : S2 IAIN Aceh                                  |
| D. Pekerjaan                        | : DosenFak. Syari'ah IAIN Raden Fatah Plg       |
| E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel | : BidangPendidikandanKaderisasi                 |
| F. Telephone / Nomor HP             | : 081367950526                                  |
| G. Alamat                           | : Perum. Puspa Sari Blok. D No. 1 KentenLaut BA |
- 
- |                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 19. A. Nama                         | :Dra. Hasanah Abasri                            |
| B. Tempat / TanggalLahir/ Umur      | :Baturaja, 24 Januari 1956 / 57 tahun           |
| C. Pendidikan                       | :S1 IAIN Raden Fatah Palembang                  |
| D. Pekerjaan                        | :PNS PensiunanKepegawaian IAIN Raden Fatah Plg  |
| E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel | :Bidang Organisasi dan Keanggotaan              |
| F. Telephone / Nomor HP             | :08127844245                                    |
| G. Alamat                           | :Komp. Perumdam Gapu III Blok. D 2 Rt.21/05 Plg |

20. A. Nama : Sri Aliyah, S.Ag, M.Pd.i  
B. Tempat / Tanggal Lahir/ Umur : Terusan Kab. Musi Rawas/ 9 Juli  
1974 / 39 tahun  
C. Pendidikan : S2  
D. Pekerjaan : DosenFak. Ushuluddindan  
Pemikiran Islam  
E. Jabatan di PW Muslimat NU SumSel : BidangOrganisasidan  
Keanggotaan  
F. Telephone / Nomor HP : 0813 7780 0659  
G. Alamat : Jl. Kaur Blok. A – 05

LAMPIRAN :

**STRUKTUR SUSUNAN PENGURUS  
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU PROPINSI  
SUMATERA SELATAN PERIODE 2011 – 2016**





**Foto Wawancara dengan Ketua Hj. Failahsufah**



**Foto Wawancara Dengan Wakil Ketua II**



**Foto Rapat Kerja PW Muslimat NU Sumatera Selatan**



**Foto Pelatihan Kepemimpinan PW Muslimat NU Sum-Sel**



**Foto Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU Sum-Sel**



**Foto Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Pagaram**



**Foto Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU Sumsel**



**Foto Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU Sumsel**



**Foto Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU Sum-Sel**



**Foto Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU Sumsel**

## BAB II

### TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

#### 5. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Dilihat dari segi bahasa Indonesia, “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, penuntun, raja, tua-tua dan sebagainya. Istilah pemimpin dan kepemimpinan pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama “pimpin” yang berarti merumuskan, menunjukkan jalan dan membimbing (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 874).

Dalam Bahasa Inggris, pemimpin disebut dengan “*leader*”, dalam Bahasa Arab (ج) أَمِيرٌ - أَمْرَاءُ, pemimpin berarti penguasa dan pemimpin rakyat (Kamus Arab Indonesia, 2010, hlm. 48).

##### a. Pemimpin

Perkataan pemimpin (*leader*) mempunyai macam-macam pengertian. Beberapa definisi dapat disebutkan di bawah ini :

1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahan ke arah pencapaian tujuan tertentu.

2. Pemimpin ialah sebagai seorang yang secara formal diberi status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi atau cara-cara lain (Effendi, 1992, hlm.1).

3. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartini Kartono, 1994, hlm.45).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan itu dapat dipahami sebagai berikut: Seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Di dalam Islam, seorang pemimpin disebut Imam. Menurut bahasa adalah pemimpin yakni pribadi yang memiliki beberapa pengikut, terlepas dari kenyataannya apakah dia itu salah atau tidak. Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata ini dalam kedua pengertian di atas (Muthahari, 1991, hlm.22).

Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata Imam juga bisa digunakan untuk al-Qur'an karena al-Qur'an adalah imam (pedoman) bagi umat Islam. Demikian pula bisa digunakan Rasulullah SAW, karena beliau adalah pemimpin para pemimpin, yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin (as-Sulus, 1997, hlm.16).

Dengan demikian, kata imam yang bermaksud “pemimpin” dalam arti luas dan bersifat umum bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja, dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata imam yang bermaksud “pemimpin” yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin “spiritual” bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi oleh

tuntunan keadaan. Sebab dalam kenyataannya, upaya-upaya untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran agama Islam tidak hanya menyangkut pribadi, tetapi juga menyangkut kehidupan kolektif, urusannya bisa berdimensi politis (Pulungan, 1995, hlm.60-61).

Istilah Khalifah dan Amir dalam konteks bahasa Indonesia disebut pemimpin yang selalu berkonotasi pemimpin formal. Apabila kita merujuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 30), isi ayat al-Qur'an (Aunur Rahim dkk, 2001) :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dahulu orang menyatakan bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan secara psikologis yang dibawa sejak lahir, khusus ada pada dirinya dan tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga dia disebut sebagai “*born leader*” (dilahirkan sebagai pemimpin). Karena itu, sifat-sifat kepemimpinannya tidak perlu diajarkan kepada dirinya. Juga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Pendapat demikian itu ada mengandung kebenaran. Akan tetapi, pendapat itu pada zaman modern sekarang ini sudah banyak ketinggalan, sebab banyak usaha bersama yang beroperasi secara kooperatif dan mengarah pada pencapaian satu tujuan tertentu, juga berada dalam macam-macam kondisi sosial, yang membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan, dan pemimpin-pemimpin sedemikian ini harus disiapkan, dilatih dan dibentuk secara berencana dan sistematis. Pada mereka itu, diberikan latihan-latihan khusus untuk

membiasakan diri bertingkah laku menurut pola-pola tertentu, agar mereka mampu melakukan tugas-tugas kepemimpinan dan sanggup membawa kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya kepada obyek yang ingin dicapai.

#### b. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan. Dengan mempelajari berbagai pengertian tentang kepemimpinan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan bagi mereka yang berminat meraih peran kepemimpinan dalam masyarakat. Sedang manfaat yang lain, orang dapat mengerti segala masalah yang dihadapi oleh orang yang sedang berperan sebagai pemimpin dengan seluruh proses pasang naik dan surutnya (Sondang, 1994, hlm. 101).

Beberapa definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Menurut (Soekanto, 1990, hlm.318), kepemimpinan (*leadership*) adalah “kemampuan seseorang (yaitu pimpinan atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikutnya). Kepemimpinan juga diartikan “suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama.

Pengertian kepemimpinan Menurut Prof. Kimbal Young adalah bentuk dominasi disadari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang dapat bagi situasi khusus (Kartono, 2003, hlm. 33).

Menurut Abu Ahmadi (1999, hlm.123), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Menurut (Jacobs and Jacques, 1990, hlm.74), kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerja sama dan dihasilkan dengan

kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Ordway Tead memberikan rumusan *“leadership is the activity influencing people to cooperate some good which they come to find desirable”* (kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan) (Wursanto, 2004, hlm.101).

Ada 350 definisi kepemimpinan yang secara umum dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna mencapai tujuan bersama (Erman Suradinata, 2006, hlm.17). Kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan yang mempunyai fungsi dan tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekedar menduduki posisi (jabatan tertentu saja), tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kepemimpinan perempuan juga dapat diartikan suatu ilmu atau seni yang dilakukan oleh perempuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan langkah-langkah guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah *skill* (kemampuan) dan kesiapan dan seni yang dimiliki oleh seseorang bisa perempuan, bisa laki-laki untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan bersama.

## **6. Teori dan Tipologi Kepemimpinan**

### **2.3 Teori Kepemimpinan**

Banyak study yang dilakukan orang mengenai kepemimpinan, dan hasilnya berupa macam-macam teori tentang kepemimpinan, teori-teori yang dihasilkan menunjukkan perbedaan dalam :

- e. Pendapat Dan Uraianannya
- f. Tipologinya

- g. Interpretasi yang diberikan
- h. Kesimpulan yang ditarik.(Sondang P.Siagian, 1994, hlm. 27)

Setiap teori kepemimpinan mempunyai segi penekanannya sendiri, dipandang dari 1 aspek tertentu dan para penganutnya, mereka berkeyakinan bahwa teori itulah yang paling benar dan tepat.

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Wursanto( 2004) menyatakan ada enam teori kepemimpinan yaitu teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori karismatik, teori bakat, dan teori sosial. Menurut Miftah Thoha mengelompokkannya kedalam teori sifat, teori kelompok, teori situasional, model kepemimpinan kontijensi, dan teori jalan kecil-tujuan (*path goal theory*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori kepemimpinan, maka diuraikan beberapa teori kepemimpinan yaitu sebagai berikut : (Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, 2013, hlm. 6)

#### 10. Teori Kelebihan

Seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup dua hal, *pertama*, kelebihan ratio, kelebihan ilmu pengetahuan, *kedua* , kelebihan rohaniah, harus mampu menunjukkan keluhuran budi pekerti (akhlak) atau memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kecerdasan (ilmu pengetahuan) dan memiliki keimanan dan ketaqwaan (Wursanto, 2003).

#### 11. Teori Sifat

Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat yang positif, misalnya : adil, jujur, suka melindungi, komunikatif, penuh

percaya pada diri sendiri, mempunyai daya tarik, penuh inisiatif, energik dan kreatif, motivasi, memiliki emosi yang stabil, menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang positif dan memiliki integritas yang tinggi (Adam Ibrahim Indrawijaya, 1983).

#### 12. Teori Keturunan

Yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena keturunan atau warisan. Karena orang tuanya seorang pemimpin, maka anaknya otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan orang tuanya. Dengan ini seolah-olah seseorang menjadi pemimpin karena ditakdirkan (Wursanto, 2003).

#### 13. Teori Karismatik

Yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai karisma (pengaruh) yang sangat besar. Karisma itu diperoleh dari kekuatan yang maha besar. Artinya kepemimpinan yang karismatik yang memiliki kekuatan gaib (supranatural power) yang memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang besar (Wursanto, 2003).

#### 14. Teori Bakat

Yang disebut juga teori Ekologis, menyatakan bahwa pemimpin itu lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena bakat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu seseorang yang memiliki bakat kepemimpinan harus diberi kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan (Wursanto, 2003). Teori ini artinya seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan lingkungan yaitu faktor pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasikan

dengan baik. Menurut teori ini juga seseorang akan menjadi pemimpin yang baik jika ia dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat dikembangkan.

#### 15. Teori sosial

Beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin, setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin jika dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun melalui praktik atau pengalaman (Wursanto, 2000). Teori ini menentang pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.

#### 16. Teori Kelompok

Beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa mencapai tujuan. Tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Teori kelompok ini didasarkan perkembangannya pada psikologi sosial (Miftah Thoha, 2003). Seseorang bisa menjadi pemimpin dengan jalan dipilih oleh pengikutnya contohnya pimpinan organisasi dan pemimpin Negara (Presiden) karena dipilih oleh rakyat.

#### 17. Teori Situasional

Menyatakan bahwa beberapa variabel-situasional mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya termasuk pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya. Beberapa variabel

situasional di identifikasikan, tetapi tidak semua ditarik oleh situasioanl ini (Miftah Thoha, 2003). Efektivitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan "membaca" situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu.

#### 18. Teori Kepemimpinan Kontijensi

Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Yakni hubungan pimpinan dengan anggota, derajat dan struktur tugas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal (Miftah Thoha, 2003).

Dari teori-teori ini untuk menunjukkan dan menganalisis pengaruh perilaku pemimpin terhadap yang dipimpin. Apakah pemimpin itu dapat diterima atau tidak, dan juga untuk tercapai tidaknya suatu tujuan sehingga tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. Tentunya secara harmonis dan seimbang.

#### 2.4 Tipologi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Terdapat beberapa gaya/tipe kepemimpinan :

##### 8. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain,

sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pegawai – pegawai yang dapat dipercaya.

Pemimpin kharismatik lazimnya pada saat-saat kritis yang memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan drastis. Bentuk lahiria proses kepemimpinannya sering dianggap otoriter, karenanya walaupun dapat saja ia seorang yang berjiwa demokratis. Hal tersebut hanya merupakan akibat saja dari suatu masalah yang dihadapi. Contoh kepemimpinan kharismatik : Jengis Khan, Hittler, Jhon F. kenedy, Soekarno, dan Margaret Teacher.

#### 9. Tipe Paternalistik

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebabakan dengan sifat-sifat antara lain, sebagai berikut :

- e. Dia menganggap bawahannya sebagai orang-orang yang belum dewasa dan oleh karenanya selalu harus dituntun, dibimbing secara langsung, diajar dan dinasehati.
- f. Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dan mengambil keputusan sendiri.
- g. Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berimajinasi dan berkreatifitas.
- h. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

#### 10. Tipe Militeristik

Tipe ini sok kemiliter-militeran, hanya gaya luar saja yang mencontohkan gaya militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristik antara lain :

- d. Lebih banyak menggunakan system perintah / komando terhadap bawahannya sangat otoriter, kurang bijaksana.
- e. Menghendaki kepetuhan mutlak dari bawahannya
- f. Menuntut adanya disiplin yang keras.

#### 11. Tipe Otokrasi

Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi, pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal. Setiap perintah adalah kebijaksanaan dan keputusan selalu diambil tanpa konsultasi dengan bawahannya, selalu ingin berkuasa, *absolute*, tunggal dan merajai keadaan. Pemimpin mau bersikap baik bila bawahannya mau patuh secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri-sendiri yang paling tidak disukai adalah tipe pegawai yang setia.

#### 12. Tipe Lars Sez-Faire

Sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya untuk berbuat semuanya. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya, dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Ringkasan pemimpin ini pada hakikatnya bukan seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja demikian sama sekali tidak dipimpin, terkontrol dan tidak disiplin.

#### 13. Tipe Popularistis

Peter Worley mengemukakan kepemimpinan popularistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat misalnya Soekarno tipe kepemimpinan ini berpegang teguh pada

nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Dia mengutamakan kehidupan Nasionalisme dan menekankan kesatuan nasional dan sikap berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan serta penguasaan kekuasaan asing.

#### 14. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kekuatan tipe ini bukan terletak pada *person*(individu) pemimpin akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif setiap warga kelompok.

Tradisi demokratis secara sempit oleh Harman diartikan suatu proses sosial yang menunjukkan suatu kelompok sebagai keseluruhannya dalam mengatur dirinya sendiri, tidak tunduk kepada kekuasaan diluarnya dan setiap anggota diwakili secara sama dalam pembuatan keputusan-keputusan bersama. Bila terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dipertemukan maka keputusan ditentukan oleh kelompok mayoritas dan sisanya diharapkan dapat menerima keputusan tersebut (Kartono, 1994, hlm. 70 – 72).

Gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe-tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan yang merupakan Das Solen tentu saja gaya kepemimpinan demokratik. Tetapi Das Sain menunjukkan bahwa kepemimpinan yang cenderung digunakan adalah otokratik karena dalam psikologi seorang pemimpin bahwa ia merasa mempunyai *power*, orang nomor satu diajarannya, merasa punya wibawa dan sebagainya. Keadaan seperti ini akan membentuk seseorang menjadi otokrat.

Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah disatu sisi seorang pemimpin menggunakan gaya demokratik disisi lain tampak gaya otokratiknya.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh beberapa hal antara lain:

e. Sikap dan Hubungan Kemanusiaan

Seorang pemimpin yang baik dapat menghargai bawahannya, member pujian pada yang berhasil (lebih banyak menggunakan ibu jari ketimbang jari telunjuk) serta menegur secara halus pada yang bersalah.

f. Kecerdasan

Dalam menghadapi sesuatu seseorang pemimpin itu harus cerdas dan cepat tanggap dan mempunyai daya respon yang tinggi serta mempunyai pandangan luas.

g. Kedewasaan dan Keleluasaan Hubungan Sosial

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai emosi yang stabil. Ketika dikritik tidak emosi dan ketika dipuji tidak membusungkan dada, mempunyai perhatian yang luas pada aktivitas sosial, dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai.

h. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Pemimpin yang ideal selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Menurut Max Weber terdapat tiga tingkatan ukuran yang punya peluang untuk menjadi pemimpin. *Pertama*, mereka yang secara tradisional dalam arti berdasarkan keturunan, berhak menyandang dan bias diterima sebagai pemimpin serta mewarisi kepemimpinan leluhurnya. *Kedua*, mereka yang secara

Kharismatik dalam arti kelebihan yang dimiliki, berhak menyandang dan bisa diterima sebagai pemimpin serta mewakili aspirasi maupun kepentingan umatnya. *Ketiga*, mereka yang secara nasional dalam arti memenuhi persyaratan formal untuk diangkat dan didudukkan sebagai pemimpin. (Hamidah, 2014, hlm. 3-4).

## 7. Sifat – Sifat Pemimpin

Menurut Orway Tead mengemukakan bahwa syarat yang ideal untuk menjadi pemimpin adalah :

### k. Energi jasmani dan mental (*physical and enervous energy*)

Hampir semua pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi, kerja, disiplin, kesabaran, serta kemauan luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

### l. Kesadaran akan tujuan dan arah (*sense of purpose and direction*)

Dalam mengambil tingkah, dia tahu benar terhadap apa dan kearah mana tujuan itu dan manfaat yang dapat diambilnya guna pemenuhan kebutuhan kelompoknya.

### m. Antusiasme (*eathusiasme*; semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar)

Pekerjaan dilakukan itu harus bernilai memberikan harapan yang menyenangkan , memberikan sukses yang membangkit antusiasme dan semangat yang besar.

### n. Keramahan dan kecintaan (*friend lines and effection*)

Rasa kecintaan, kasih sayang, rela berkorban, sebab pemimpin ingin membuat kelompoknya senang, bahagia dan sejahtera.

o. Integritas (*integrity*, keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati)

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu bahkan merasa senasip dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama.

p. Petugas teknis (*technical mastery*)

Petugas harus memiliki suatu atau beberapa keahlian teknik tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.

q. Ketegasan dalam mengambil keputusan (*decisiveness*)

Setiap pemimpin yang berhasil selalu dapat mengambil keputusan dengan tepat, tegas dan cepat sebagai hasil dari keaktifan dan pengalaman.

r. Kecerdasan (*intelligence*)

Merupakan kemampuan untuk melihat dan memenuhi dengan baik, mengerti sebab akibat suatu masalah dan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat.

s. Keterampilan mengajar (*teaching skill*)

Pemimpin yang baik adalah seorang guru yang baik, yang mampu menentukan, mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu.

t. Kepercayaan (*faith*)

Keberhasilan pemimpin pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. Yaitu kepercayaan bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik dan diarahkan pada sasaran yang benar (Kartono, 1994, hlm. 68-69).

## 8. Kepemimpinan Perempuan Menurut Ajaran Islam

Sejak 14 abad yang silam al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki.

Diantaranya dalam masalah kepemimpinan Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian juga Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki – laki berdasarkan dalil-dalil syara’.

Kepemimpinan dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti “kepemimpinan” seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebutkan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader(perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Q.S An-Nissa ayat 59 yang artinya :

Q.S An-Nissa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat tersebut yang bermakna penguasa, pemerintahan, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat.

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sungguh merupakan pendobrak terhadap adat istiadat yang tidak terpuji disamping sebagai pendorong untuk menciptakan tradisi yang banyak mengandung

kemaslahatan khususnya dibidang persamaan hak antara kaum adam dan kaum hawa, tidak dapat dipungkiri lagi. Dengan hadirnya tokoh-tokoh dalam Islam, baik ia sebagai istri yang setia, sebagai politikus, sebagai pejuang dimedan laga, sebagai sosiawan dan sebagainya, merupakan bukti yang nyata bahwa Islam mengangkat derajat kaum wanita (Asror Mustaghfiri, 1983, hal. 140).

Tokoh-tokoh wanita Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah SAW, Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq, Asy Syifa (Ummu Sulaiman) binti Abdullah bin Abdisya Syamsy Al Adawiyah Al Quraisyiyah, Rufaidah, Khansa (Tumadhir) binti Amrin bin Harits bin Syarid, Gazalah, Zubaidah, ‘Abbasah, Sayyidah, Qahramannah (Matsal), Walladah, Sya’irah Arudhiyah, Laifa Kathun, Hamdah binti Ziyad, Syajaratud Durr (Ummu Khalil, Bazme Alem, Ratu Raziya, Nur Jehan Begum, Qara Fathimah Khanum, Fathimah binti Quraymezam.

Adapun sebagai contoh perempuan yang berpolitik adalah Aisyah. Beliau adalah *Ummul Mukminin* Ummu Abdillah **Aisyah** binti Abu Bakr, Shiddiqah binti Shiddiqui Akbar, istri tercinta Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau lahir empat tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang Nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* masih hidup yaitu tepatnya pada tahun ke-6 H.

Keutamaan dan kemuliaan Aisyah R.A antara lain :

1. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin al-Ash bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “*Aisyah.*”

“Dari kalangan laki-laki?” tanya Amr. Beliau menjawab, “*Bapaknya.*” (HR. Bukhari (3662) dan Muslim (2384))

2. Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata az-Zuhri, “Apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama.” (Al-Mustadrak Imam Hakim (4/11)).
3. Para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Asy’ari, “Tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadits lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya.” (Shahih Sunan at-Tirmidzi (3044)).
4. Ia terjun kekanca politik pada masa Usman bin Affan dan menjadi komandan tertinggi melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu dikenal dengan perang Jamal lantaran Aisyah memimpin perang dengan mengendarai onta. Aisyah juga dikenal intelektual tinggi dan juga seorang orator yang senantiasa mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Aisyah juga adalah wanita yang dipanggil “Humaira” (si merah delima) oleh Rasulullah SAW. Aisyah juga orang yang cerdas meriwayatkan Hadis ± sebanyak 2210 hadis (Asror Mustaghfiri, 1983, hal. 141-142).

Pada masa Rasulullah SAW kaum perempuan mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kodratnya. bahkan sebagian dari mereka ikut serta dalam jihat dijalan Allah SWT dan ikut berperang diantaranya Nasibah binti Ka’ab ikut serta dalam perang Uhud, Al Rabi’ah binti Mas’ud dalam peperangan membela Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab beliau juga mengangkat Asy Syifa binti Abdullah sebagai

mengurusi pasar dan guru wanita pertama dalam Islam bahkan istri Nabi bernama Hafsa binti Umar menjadi muridnya ia member pelajaran membaca dan menulis.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu Negara (Presiden atau Kepala Pemerintahan) sebagaimana halnya kaum laki – laki, bila mereka memiliki criteria persyaratan sebagai pemimpin.

Perempuan (wanita) dalam pandangan Islam dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perempuan adalah manusia ciptaan Allah SWT, yang memiliki perbedaan secara fisik dan biologis, dan berjenis perempuan. Namun di sisi Allah SWT, memiliki kedudukan dan posisi yang sama dengan makhluk Allah SWT yang berjenis laki-laki dalam hal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap perintah Allah SWT, *amar makruf nahi mungkar* (menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT).

Antara perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan derajat dan martabat yang sama. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahqaf (46) ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Pengertian “mereka” dalam ayat ini jelas bagi perempuan dan laki-laki mendapat imbalan sesuai dengan hasil kerja masing-masing. Meskipun demikian, persamaan kepentingan tidak dapat membenarkan tuntutan atas persamaan yang sempurna. Ada juga kelompok yang menggunakan ayat-ayat sebagai sandaran argumentasi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya, kewenangan poligami bagi laki – laki (An-Nisa Ayat 3) kepemimpinan laki – laki atau perempuan (An – Nisa Ayat 34) pembagian warisan yang tidak sama antara laki – laki dengan perempuan (An – Nisa Ayat 11). Perbedaan ketentuan yang ada dalam ayat-ayat ini sering dijadikan sebagai

rendahnya kedudukan perempuan, padahal ketentuan ini bertujuan sebaliknya yaitu terciptanya kerjasama yang harmonis sebagai realisasi dari hasil hubungan anatar jenis pada tahap awal. Mengenai perbedaan yang ada pada ayat-ayat tersebut, dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan seseorang dari yang lainnya.

Secara umum, Islam menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam beribadah kepada Allah SWT (QS 2 : 21) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”.

Q.S an-Nahl (16 : 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Q.S at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah

yang munkar. Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikan. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Persoalan perempuan yang merupakan hasil pemahaman atau penafsiran para pemikir Muslim yang berkaitan dengan relasi gender, yang meliputi persoalan kepemimpinan, kesaksian dan lainnya.

#### **a. Persamaan dalam Kedudukan dan Potensi**

Salah satu prinsip dari ajaran Islam (al-Qur'an) adalah ajaran tentang persamaan di antara manusia. Manusia menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Faktor yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah bukanlah karena

faktor fisik-biologisnya, melainkan semata karena ketaatan kepada-Nya (al-Taqwa). Di antara ayat al-Qur'an yang memuat prinsip persamaan ini antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S 49 : 13).

Selain itu, ditemukan pula ayat al-Qur'an yang secara khusus menunjuk kepada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di antara ayat-ayat itu adalah :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (Q.S 4 : 124).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S 16 : 97).

Memperhatikan ayat-ayat di atas, seakan tidak ada lagi permasalahan yang harus diperdebatkan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan jelas-jelas telah mendapatkan legitimasi al-Qur'an. Pemahaman yang demikian barangkali bisa diterima karena hal ini menyangkut kedudukan manusia di hadapan Allah, relasi manusia dengan Allah, meminjam istilah etik yang dipakai (Toshihiko Izutsu, 1993, hlm. 20).

Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mahmud Syaltut, dalam bukunya *al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat* menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus (Quraish Shihab, 1994 , hlm. 269-270).

Berkaitan dengan persamaan potensi ini, kemudian muncul sejumlah pertanyaan. Kalau sekiranya kepada perempuan telah diberikan potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, mengapa dalam relasi di antara keduanya sekarang ini terjadi perbedaan ? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, di antara kaum perempuan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat. Satu pihak menyatakan bahwa peran domestik kaum perempuan di dalam rumah tangga adalah sebagai sesuatu yang mesti dijalannya dengan sepenuh hati. Bahkan telah muncul diskursus keagamaan seperti dikatakan kitab-kitab fiqh bahwa kodrat perempuan adalah di rumah.

Sementara di pihak lain mengatakan bahwa peran-peran domestik itu bukanlah kodrat wanita. Peran-peran itu hanyalah merupakan konstruksi sosial yang dapat dirombak dan diubah. Peran-peran domestik itu bukanlah monopoli kaum perempuan, apalagi perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya peran-peran domestik seperti memasak misalnya, justru merupakan keahlian yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Di samping persamaan kedudukan dan potensinya sebagai hamba Allah, persamaan itu diperkuat pula dengan kedudukannya sebagai khalifah Tuhan di bumi (*khalifatullah fil-ardl*). Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama mengemban tugas kekhalifahan. Kekhalifahan berarti menuntut kepada baik laki-laki dan perempuan untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai

maksud dan tujuan penciptaan, baik dalam pengertian politik maupun kehidupan pada umumnya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 492).

## b. Kepemimpinan

### 1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah ayat 34 surat an-Nisa. Dari ayat ini telah muncul pandangan yang stereotip bahwasannya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini, kemudian melebar ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin. Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan feminis untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ  
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S an-Nisa (4) : 34).

Memahami ayat tersebut, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) adalah pemimpin terhadap isterinya. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah *al-rijalu qaqqamuna ‘ala an-nisa*. Oleh Zamakhsyari, kalimat tersebut ditafsirkan dengan “kaum laki-laki

berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”. Dengan redaksi yang berbeda, Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari bahwa tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan yang semacamnya.

Alasan Zamakhsyari kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga karena : *pertama*, kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan laki-laki itu adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, kesaksian dalam khudud dan qisas, mendapatkan ashabah dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak dinisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai sorban. *Kedua*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 76).

Sementara itu, Alusi mengemukakan alasannya berdasarkan pada adanya dua sifat yang melekat pada laki-laki, yaitu sifat *wahbi* dan *kasabi*. *Wahbi* adalah kelebihan yang didapat dengan sendirinya (*given*) dari Tuhan, tanpa usaha; sedangkan *kasabi* adalah suatu kelebihan yang merupakan hasil ikhtiar. Menurut Alusi, ayat tersebut tidak menjelaskan apa saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal ini menurutnya mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan yang rinci (Yunahar Ilyas, 1998, hlm. 77).

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang

membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu, suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota keluarganya (Quraish Shihab, 1996, hlm. 310). Untuk memperkuat pendapatnya, Quraish Shihab mengutip al-Qur'an ayat 228 dari surah al-Baqarah :

**وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

Artinya : Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat / tingkat atas mereka (para isteri) (Q.S al-Baqarah (2) : 228).

Demikian pandangan beberapa mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dari surat an-Nisa ayat 34. Mereka sepakat dalam penafsirannya bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (isteri) dengan dua alasan, yaitu : karena kelebihan laki-laki atas perempuan, dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya.

Dalam perspektif yang lain, ayat tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh kalangan feminis. Asghar Ali Engineer misalnya, berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil pandangan yang semata-mata bersifat teologis, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis (Asghar Ali Engineer, 1994, hlm. 61).

Dalam pandangan Asghar keunggulan laki-laki bukan merupakan keunggulan jenis kelamin, tetapi berupa keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (dan keluarga). Fungsi sosial yang diemban

oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Alasannya adalah karena perempuan ketika itu masih sangat rendah kesadaran sosialnya dan pekerjaan domestik sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki memandang dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan (Asghar Ali, 1998, hlm. 62).

Berbeda dengan Asghar adalah Aminah Wadud dan ia menyetujui laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, dalam hal ini ia memberikan dua persyaratan, yaitu jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, dan jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya (Aminah Wadud, 1994, hlm. 93-94).

Pendapat yang berbeda tentang penafsiran ayat di atas dikemukakan juga oleh Masdar F. Mas'udi. Dalam bukunya, "Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan" (1997 : 61-62), dengan mengutip *Tafsir Jalalain* (1981 : 76), kata *qawwamuna ala an-nisa*, tidak semata ditafsirkan dengan menguasai atau mensultani perempuan, melainkan dapat pula ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ternyata ditemukan dalam surah an-Nisa (4) : 135 dan al-Maidah (5) : 8. Sehingga dengan demikian, ayat itu artinya adalah "kaum laki-laki adalah penguat dan penopang kaum perempuan dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan". Dengan pengertian seperti itu, maka secara normatif, sikap suami (laki-laki) kepada isteri (perempuan) bukanlah 'menguasai' atau 'mendominasi' dan cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi.

## 2. Kepemimpinan dalam Negara

Konsekuensi sektor publik menuntut perempuan untuk tampil di depan khalayak. Sementara itu, ada larangan umum terhadap kaum perempuan untuk tidak keluar dari rumah. Keadaan semacam ini diperkuat dengan adanya hadits yang mencela kepemimpinan perempuan. Hadits Nabi menyatakan :

عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من ستخلفوا قالوا بنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أمراهم امرأة (رواه الترمذي)

Dari Abi Bakrah berkata, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda : “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (H.R.Tirmiziy) (Muhammad Ibnu Isa Abu Isa at-Tarmiziy, h. 254, Hadits No. 2262).

Menurut Quraish Shihab (1996 : 314), yang perlu digarisbawahi dari hadits di atas adalah bahwa hadits itu tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadits di atas yang semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Kalau kebanyakan ulama menjadi hadits di atas sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi kepala negara, Ahmad Munif (2000 : 36), dengan mengutip pendapat Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik, ia menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin atau presiden. Dengan memperhatikan latar belakang historis, atau dalam istilah Asghar Ali, konteks keluarnya sebuah hadits (*asbab al-wurud*), pendapat Imam at-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara nampaknya lebih bisa diterima.

Selain itu, jika hadits di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi bahwa syarat kepemimpinan itu mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur'an menunjukkan kisah seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah yang menceritakan kesuksesan Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba'.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S an-Naml (27) : 23).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga diperkuat dengan tidak adanya hadits Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu dengan adanya beberapa orang ratu (*sulthanah*) di Kerajaan Aceh (F. Masdar Mas’udi, 1997, hlm. 59).

Selain masalah kepala negara, salah satu ayat yang sering menjadi rujukan para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan *Rasul-Nya*. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S at-Taubah (9) : 71).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Menurut Quraish Shihab (1996 : 315), pengertian kata *awliya* mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar

masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Adapun kepemimpinan merupakan seni dan kemampuan untuk memimpin. Unsur pokok dalam kepemimpinan ialah kolaborasi seni dan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang untuk berbuat ke arah yang diinginkan.

Kemampuan setiap orang dalam memimpin tentulah tidak sama, tetapi Islam mengakui bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, sebagaimana sabda beliau :

*“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang laki-laki adalah pemimpin atas ahli keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, pelayan pimpinan atas harta majikannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Dan semua kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu”* (H.R Bukhari).

Hadits di atas mengindikasikan bahwa potensi memimpin harus dimiliki oleh setiap orang dan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap individu harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin apapun posisi yang diembannya selama dia masih berstatus sebagai *mukallaf*.

Ketika fokus pembicaraan berkaitan dengan kepemimpinan, di mana pada satu sisi ada yang memimpin dan pada sisi yang lain ada yang dipimpin, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah :

6. Memimpin dengan adil dan bijaksana
7. Membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi yang berhajat
8. Mendamaikan perkara terhadap yang bersengketa

9. Mengontrol (mengoreksi dan mengevaluasi) pegawai (yang dipimpinnya)
10. Mencegah tersebarnya gosip (fitnah)

Sementara itu, pemimpin juga mempunyai beberapa hak yang seyogyanya akan didapatkannya ketika dia telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diantaranya :

6. Diberi upah dari baitul mal
7. Didengar dan ditaati seluruh instruksinya selama tidak maksiat
8. Diberi nasehat (saran) yang konstruktif
9. Dihormati secara wajar
10. Menjaga perkataan di hadapannya

Islam memberikan apresiasi yang tinggi bagi pemimpin (imam) yang adil, di mana mereka itu termasuk salah satu dari tujuh kelompok yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain dari naungannya Allah SWT (H.R Bukhari dari Abu Hurairah).

Penjelasan hadits tersebut memberikan kabar gembira nanti di akhirat bahwa bagi pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Pada sisi lain, di dunia ini juga akan terlihat ganjarannya. Seorang pemimpin yang adil akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas atas segala jasa dan pola kepemimpinannya.

Di samping itu, al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada jaman Nabi untuk melakukan *bai'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12. Sementara para pakar agama Islam menjadi *bai'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah, surah an-Nisa ayat 34, “Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan ...” sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik karena –kata mereka– kepemimpinan berada di tangan lelaki sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat an-Nisa ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami (Dadang, 1997, hlm. 10-11).

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah Utsman RA.

Penggambaran perempuan dengan citra positif di atas sangat berlawanan dengan sebagian ulama lain yang membangun citra negatif terhadap perempuan, khususnya dalam kepemimpinan politik. Beberapa bangunan argumentasi yang diajukan juga bermuara pada dalil yang sama antara lain al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, sebagaimana dikutip di atas. Hanya saja pendekatan penafsirannya yang berbeda sehingga melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Misalnya, dalam beberapa kitab tafsir klasik disebutkan bahwa, “Para laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan karena mereka mempunyai

kelebihan akal (intelektualitas) dan mempunyai kemampuan mengatur (*leadership*), sementara perempuan sebaliknya lemah akal dan agamanya”. Hal yang senada juga dinyatakan dalam kitab tafsir lain bahwa kepemimpinan laki-laki karena ia diberi kelebihan oleh Allah untuk mengatur, mendidik dan menjaga perempuan, yaitu kekuatan akal pikirannya (Yunahar, 1997, hlm.50).

Secara umum, alasan yang digunakan adalah perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang, dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (*fitnah*) dan menstimulasi konflik sosial. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (*al-Qur'an* dan *Hadits*) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun waktu yang panjang, pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas, bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari'ah, Islam bagi perempuan untuk memegang jabatan-jabatan publik (*al wilayah al 'ammah al mulzimah*). Said al-Afghani mengatakan “*al siyasa 'ala mar'ah haram shiyanah li al mujtama' min al takhabbuth wa su-u al munqalab*” (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan). Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba'i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba'i mengatakan bahwa “Peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat di jauhi, bahkan saya katakan diharamkan. Hal ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian, melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam, dan merugikan kepentingan keluarga.

Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin secara normatif selalu mengacu pada *al-Qur'an* surat an-Nisa ayat 34 yang dimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Di samping itu juga, mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu *Hadits* Rasulullah yang menyatakan, “*Tidak akan bahagia suatu kaum (bangsa) yang dipimpin oleh seorang*

*perempuan*”. Menurut mereka, perempuan haram aktif di pentas politik, di samping ketidakmampuannya untuk memimpin karena mereka kurang akal dan agamanya, juga kehadiran perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah.

Dalam pandangan K.H Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 di atas sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogis utama (*qiyas aulawi*). Hal ini kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadits riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum / bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan), melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadits tersebut.

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadits itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan hadits di atas, terdengar kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja / Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan konteks hadits tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks hadits di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelamin yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politikkah sumbernya (Masdar, 1996, hlm.51).

Masih dalam kaitan dengan status hukum kepemimpinan perempuan menanggapi hadits di atas para ulama berbeda. Ismail al-Shan'ani memetakan dua pendapat hukum yang berbeda. *Pertama*, pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) yang menyatakan haram hukumnya mengangkat perempuan menjadi imam / kepala negara. *Kedua*, pendapat Ibn Jarir at-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan. Pendapat at-Thabari mewakili ulama klasik merupakan pendapat minoritas di tengah hegemoni pendapat *mainstream* yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun demikian, peta pendapat ulama yang berbeda dalam masalah krusial ini mengandaikan telah terjadi perdebatan akademik yang produktif dan toleran, tanpa harus memunculkan sikap *truth claim* dengan semangat fanatisme yang parsial dan penuh kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Dari perbedaan pendapat ini juga menginformasikan bahwa kontroversi tentang kepemimpinan adalah isu klasik, tetapi selalu aktual.

Menurut K.H Husein Muhammad, sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit). Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah "*baiat*" (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah bin Ka'ab, Ummu Athiyyah al-Anshariyah dan Rabi' bin al-Muawwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah (Quraish Shihab, 1992, hlm.289).

Partisipasi politik perempuan sekarang ini mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara sub ordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20, tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Selain itu pula, hal yang memisahkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidupnya adalah berkenaan dengan konsep hijab. Secara kebahasaan hijab diartikan dengan tabir, penutup, tirai, layar dan sekat (Ahmad Warson, 1984, hlm. 256). Dalam karya-karya *fiqh al-Nisa*, seperti Kitab *Ahkam an-Nisa* karya Ibn al-Jauzi, *Husn al-Uswah* karya Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qannuji. Konsep hijab ini cenderung dimaknai dengan ‘pemingitan’ kaum perempuan dalam rumah-rumah tangga. Bab-bab yang diulas dalam buku-buku itu antara lain mengenai ‘Nasihat Agar Kaum Wanita Tidak Pergi ke Luar Rumah’, ‘Keuntungan Wanita yang Semata Ibu Rumah Tangga’, ‘Bukti-Bukti yang Menunjukkan Lebih Baik Wanita Tidak Menjumpai Kaum Pria’, dan seterusnya (Fatima Mernisi, 1994, hlm. 124-126). Salah satu ayat yang menjadi dasar legitimasi *hijab* (pemingitan) adalah :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu ... (Q.S Al – Ahzab (33) : 33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat di atas seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar dari rumah. Quraish Shihab (1996 : 304) dengan mengutip al-Maududi dari bukunya yang berjudul *Al-Hijab*, menyatakan bahwa ayat itu berarti ‘tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana’. Menurutnya tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah, kecuali agar mereka selalu ada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu bagi setiap insan.

Berbeda dengan pemikiran di atas, seorang pemikir Mesir, Qasim Amin, menerbitkan sebuah buku yang diberi judul *The Emancipation of Women*. Dalam buku tersebut dibicarakan tentang keruntuhan dalam masyarakat Muslim yang antara lain disebabkan oleh kebodohan. Ia mengatakan bahwa kebodohan itu bermula dari keluarga, yaitu ketika kaum perempuan banyak yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki kebebasan untuk memainkan peran yang positif dalam masyarakat. Keadaan yang demikian bukan disebabkan karena Islam, melainkan dikarenakan kebiasaan dan praktek-praktek keliru yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim.

Qasim Amin menegaskan bahwa akar masalahnya adalah degradasi kedudukan perempuan dalam masyarakat Muslim. Cara yang benar untuk mengatasi hal itu adalah dengan memberikan pendidikan kepada mereka, bukan dalam pengertian pendidikan manajemen keluarga semata, melainkan dalam bidang-bidang ilmu di mana mereka dapat membantu kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia menyatakan, pemberdayaan (*empowerment*) kaum perempuan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan (*liberation*) mereka dari dominasi laki-laki. Ia mengkritik ‘pemingitan’ kaum perempuan dalam rumah, karena hal itu dipandang secara sosial membahayakan dan

menghalangi kaum perempuan untuk mengekspresikan potensi dan kemampuannya secara penuh.

Dalam buku keduanya yang berjudul *The New Woman*, Amin mengurai serangkaian kriteria baru bagi penilaian mengenai perempuan dalam kehidupan sosial. Kriteria-kriteria itu meliputi konsep-konsep kebebasan, kemajuan dan peradaban. Ia menegaskan bahwa kebebasan perempuan adalah sama pentingnya seperti kebebasan-kebebasan yang lain seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berbicara. Melanggar kebebasan-kebebasan ini adalah berarti pemerkosaan terhadap kaum perempuan (Subhani, 1999, hlm.67).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. KESIMPULAN**

Setelah mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

3. Semua responden (100%), pandangan pengurus wilayah Muslimat Nahdhatul Ulama Sumatera Selatan periode 2011-2016 menyatakan, membolehkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan konsep Al – Quran karena tidak ada perintah ataupun larangan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan kalau dilihat dari Al – Quran surat An – Nisa Ayat 34 mengenai Asbabun Nuzulnya berbicara tentang kepemimpinan laki – laki

dalam hal rumah tangga, bukan dalam hal pemerintahan dan sektor publik. Berdasarkan hadist Abi Bakrah pengurus menyatakan 55% hadist tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Sebagai hamba Allah SWT perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama sebagai pemimpin kecuali berbeda dalam hal tanggungjawab, kodrat, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

4. Berdasarkan argumentasi pengurus pimpinan wilayah Muslimat NU syarat kepemimpinan perempuan antara lain ketaqwaan, integritas, memiliki akhlak, ilmu pengetahuan, musyawarah, memiliki keterampilan (*skill*) dan profesionalitas.

#### **D. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

4. Pemerintah perlu melaksanakan pembuatan kebijakan dalam hal kesetaraan gender khususnya kepada hak kaum perempuan mengenai pekerjaan, politik, dan sebagainya. Dan pemerintah harus berupaya mengumpulkan tokoh masyarakat seperti ulama, pendeta, orang memiliki kendali terhadap masyarakatnya. Untuk upaya pensosialisasian antara kesinambungan antara kesetaraan gender maupun dengan ajaran agama yang mereka anut, dalam upaya pembebasan dari budaya patriarki.
5. Perempuan boleh menjadi seorang pemimpin asalkan memiliki kompetensi sebagai perempuan sholihah (amanah, taqwa, jujur, bertanggungjawab, semangat pengabdian terhadap umat, berakhlak mulia).

6. Perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan perempuan tersebut telah memenuhi ketentuan/ketetapan/persyaratan yang berlaku sebagai pemimpin dan mampu memimpin dan yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam.